



DATA DAN INFORMASI

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

TAHUN 2023



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

DATA DAN INFORMASI

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

TAHUN 2023

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jakarta, Desember 2023

DATA DAN INFORMASI

**DITJEN PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN
TAHUN 2023**

PENYUSUN & PENYUNTING :

Kelompok Kerja Data dan Informasi
Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik

DESAIN SAMPUL & LAYOUT :

Dhany Ramdhany, S.Si., M.Hum.
Hardi Kurnia Putra, S.T.
Tenang Carles Rinaldi Silitonga, S.Komp.

DITERBITKAN OLEH :

**Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Gedung Manggala Wanabakti
Blok I Lt.7, Cq. Bagian Program, Evaluasi, Hukum dan Kerjasama Teknik
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta 10270
Telp. / Fax: (021) 5730 / (021) 5734632
Email: datainformasi.planologi@gmail.com

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

KATA PENGANTAR

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2023 ini disusun sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor: P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penyusunan buku ini dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan Data dan Informasi tentang pembangunan keplanologian kehutanan dan tata lingkungan sekaligus menyempurnakan data dan informasi sebelumnya, yang disajikan dalam bentuk Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2023.

Buku Data dan Informasi Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2023 merupakan gambaran capaian kegiatan pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan yang disajikan secara rinci per Provinsi atau unit-unit wilayah tertentu.

Kami menyadari bahwa dalam Buku Data dan Informasi ini masih banyak kekurangan, namun harapan kami semoga Buku Data dan Informasi ini dapat memberikan manfaat terutama bagi yang berkepentingan.

Jakarta, Desember 2023

DIREKTUR JENDERAL

**Dr. Hanif Faisol Nurofiq, S.Hut., M.P.
NIP. 19860726 200912 2 003**

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	v
PENDAHULUAN	1
LAMPIRAN	3

DAFTAR TABEL

Halaman

I. INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Tabel I.1	Rekalkulasi Penutupan Lahan Indonesia Tahun 2022.....	3
Tabel I.2	Tabel Angka Deforestasi Netto di Dalam dan di Luar Kawasan Hutan Tahun 2021 - 2022 (Ha).....	13
Tabel I.3	Data Potensi Sumber Daya Hutan Indonesia dari Plot Inventarisasi Hutan Nasional.....	26

II. PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

Tabel II.1	Perkembangan Penyusunan/Revisi/Review RKTP	39
Tabel II.2	Perkembangan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dalam Proses Review RTRWP	42

III. PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

Tabel III.1	Luas Kawasan Hutan dan Kawasan Konservasi Perairan Indonesia Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	47
Tabel III.2	Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan.....	49
Tabel III.3	Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan	51
Tabel III.4	Perkembangan Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)	53

IV. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

Tabel IV.1	Perubahan Fungsi	57
Tabel IV.2	Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Pemukiman Transmigrasi (Tahap SK Pelepasan /Penegasan APL Kawasan Hutan).....	79
Tabel IV.3	Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan Untuk Non Kehutanan Lainnya (Tahap SK Penetapan Batas Areal Pelepasan Kawasan Hutan)	81
Tabel IV.4	Perkembangan Tukar Menukar Kawasan Hutan Kawasan Hutan.....	83

V. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Tabel V.1	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi (Tambang).....	85
Tabel V.2	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang)	87
Tabel V.3	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi (Tambang)	89
Tabel V.4	Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Non Tambang	91
Tabel V.5	Perkembangan Lahan Kompensasi (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima)	93
Tabel V.6	Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) Per Provinsi	94

VI. PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Tabel V.1	Daftar Penerbitan Surat Keputusan Rekomendasi Dan Izin Lingkungan (UKL-UPL) Tahun 2013-2022	97
Tabel V.2	Daftar Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Dan Izin Lingkungan (AMDAL) Tahun 2013-2022	98

VII. KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Tabel VI.1	Status Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)	99
Tabel VI.2	Status Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan (RRTR).....	101
Tabel VI.3	Status Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).....	104
Tabel VI.4	Status Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).....	105
Tabel VI.5	Status Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).....	106
Tabel VI.6	Status Validasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Food Estate (FE).....	108

VIII. DUKUNGAN MANAJEMEN

Tabel VI.1	Rekapitulasi Sebaran PNS dan CPNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pusat dan Daerah	109
Tabel VI.2	Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Pusat dan Daerah	111
Tabel VI.3	Perkembangan Jumlah PNS Berdasarkan Nama Jabatan Fungsional Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Pusat dan Daerah s.d. Desember 2023	113
Tabel VI.4	Perkembangan Diklat Penjenjangan PNS Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.....	115
Tabel VI.5	Perkembangan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.....	117
Tabel VI.6	Rekapitulasi Perkembangan Anggaran Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	129
Tabel VI.7	Perkembangan Realisasi Keuangan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	131

DAFTAR GAMBAR

Halaman

I. INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

Gambar 1.	Presentase Penutupan Lahan Tahun 2022	11
Gambar 2.	Grafik Luas Penutupan Lahan Tahun 2022.....	12
Gambar 3.	Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribuan Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2021-2022 di Dalam Kawasan Hutan (KH)	25
Gambar 4.	Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribuan Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2021-2022 di Dalam dan di Luar KH.....	25
Gambar 5.	Grafik Deforestasi Netto per Provinsi (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022.....	25
Gambar 6.	Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022.....	25
Gambar 7.	Diagram Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia (Ribuan Ha) Tahun 2021-2022 di Dalam KH dan di Luar KH (APL)	25
Gambar 8.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Primer Berdasarkan Volume Tegakan Pohon.....	28
Gambar 9.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Primer Berdasarkan Volume Tegakan Pohon	28
Gambar 10.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Sekunder Berdasarkan Volume Tegakan Pohon.....	28
Gambar 11.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Sekunder Berdasarkan Volume Tegakan Pohon	28
Gambar 12.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Tanaman di Provinsi Jawa Barat	28
Gambar 13.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Tanaman di Provinsi Jawa Timur.....	28
Gambar 14.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Primer Berdasarkan Kerapatan Jenis Pohon	31
Gambar 15.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Primer Berdasarkan Kerapatan Jenis Pohon .	31
Gambar 16.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Sekunder Berdasarkan Kerapatan Jenis Pohon	31
Gambar 17.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Sekunder Berdasarkan Kerapatan Jenis Pohon	31
Gambar 18.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Primer Berdasarkan Luas Bidang Dasar Pohon.....	34
Gambar 19.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Primer Berdasarkan Luas Bidang Dasar Pohon	34
Gambar 20.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Sekunder Berdasarkan Luas Bidang Dasar Pohon	34
Gambar 21.	Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Sekunder Berdasarkan Luas Bidang Dasar Pohon	34
Gambar 22.	Grafik Potensi Tegakan Hutan Mangrove Primer berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon	37
Gambar 23.	Grafik Potensi Tegakan Hutan Mangrove Sekunder berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon	37
Gambar 24.	Grafik Potensi Tegakan Hutan Lahan Kering Primer berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon	37
Gambar 25.	Grafik Potensi Tegakan Hutan Lahan Kering Sekunder berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon	37
Gambar 26.	Grafik Potensi Tegakan Hutan Rawa Primer berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon	37
Gambar 27.	Grafik Potensi Tegakan Hutan Rawa Sekunder berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon .	37

II. PENGUKUHAN DAN PENATAGUNAAN KAWASAN HUTAN

Gambar 28. Diagram Perbandingan Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Indonesia dengan Luas APL	48
Gambar 29. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Indonesia Per Jenis Hutan	48
Gambar 30. Grafik Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan (Batas Luar)	50
Gambar 31. Grafik Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan (Batas Fungsi)	50
Gambar 32. Grafik Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan (HPK)	50
Gambar 33. Grafik Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (Unit)	52
Gambar 34. Grafik Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (Luas)	52
Gambar 35. Diagram Capaian Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (Eksisting/Inver)	56
Gambar 36. Diagram Capaian Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (Non-Eksisting/Non-Inver)	56
Gambar 37. Grafik Perkembangan Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2015-2024	56

III. PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

Gambar 38. Grafik Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Indonesia pada Tahun 2023	78
Gambar 39. Grafik Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi	80
Gambar 40. Grafik Luas Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi	80
Gambar 41. Grafik Unit Perkembangan Pelepasan kawasan Hutan untuk Non Kehutanan Lainnya ...	81
Gambar 42. Grafik Luas Perkembangan Pelepasan kawasan Hutan untuk Non Kehutanan Lainnya ..	81
Gambar 43. Grafik Unit Perkembangan Tukar Menukar Kawasan Hutan	84
Gambar 44. Grafik luas Perkembangan Tukar Menukar Kawasan Hutan	84

IV. PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

Gambar 45. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Tambang)	86
Gambar 46. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Tambang)	86
Gambar 47. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Tambang) per Provinsi Tahun 2023	86
Gambar 48. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Tambang) per Provinsi Tahun 2023	86
Gambar 49. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang)	88
Gambar 50. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang)	88
Gambar 51. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang) per Provinsi Tahun 2023	88
Gambar 52. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang) per Provinsi Tahun 2023	88
Gambar 53. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Operasi Produksi (Non Tambang)	90
Gambar 54. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Operasi Produksi (Non Tambang)	90
Gambar 55. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Operasi Produksi (Non Tambang) per Provinsi Tahun 2023	90
Gambar 56. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Operasi Produksi (Non Tambang) per Provinsi Tahun 2023	90
Gambar 57. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Non Tambang	92
Gambar 58. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Non Tambang	92
Gambar 59. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Non Tambang per Provinsi Tahun 2023	92
Gambar 60. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Non Tambang per Provinsi Tahun 2023	92
Gambar 61. Grafik Unit Lahan Kompensasi (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima)	93

Gambar 62. Grafik Luas Lahan Kompensasi (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima).....	93
Gambar 63. Grafik Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (Tambang)	95
Gambar 64. Grafik Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (Non Tambang)	95

V. PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Gambar 65. Grafik Daftar Penerbitan SK Rekomendasi dan Izin Lingkungan UKL-UPL (Rekomendasi)	97
Gambar 66. Grafik Daftar Penerbitan SK Rekomendasi dan Izin Lingkungan UKL-UPL (SKIL).....	97
Gambar 67. Grafik Daftar Penerbitan SK Rekomendasi dan Izin Lingkungan UKL-UPL (PKPLH).....	97
Gambar 68. Grafik Daftar Penerbitan SK Kelayakan Lingkungan Tahun 2023.....	98

VIII. DUKUNGAN MANAJEMEN

Gambar 69. Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di Pusat	110
Gambar 70. Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di Daerah	110
Gambar 71. Grafik Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pusat ...	112
Gambar 72. Grafik Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di UPT/ Daerah	112
Gambar 73. Grafik Perkembangan Jumlah PNS Berdasarkan Nama Jabatan Fungsional Lingkup Pusat Ditjen PKTL	114
Gambar 74. Grafik Perkembangan Jumlah PNS Berdasarkan Nama Jabatan Fungsional Lingkup Daerah Ditjen PKTL.....	114
Gambar 75. Grafik Perkembangan Diklat Perjenjangan PNS Lingkup Daerah Ditjen PKTL.....	116
Gambar 76. Grafik Rekapitulasi Anggaran Pusat lingkup Ditjen PKTL	130
Gambar 77. Grafik Rekapitulasi Anggaran UPT/Daerah Lingkup Ditjen PKTL.....	130
Gambar 78. Grafik Perkembangan Realisasi Keuangan Pusat Lingkup Ditjen PKTL.....	132
Gambar 79. Grafik Perkembangan Realisasi Keuangan UPT/ Daerah Lingkup Ditjen PKTL	132

PENDAHULUAN

DATA DAN INFORMASI

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2023

PENDAHULUAN

A. Sekilas tentang Kawasan Hutan Indonesia

Indonesia merupakan negara terluas ke-14 sekaligus negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sebesar 191.357.868 Ha, serta negara dengan pulau terbanyak ke-6 di dunia, dengan jumlah 17.504 pulau. Indonesia mengalokasikan 125 juta hektare atau sekitar 63 persen dari luas daratannya sebagai kawasan hutan. Sedangkan daratan sisanya berupa non kawasan hutan, yang dikenal sebagai Area Penggunaan Lain (APL). Kawasan hutan dikelola sesuai dengan tiga fungsi, yaitu Hutan Produksi (HP) yang mencakup area seluas 68,8 juta hektare; Hutan Konservasi (HK) yang mencakup luas total 22,1 juta hektare (dengan tambahan 5,3 juta hektare kawasan konservasi laut); dan Hutan Lindung (HL) yang mencakup areal seluas 29,6 juta hektare.

Dianugerahi dengan iklim tropis, Indonesia terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan di antara dua samudra, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Karena letak geografisnya, Indonesia memiliki tingkat keanekaragaman hayati, dan endemisitas yang sangat tinggi, dan memiliki tingkat keanekaragaman hayati yang lebih tinggi daripada negara lain di dunia, kecuali Brasil dan Kolombia. Adapun spesies fauna liar yang terkenal antara lain seperti harimau Sumatra, gajah Sumatra, badak Sumatra dan Jawa, orangutan Kalimantan dan Sumatra, orangutan Tapanuli yang baru ditemukan, anoa (kerbau kerdil), komodo dan burung cendrawasih.

Selama lebih dari lima dekade, sumber daya hutan telah memainkan peran penting dalam memfasilitasi pembangunan ekonomi Indonesia. Pemerintah memperkenalkan sejumlah pendekatan baru untuk meningkatkan kelestarian kawasan hutan, termasuk sistem sertifikasi dan lacak balak untuk memastikan legalitas kayu.

Mulai tahun 2020, pemerintah telah berupaya memperkuat perekonomian nasional, termasuk memfasilitasi investasi dan promosi ekspor berbasis kayu, penataan regulasi, pengenalan inovasi baru, peningkatan dukungan usaha, serta penguatan tata kelola usaha yang baik (*good business governance*) untuk kepastian hukum.

Undang-Undang Cipta Kerja diharapkan menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional, khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat termasuk penyederhanaan perizinan. Sebagai contoh dalam hal Pengaturan Perizinan Berusaha sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan serta regulasi turunannya, memungkinkan para pelaku usaha melakukan pengembangan multiusaha kehutanan. Pengembangan diversifikasi usaha di sektor kehutanan ini, mengintegrasikan pemanfaatan kawasan, hasil hutan kayu, dan hasil hutan bukan kayu.

Disamping itu, pemanfaatan jasa lingkungan dalam model multiusaha kehutanan, dapat menjadi bagian dari aksi mitigasi perubahan iklim dari sektor kehutanan berbasis lahan. Kontribusi pemegang Perizinan Berusaha dalam upaya mitigasi perubahan iklim dapat dilakukan melalui kegiatan yang dapat mengurangi emisi serta meningkatkan serapan karbon dan/atau konservasi cadangan karbon.

B. Tugas dan Fungsi Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Ditjen PKTL) yang merupakan salah satu Unit kerja eselon I dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan turut andil memberi dukungan pelaksanaan pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024. Dukungan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan telah dijabarkan dalam Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020-2024 yakni “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pemantapan Kawasan Hutan dan Penataan Lingkungan yang berkelanjutan”.

Tugas Pokok Ditjen PKTL yaitu “menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemantapan kawasan hutan dan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan”. Untuk melaksanakan tugas tersebut Ditjen PKTL menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- d. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan rencana kawasan hutan, penggunaan kawasan hutan, pembentukan wilayah pengelolaan hutan, inventarisasi dan pemantauan sumber daya hutan, pengukuhan dan penatagunaan kawasan hutan, pencegahan dampak lingkungan kebijakan wilayah dan sektor, serta pencegahan dampak lingkungan usaha dan kegiatan;
- g. pelaksanaan tugas administrasi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Ditjen PKTL didukung oleh 6 (enam) unit kerja Eselon II dan 22 (dua puluh dua) Unit Pelaksana Teknis Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan.

INVENTARISASI DAN PEMANTAUAN SUMBER DAYA HUTAN

DATA DAN INFORMASI

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2023

TABEL I.1. REKALKULASI PENUTUPAN LAHAN INDONESIA TAHUN 2022

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL		
		HUTAN TETAP					HPK						Jumlah	JUMLAH	%
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
1	ACEH														
	A. Hutan	776,6	1.638,9	113,3	372,9	2.901,7	2,0	2.903,8	241,1	3.144,9	55,6				
	- Hutan Primer	631,9	1.269,3	54,7	147,8	2.103,6	0,0	2.103,6	27,4	2.131,0	37,7				
	- Hutan Sekunder	136,9	362,2	49,0	174,4	722,5	1,3	723,8	161,9	885,7	15,7				
	- Hutan Tanaman *	7,8	7,5	9,7	50,8	75,7	0,7	76,4	51,8	128,1	2,3				
	B. Non Hutan	80,2	153,0	29,4	178,7	441,3	11,7	453,0	2.054,7	2.507,8	44,4				
	Total	856,8	1.791,9	142,7	551,6	3.343,0	13,8	3.356,8	2.295,9	5.652,7	100,0				
2	SUMUT														
	A. Hutan	375,1	715,7	318,4	325,4	1.734,5	8,8	1.743,3	167,4	1.910,7	27,0				
	- Hutan Primer	284,9	259,0	34,0	2,4	580,4	0,9	581,3	3,1	584,4	8,3				
	- Hutan Sekunder	90,0	432,8	282,1	190,7	995,5	7,0	1.002,5	149,5	1.152,0	16,3				
	- Hutan Tanaman *	0,2	23,9	2,3	132,3	158,6	0,9	159,5	14,9	174,4	2,5				
	B. Non Hutan	44,1	473,3	308,2	349,4	1.175,0	82,7	1.257,6	3.902,4	5.160,0	73,0				
	Total	419,2	1.188,9	626,6	674,8	2.909,5	91,4	3.000,9	4.069,8	7.070,7	100,0				
3	SUMBAR														
	A. Hutan	669,9	575,9	152,1	261,6	1.659,5	69,3	1.728,8	178,5	1.907,3	45,9				
	- Hutan Primer	373,7	196,8	4,5	8,9	583,9	2,6	586,5	13,5	600,0	14,4				
	- Hutan Sekunder	296,2	378,5	137,2	230,9	1.042,9	62,0	1.104,9	155,0	1.259,8	30,3				
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,6	10,4	21,8	32,7	4,7	37,5	10,0	47,5	1,1				
	B. Non Hutan	95,6	195,3	76,1	94,6	461,6	90,6	552,2	1.697,0	2.249,2	54,1				
	Total	765,6	771,2	228,2	356,2	2.121,1	159,9	2.281,0	1.875,5	4.156,5	100,0				
4	RIAU														
	A. Hutan	469,4	86,2	330,1	1.545,1	2.430,7	62,3	2.493,0	83,9	2.577,0	29,1				
	- Hutan Primer	114,9	19,3	39,7	7,5	181,4	0,6	182,0	2,8	184,8	2,1				
	- Hutan Sekunder	351,3	66,8	258,7	669,2	1.346,1	56,1	1.402,2	66,5	1.468,7	16,6				
	- Hutan Tanaman *	3,1	0,0	31,7	868,4	903,2	5,7	908,9	14,6	923,5	10,4				
	B. Non Hutan	156,4	142,2	676,7	779,7	1.755,0	1.080,9	2.835,9	3.428,5	6.264,4	70,9				
	Total	625,8	228,4	1.006,8	2.324,8	4.185,7	1.143,2	5.328,9	3.512,4	8.841,3	100,0				
5	JAMBI														
	A. Hutan	558,6	134,5	125,6	463,9	1.282,6	0,1	1.282,6	77,5	1.360,1	28,1				
	- Hutan Primer	451,8	90,5	38,7	64,6	645,6	0,0	645,6	23,7	669,4	13,8				
	- Hutan Sekunder	106,8	43,7	77,5	112,4	340,3	0,0	340,4	39,3	379,6	7,8				
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,3	9,4	286,9	296,6	0,1	296,7	14,5	311,2	6,4				
	B. Non Hutan	151,8	46,0	138,8	488,5	825,1	11,0	836,1	2.650,9	3.487,0	71,9				
	Total	710,4	180,6	264,4	952,3	2.107,7	11,1	2.118,8	2.728,4	4.847,1	100,0				

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK		Jumlah	Jumlah	%			
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	8	9						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
6	SUMSEL													
	A. Hutan	389,5	229,9	71,3	785,3	1.475,9	0,0	1.475,9	64,4	1.540,3	17,9			
	- Hutan Primer	291,0	82,2	10,6	6,6	390,4	0,0	390,4	1,7	392,2	4,6			
	- Hutan Sekunder	97,6	147,1	47,3	67,3	359,4	0,0	359,4	44,2	403,6	4,7			
	- Hutan Tanaman *	0,8	0,6	13,4	711,3	726,0	0,0	726,1	18,5	744,5	8,7			
	B. Non Hutan	326,2	337,4	142,9	909,1	1.715,6	144,1	1.859,7	5.206,9	7.066,6	82,1			
	Total	715,7	567,3	214,2	1.694,4	3.191,5	144,1	3.335,6	5.271,3	8.606,9	100,0			
7	KEP. BANGKA BELITUNG													
	A. Hutan	10,2	78,4	0,0	77,3	165,9	0,0	165,9	43,2	209,1	12,6			
	- Hutan Primer	2,7	19,3	0,0	3,9	25,9	0,0	25,9	2,7	28,6	1,7			
	- Hutan Sekunder	7,5	59,1	0,0	73,4	140,0	0,0	140,0	40,6	180,6	10,8			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
	B. Non Hutan	26,0	107,2	0,0	357,4	490,6	0,7	491,3	965,7	1.457,0	87,4			
	Total	36,2	185,6	0,0	434,7	656,5	0,7	657,2	1.009,0	1.666,1	100,0			
8	BENGKULU													
	A. Hutan	391,6	167,0	56,6	11,9	627,1	0,0	627,1	24,2	651,3	32,4			
	- Hutan Primer	340,3	116,4	15,4	2,9	474,9	0,0	474,9	0,4	475,4	23,6			
	- Hutan Sekunder	51,2	50,6	41,2	9,0	152,0	0,0	152,0	23,7	175,8	8,7			
	- Hutan Tanaman *	0,1	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0			
	B. Non Hutan	68,2	91,9	115,7	13,9	289,6	11,7	301,3	1.057,6	1.358,9	67,6			
	Total	459,8	258,9	172,3	25,8	916,7	11,7	928,4	1.081,8	2.010,2	100,0			
9	LAMPUNG													
	A. Hutan	238,3	54,5	10,0	11,9	314,7	0,0	314,7	15,7	330,4	9,8			
	- Hutan Primer	127,5	2,8	0,9	0,0	131,2	0,0	131,2	0,6	131,8	3,9			
	- Hutan Sekunder	110,8	51,7	9,1	0,1	171,7	0,0	171,7	15,1	186,8	5,6			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	11,8	11,8	0,0	11,8	0,0	11,8	0,4			
	B. Non Hutan	173,1	268,2	19,2	157,3	617,8	0,0	617,8	2.412,8	3.030,6	90,2			
	Total	411,3	322,8	29,2	169,3	932,5	0,0	932,5	2.428,5	3.361,0	100,0			
10	KEPRI													
	A. Hutan	1,2	55,2	73,6	47,5	177,4	43,7	221,1	101,5	322,6	39,7			
	- Hutan Primer	0,0	7,3	2,9	3,3	13,5	2,4	15,9	1,1	17,0	2,1			
	- Hutan Sekunder	1,2	47,9	70,7	44,1	163,9	41,3	205,2	100,4	305,6	37,6			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
	B. Non Hutan	3,4	39,9	42,3	27,1	112,6	38,1	150,7	338,8	489,5	60,3			
	Total	4,6	95,1	115,8	74,5	290,1	81,8	371,8	440,3	812,1	100,0			
	PULAU SUMATERA													
	A. Hutan	3.880,3	3.736,1	1.250,8	3.902,7	12.770,0	186,3	12.956,3	997,5	13.953,7	29,7			
	- Hutan Primer	2.618,8	2.062,8	201,3	247,8	5.130,8	6,5	5.137,3	77,1	5.214,4	11,1			
	- Hutan Sekunder	1.249,5	1.640,5	972,7	1.571,6	5.434,3	167,7	5.602,1	796,1	6.398,2	13,6			

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	Jumlah	%				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
16	JATIM													
	A. Hutan	198,5	258,1	0,2	650,9	1.107,6	0,0	1.107,6	153,9	1.261,6	25,9			
	- Hutan Primer	26,7	10,3	0,0	4,5	41,6	0,0	41,6	1,1	42,7	0,9			
	- Hutan Sekunder	162,2	158,2	0,0	55,1	375,4	0,0	375,4	38,2	413,6	8,5			
	- Hutan Tanaman *	9,6	89,6	0,2	591,3	690,7	0,0	690,7	114,6	805,3	16,5			
	B. Non Hutan	37,9	78,9	0,0	157,9	274,8	0,0	274,8	3.333,7	3.608,5	74,1			
	Total	236,4	337,0	0,2	808,9	1.382,4	0,0	1.382,4	3.487,6	4.870,0	100,0			
	PULAU JAWA													
	A. Hutan	437,8	500,1	320,4	1.128,5	2.386,8	0,0	2.386,8	401,9	2.788,7	20,8			
	- Hutan Primer	43,1	18,6	0,5	5,8	68,0	0,0	68,0	1,2	69,2	0,5			
	- Hutan Sekunder	340,0	265,5	61,8	84,6	751,9	0,0	751,9	78,2	830,1	6,2			
	- Hutan Tanaman *	54,7	216,0	258,1	1.038,1	1.566,9	0,0	1.566,9	322,5	1.889,4	14,1			
	B. Non Hutan	94,1	167,2	100,5	313,1	674,8	0,0	674,8	9.916,8	10.591,6	79,2			
	Total	531,9	667,2	420,9	1.441,5	3.061,6	0,0	3.061,6	10.318,7	13.380,3	100,0			
17	KALBAR													
	A. Hutan	1.156,0	1.795,1	1.387,9	798,7	5.137,6	52,5	5.190,1	475,9	5.666,0	38,9			
	- Hutan Primer	964,6	978,8	318,6	15,0	2.277,0	0,6	2.277,6	1,5	2.279,1	15,7			
	- Hutan Sekunder	191,3	816,3	1.062,6	701,6	2.771,9	51,9	2.823,8	471,2	3.295,0	22,6			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	6,6	82,1	88,7	0,0	88,7	3,2	91,9	0,6			
	B. Non Hutan	266,8	489,5	729,4	1.300,3	2.786,1	131,8	2.917,8	5.971,4	8.889,3	61,1			
	Total	1.422,8	2.284,6	2.117,3	2.099,0	7.923,7	184,3	8.108,0	6.447,3	14.555,3	100,0			
18	KALSEL													
	A. Hutan	136,6	357,6	84,3	278,9	857,4	7,2	864,6	78,5	943,1	25,6			
	- Hutan Primer	16,8	38,3	1,8	0,3	57,2	0,0	57,2	1,9	59,0	1,6			
	- Hutan Sekunder	88,0	318,5	78,9	201,5	686,9	6,4	693,3	55,2	748,5	20,3			
	- Hutan Tanaman *	31,8	0,8	3,6	77,1	113,3	0,7	114,1	21,5	135,6	3,7			
	B. Non Hutan	78,8	148,3	40,4	454,8	722,2	112,7	834,9	1.911,8	2.746,7	74,4			
	Total	215,4	505,8	124,7	733,7	1.579,6	119,8	1.699,5	1.990,3	3.689,8	100,0			
19	KALTENG													
	A. Hutan	1.077,6	967,0	2.802,7	1.930,5	6.777,9	406,7	7.184,6	221,0	7.405,6	48,8			
	- Hutan Primer	292,8	441,8	329,3	33,4	1.097,3	1,5	1.098,8	0,9	1.099,6	7,2			
	- Hutan Sekunder	784,8	525,2	2.468,9	1.747,7	5.526,7	400,0	5.926,7	197,1	6.123,8	40,4			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	4,5	149,4	153,9	5,2	159,1	23,1	182,2	1,2			
	B. Non Hutan	523,4	380,8	444,7	1.837,9	3.186,8	1.395,1	4.581,9	3.182,2	7.764,1	51,2			
	Total	1.601,0	1.347,8	3.247,4	3.768,5	9.964,7	1.801,8	11.766,5	3.403,2	15.169,7	100,0			
20	KALTIM													
	A. Hutan	199,3	1.771,5	2.798,1	2.081,4	6.850,3	122,8	6.973,0	933,1	7.906,2	62,4			
	- Hutan Primer	11,8	1.294,0	863,8	88,1	2.257,6	3,0	2.260,6	125,2	2.385,8	18,8			

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	JUMLAH	%				
HK	HL	HPT	HP	Jumlah	8	9					10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	- Hutan Sekunder	187,0	476,5	1.918,4	1.448,8	4.030,8	74,7	4.105,5	773,8	4.879,3	38,5			
	- Hutan Tanaman *	0,5	1,0	15,9	544,5	561,9	45,0	606,9	34,2	641,1	5,1			
B.	Non Hutan	235,3	45,4	181,3	841,0	1.303,0	55,2	1.358,3	3.396,2	4.754,5	37,6			
	Total	434,6	1.817,0	2.979,4	2.922,4	8.153,3	178,0	8.331,3	4.329,4	12.660,7	100,0			
21	KALTARA													
A.	Hutan	1.264,2	998,9	2.022,5	859,0	5.144,6	47,5	5.192,1	606,1	5.798,3	84,5			
	- Hutan Primer	1.201,1	896,1	1.254,2	284,2	3.635,6	0,2	3.635,8	179,7	3.815,5	55,6			
	- Hutan Sekunder	63,1	102,8	765,8	498,8	1.430,6	46,8	1.477,4	421,5	1.898,8	27,7			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	2,5	75,9	78,4	0,5	79,0	4,9	83,9	1,2			
B.	Non Hutan	9,0	13,1	52,9	213,4	288,5	12,0	300,5	762,3	1.062,7	15,5			
	Total	1.273,3	1.012,0	2.075,5	1.072,4	5.433,1	59,5	5.492,6	1.368,4	6.861,0	100,0			
	PULAU KALIMANTAN													
	A. Hutan	3.833,7	5.890,1	9.095,5	5.948,5	24.767,8	636,6	25.404,5	2.314,7	27.719,2	52,4			
	- Hutan Primer	2.487,1	3.649,0	2.767,7	421,0	9.324,8	5,2	9.330,0	309,2	9.639,2	18,2			
	- Hutan Sekunder	1.314,2	2.239,3	6.294,8	4.598,5	14.446,8	579,9	15.026,7	1.918,7	16.945,4	32,0			
	- Hutan Tanaman *	32,3	1,8	33,1	929,1	996,3	51,5	1.047,8	86,8	1.134,6	2,1			
B.	Non Hutan	1.113,3	1.077,1	1.448,8	4.647,4	8.286,6	1.706,8	9.993,3	15.223,9	25.217,3	47,6			
	Total	4.946,9	6.967,3	10.544,3	10.595,9	33.054,4	2.343,4	35.397,8	17.538,6	52.936,4	100,0			
22	SULUT													
	A. Hutan	208,2	112,0	143,6	30,2	494,1	11,3	505,4	47,4	552,7	38,3			
	- Hutan Primer	128,5	61,3	31,2	11,0	232,0	0,0	232,0	5,8	237,8	16,5			
	- Hutan Sekunder	79,7	50,7	112,4	19,2	262,1	11,3	273,4	41,6	314,9	21,8			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-			
B.	Non Hutan	36,3	46,3	66,5	35,8	184,9	3,4	188,3	703,1	891,4	61,7			
	Total	244,5	158,3	210,1	66,0	679,0	14,7	693,7	750,5	1.444,1	100,0			
23	GORONTALO													
	A. Hutan	186,1	178,5	202,9	69,9	637,5	10,8	648,2	60,8	709,0	59,2			
	- Hutan Primer	129,2	76,3	64,4	6,1	276,0	0,5	276,5	1,9	278,4	23,3			
	- Hutan Sekunder	56,9	102,3	126,3	54,9	340,3	8,3	348,7	58,1	406,8	34,0			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	12,2	8,9	21,1	1,9	23,0	0,7	23,8	2,0			
B.	Non Hutan	9,9	24,2	48,7	19,4	102,2	12,5	114,7	373,5	488,2	40,8			
	Total	196,0	202,8	251,6	89,3	739,7	23,2	762,9	434,3	1.197,2	100,0			
24	SULTENG													
	A. Hutan	551,1	1.125,5	1.212,9	317,1	3.206,6	106,1	3.312,7	447,2	3.759,9	62,2			
	- Hutan Primer	323,8	813,1	699,1	159,7	1.995,6	46,8	2.042,4	129,8	2.172,2	35,9			
	- Hutan Sekunder	227,4	312,1	506,7	157,4	1.203,5	59,3	1.262,8	315,8	1.578,6	26,1			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,3	7,2	0,0	7,5	0,0	7,5	1,7	9,2	0,2			
B.	Non Hutan	88,2	125,8	215,6	108,0	537,7	50,1	587,8	1.697,8	2.285,6	37,8			
	Total	639,3	1.251,3	1.428,5	425,1	3.744,3	156,2	3.900,5	2.145,0	6.045,5	100,0			

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN											APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	Jumlah	Jumlah	%				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
25	SULTRA														
	A. Hutan	221,2	946,4	358,8	214,9	1.741,3	22,0	1.763,3	120,7	1.884,0	52,0				
	- Hutan Primer	15,0	710,9	208,2	52,4	986,6	9,6	996,2	10,2	1.006,4	27,8				
	- Hutan Sekunder	206,2	235,4	150,6	161,9	754,1	12,4	766,5	110,3	876,8	24,2				
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,6	0,6	0,0	0,6	0,2	0,8	0,0				
	B. Non Hutan	72,2	130,8	91,0	197,8	491,8	44,2	536,0	1.202,9	1.738,9	48,0				
	Total	293,4	1.077,2	449,9	412,7	2.233,1	66,2	2.299,3	1.323,6	3.622,9	100,0				
26	SULBAR														
	A. Hutan	178,8	317,7	238,2	41,2	775,9	5,8	781,7	30,0	811,7	49,2				
	- Hutan Primer	111,9	126,3	74,2	9,5	321,9	0,2	322,1	0,5	322,6	19,5				
	- Hutan Sekunder	66,8	191,4	164,0	31,7	454,0	5,6	459,6	29,5	489,1	29,6				
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-				
	B. Non Hutan	10,7	132,5	91,7	29,5	264,4	14,8	279,2	560,3	839,4	50,8				
	Total	189,5	450,2	330,0	70,7	1.040,3	20,6	1.060,9	590,3	1.651,2	100,0				
27	SULSEL														
	A. Hutan	152,3	832,9	318,4	64,8	1.368,4	11,4	1.379,8	131,4	1.511,2	33,9				
	- Hutan Primer	88,9	447,6	157,5	4,2	698,2	5,9	704,0	16,8	720,9	16,2				
	- Hutan Sekunder	63,0	383,8	155,3	59,0	661,2	5,6	666,8	113,4	780,2	17,5				
	- Hutan Tanaman *	0,3	1,5	5,6	1,6	9,0	0,0	9,0	1,2	10,2	0,2				
	B. Non Hutan	35,7	286,2	151,3	70,9	544,0	3,4	547,4	2.398,9	2.946,3	66,1				
	Total	188,0	1.119,0	469,7	135,7	1.912,4	14,8	1.927,2	2.530,3	4.457,5	100,0				
	PULAU SULAWESI														
	A. Hutan	1.497,7	3.513,0	2.474,9	738,1	8.223,7	167,4	8.391,1	837,4	9.228,6	50,1				
	- Hutan Primer	797,4	2.235,5	1.234,5	242,9	4.510,3	63,0	4.573,3	165,0	4.738,3	25,7				
	- Hutan Sekunder	700,0	1.275,7	1.215,4	484,2	3.675,2	102,5	3.777,7	668,6	4.446,3	24,1				
	- Hutan Tanaman *	0,3	1,8	25,0	11,1	38,2	1,9	40,2	3,8	44,0	0,2				
	B. Non Hutan	253,0	745,8	664,9	461,4	2.125,0	128,3	2.253,3	6.936,5	9.189,8	49,9				
	Total	1.750,7	4.258,7	3.139,8	1.199,5	10.348,8	295,7	10.644,5	7.773,9	18.418,4	100,0				
28	BALI														
	A. Hutan	18,0	69,3	3,8	0,2	91,5	0,0	91,5	4,4	95,9	16,9				
	- Hutan Primer	2,6	36,0	0,0	0,0	38,6	0,0	38,6	0,0	38,6	6,8				
	- Hutan Sekunder	13,6	30,5	1,2	0,1	45,3	0,0	45,3	2,3	47,6	8,4				
	- Hutan Tanaman *	1,9	2,9	2,6	0,2	7,5	0,0	7,5	2,1	9,6	1,7				
	B. Non Hutan	2,9	29,2	3,2	1,8	37,0	0,0	37,0	433,9	471,0	83,1				
	Total	20,9	98,5	7,0	2,0	128,5	0,0	128,5	438,3	566,8	100,0				
29	NTB														
	A. Hutan	81,6	386,0	224,9	79,4	771,9	0,0	771,9	112,4	884,3	44,2				
	- Hutan Primer	40,5	192,4	70,4	8,0	311,2	0,0	311,2	1,6	312,9	15,6				

NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah	JUMLAH	%				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
	- Hutan Sekunder	41.0	192.2	154.1	68.9	456.2	0.0	456.2	107.2	563.4	28.1			
	- Hutan Tanaman *	0.1	1.5	0.5	2.4	4.5	0.0	4.5	3.6	8.1	0.4			
	B. Non Hutan	93.2	61.9	74.2	73.5	302.8	0.0	302.8	815.0	1.117.9	55.8			
	Total	174.8	447.9	299.1	152.9	1.074.7	0.0	1.074.7	927.5	2.002.2	100.0			
30	NTT													
	A. Hutan	166.7	419.4	97.6	175.4	859.1	20.8	879.9	830.1	1.710.0	36.1			
	- Hutan Primer	108.4	152.7	18.8	63.0	342.9	3.8	346.7	174.8	521.5	11.0			
	- Hutan Sekunder	57.3	265.0	76.9	110.5	509.7	17.0	526.6	653.1	1.179.7	24.9			
	- Hutan Tanaman *	1.0	1.7	2.0	1.9	6.6	0.0	6.6	2.2	8.8	0.2			
	B. Non Hutan	98.3	267.8	75.2	118.0	559.3	62.2	621.6	2.399.6	3.021.1	63.9			
	Total	264.9	687.2	172.9	293.4	1.418.5	83.0	1.501.5	3.229.6	4.731.1	100.0			
	PULAU BALI NUSA													
	A. Hutan	266.3	874.8	326.4	255.0	1.722.5	20.8	1.743.3	946.9	2.690.2	36.9			
	- Hutan Primer	151.5	381.0	89.1	71.0	692.7	3.8	696.5	176.4	872.9	12.0			
	- Hutan Sekunder	111.8	487.7	232.2	179.5	1.011.2	17.0	1.028.2	762.6	1.790.7	24.5			
	- Hutan Tanaman *	3.0	6.1	5.0	4.5	18.6	0.0	18.6	7.9	26.5	0.4			
	B. Non Hutan	194.3	358.9	152.6	193.4	899.2	62.2	961.4	3.648.5	4.610.0	63.1			
	Total	460.6	1.233.7	479.0	448.4	2.621.7	83.0	2.704.7	4.595.4	7.300.1	100.0			
31	MALUKU													
	A. Hutan	377.8	522.8	763.7	433.0	2.097.4	834.1	2.931.5	165.3	3.096.8	66.9			
	- Hutan Primer	74.9	39.6	31.3	61.9	207.7	142.9	350.6	12.7	363.2	7.8			
	- Hutan Sekunder	302.9	483.3	732.4	371.1	1.889.7	691.2	2.581.0	152.6	2.733.6	59.1			
	- Hutan Tanaman *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-			
	B. Non Hutan	45.4	106.1	129.5	213.6	494.7	488.5	983.1	549.1	1.532.2	33.1			
	Total	423.2	629.0	893.2	646.7	2.592.1	1.322.6	3.914.7	714.3	4.629.0	100.0			
32	MALUT													
	A. Hutan	205.7	491.0	567.7	370.4	1.634.9	289.0	1.923.9	114.8	2.038.7	65.0			
	- Hutan Primer	62.8	141.8	103.0	15.6	323.1	14.7	337.8	16.8	354.6	11.3			
	- Hutan Sekunder	143.0	349.0	460.8	322.8	1.275.6	272.7	1.548.3	98.0	1.646.3	52.5			
	- Hutan Tanaman *	0.0	0.2	3.9	32.1	36.2	1.6	37.9	0.0	37.9	1.2			
	B. Non Hutan	13.1	78.0	111.5	110.9	313.5	254.6	568.1	531.6	1.099.7	35.0			
	Total	218.8	569.0	679.2	481.3	1.948.3	543.7	2.492.0	646.4	3.138.4	100.0			
	PULAU MALUKU													
	A. Hutan	583.5	1.013.9	1.331.4	803.4	3.732.3	1.123.2	4.855.5	280.1	5.135.6	66.1			
	- Hutan Primer	137.7	181.4	134.3	77.5	530.8	157.6	688.3	29.5	717.8	9.2			
	- Hutan Sekunder	445.9	832.3	1.193.3	693.9	3.165.3	964.0	4.129.3	250.6	4.379.8	56.4			
	- Hutan Tanaman *	0.0	0.2	3.9	32.1	36.2	1.6	37.9	0.0	37.9	0.5			
	B. Non Hutan	58.5	184.1	241.0	324.5	808.1	743.1	1.551.2	1.080.7	2.631.9	33.9			
	Total	642.0	1.198.0	1.572.4	1.128.0	4.540.4	1.866.2	6.406.6	1.360.8	7.767.4	100.0			

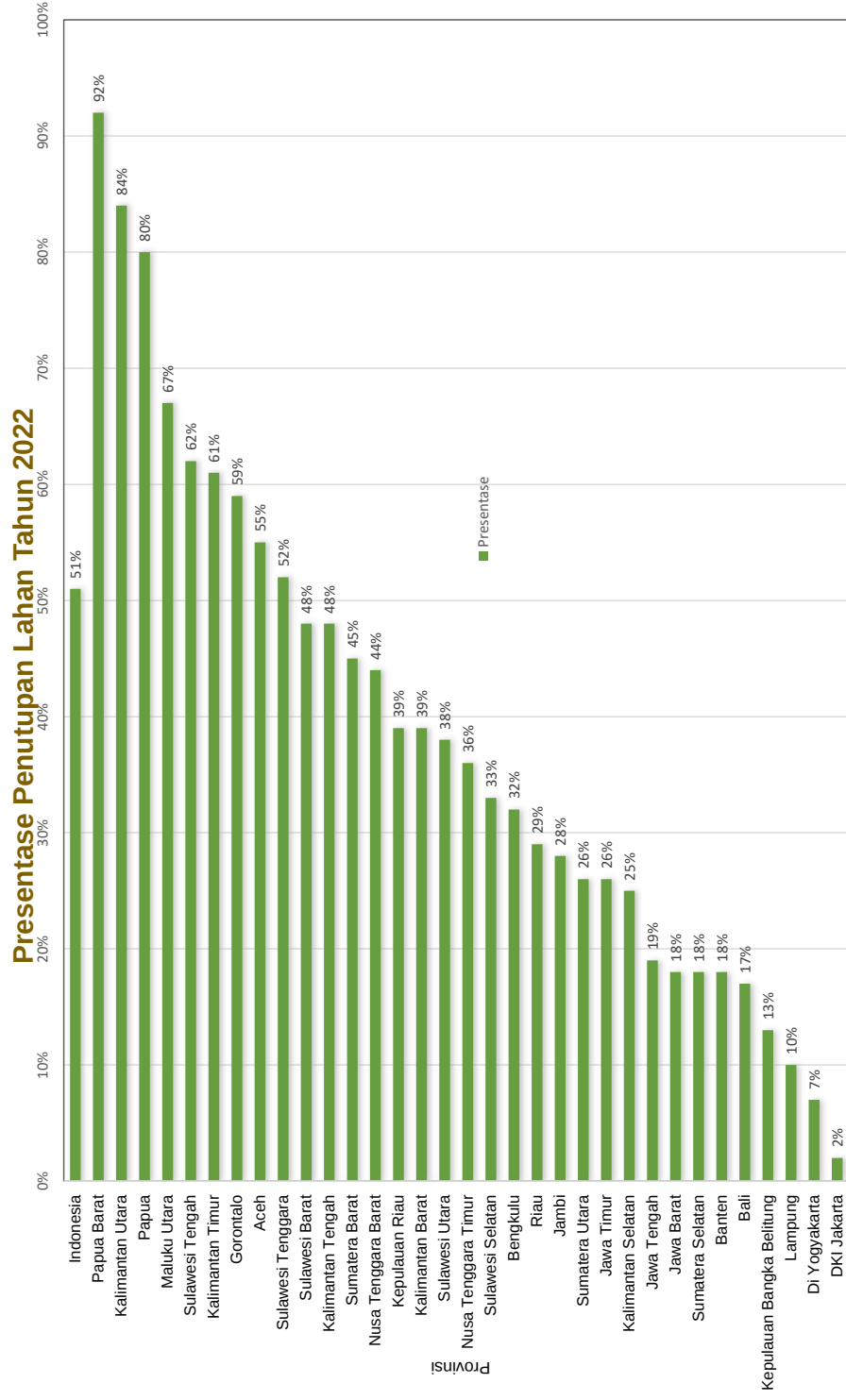
NO.	PENUTUPAN LAHAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL	
		HUTAN TETAP					HPK		Jumlah	JUMLAH	%			
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
33	PAPUA													
	A. Hutan	5.379,4	6.898,0	5.258,0	4.221,4	21.756,7	2.325,7	24.082,4	1.239,5	25.321,9	81,8			
	- Hutan Primer	4.607,4	6.062,3	4.002,0	2.613,6	17.285,4	1.407,9	18.693,3	650,3	19.343,6	62,5			
	- Hutan Sekunder	771,9	835,7	1.256,0	1.598,2	4.461,7	917,1	5.378,8	589,2	5.968,0	19,3			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	9,5	9,5	0,7	10,2	0,1	10,3	0,0			
	B. Non Hutan	1.345,3	779,7	702,7	668,9	3.496,6	1.253,2	4.749,8	884,9	5.634,7	18,2			
	Total	6.724,6	7.677,7	5.960,7	4.890,2	25.253,3	3.578,9	28.832,1	2.124,4	30.956,5	100,0			
34	PAPUA BARAT													
	A. Hutan	1.689,2	1.566,7	1.795,4	2.131,5	7.182,8	1.290,3	8.473,0	658,6	9.131,6	93,1			
	- Hutan Primer	1.503,8	1.279,5	1.269,2	1.073,4	5.125,8	696,4	5.822,2	229,9	6.052,1	61,7			
	- Hutan Sekunder	185,5	287,2	526,2	1.057,5	2.056,3	593,8	2.650,1	428,6	3.078,8	31,4			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	0,7	0,7	0,0	0,7	0,0	0,7	0,0			
	B. Non Hutan	31,6	88,3	47,0	95,2	262,0	100,4	362,4	309,8	672,2	6,9			
	Total	1.720,8	1.654,9	1.842,3	2.226,7	7.444,7	1.390,7	8.835,4	968,3	9.803,8	100,0			
	PULAU PAPUA													
	A. Hutan	7.068,6	8.464,6	7.053,3	6.352,9	28.939,4	3.615,9	32.555,4	1.898,1	34.453,4	84,5			
	- Hutan Primer	6.111,2	7.341,8	5.271,2	3.687,0	22.411,2	2.104,3	24.515,5	880,2	25.395,7	62,3			
	- Hutan Sekunder	957,4	1.122,9	1.782,1	2.655,7	6.518,1	1.510,9	8.029,0	1.017,8	9.046,7	22,2			
	- Hutan Tanaman *	0,0	0,0	0,0	10,2	10,2	0,8	10,9	0,1	11,0	0,0			
	B. Non Hutan	1.376,9	868,0	749,7	764,0	3.758,6	1.353,6	5.112,2	1.194,7	6.306,8	15,5			
	Total	8.445,4	9.332,6	7.803,0	7.116,9	32.698,0	4.969,5	37.667,6	3.092,7	40.760,3	100,0			
	INDONESIA													
	A. Hutan	17.567,9	23.992,7	21.852,8	19.129,2	82.542,6	5.750,2	88.292,8	7.676,6	95.969,4	51,2			
	- Hutan Primer	12.346,8	15.870,0	9.698,7	4.753,1	42.668,5	2.340,4	45.008,9	1.638,6	46.647,5	24,9			
	- Hutan Sekunder	5.118,8	7.863,8	11.752,3	10.267,9	35.002,8	3.342,0	38.344,8	5.492,6	43.837,4	23,4			
	- Hutan Tanaman *	102,4	258,8	401,9	4.108,2	4.871,3	67,9	4.939,2	545,4	5.484,5	2,9			
	B. Non Hutan	4.215,0	5.255,5	4.906,7	10.059,4	24.436,5	5.465,4	29.901,9	61.716,4	91.618,3	48,8			
	Total	21.782,9	29.248,1	26.759,5	29.188,6	106.979,1	11.215,6	118.194,7	69.393,0	187.587,6	100,0			

Ket : Tubuh air (danau, sungai besar, laut (kawasan konservasi perairan) tidak termasuk dalam penghitungan.

* : Hutan tanaman merupakan hutan hasil penanaman baik di dalam dan di luar konsesi Hutan Tanaman Industri

Luas penutupan lahan ini berdasarkan data digital hasil penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2022

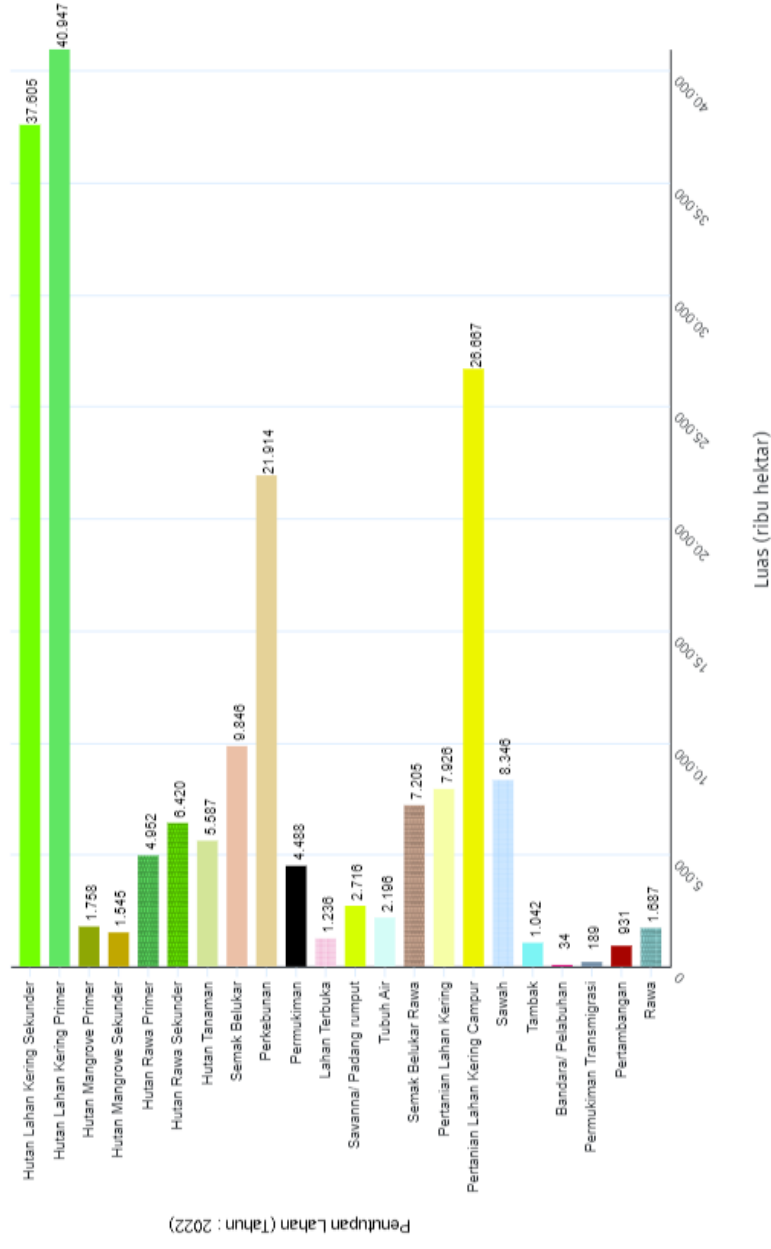
Sumber: - Hasil Penafsiran citra Landsat 8 OLI liputan tahun 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan
- Data digital Perkembangan Kawasan Hutan per September 2022, Direktorat Pengkukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Data s.d. 31 Oktober 2023



Sumber: Direktorat Inventarisasi dan pemantauan Sumber Daya Hutan (<https://infris.menlhk.go.id/>)

Gambar.1. Presentase Penutupan Lahan Tahun 2022

Penutupan Lahan Tahun 2022



Sumber: Direktorat Inventarisasi dan pemantauan Sumber Daya Hutan (<https://infms.menlhk.go.id/>)

Gambar.2. Grafik Luas Penutupan Lahan Tahun 2022

TABEL I.2. TABEL ANGKA DEFORESTASI NETTO DI DALAM DAN DI LUAR KAWASAN HUTAN TAHUN 2021 - 2022 (Ha)

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					Jumlah						
		HPK	HP	Jumlah	HPK	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
1	ACEH												
	A. Hutan Primer	234,5	440,6	67,2	234,9	977,3	-	977,3	265,1	1.242,3			
	- Hutan lahan kering primer	65,1	440,6	67,2	234,9	807,8	-	807,8	193,2	1.001,0			
	- Hutan rawa primer	169,5	-	-	-	169,5	-	169,5	71,9	241,4			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	114,5	668,7	285,3	743,3	1.811,8	24,9	1.836,7	2.262,1	4.098,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	49,4	668,7	285,3	699,0	1.702,4	24,9	1.727,3	1.924,9	3.652,2			
	- Hutan rawa sekunder	65,1	-	-	-	65,1	-	65,1	337,2	402,3			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	44,3	44,3	-	44,3	-	44,3			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	20,5	20,5	-	20,5	5,4	25,9			
	TOTAL	349,1	1.109,4	352,5	998,6	2.809,6	24,9	2.834,5	2.532,6	5.367,1			
2	SUMATERA UTARA												
	A. Hutan Primer	112,6	144,2	3,9	0,9	261,6	-	261,6	0,0	261,6			
	- Hutan lahan kering primer	112,6	144,2	3,9	0,9	261,6	-	261,6	0,0	261,6			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	164,3	1.284,7	752,5	685,2	2.886,6	111,3	2.997,9	2.339,4	5.337,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	83,6	1.101,2	711,9	307,9	2.204,6	104,2	2.308,8	1.841,1	4.149,9			
	- Hutan rawa sekunder	-	1,2	20,7	5,7	27,5	7,0	34,6	120,7	155,3			
	- Hutan mangrove sekunder	80,7	182,3	19,9	371,6	654,5	-	654,5	377,5	1.032,0			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	276,9	1.428,9	756,3	686,1	3.148,2	111,3	3.259,5	2.339,4	5.598,8			
3	RIAU												
	A. Hutan Primer	11,4	10,5	276,6	-	298,5	-	298,5	-	298,5			
	- Hutan lahan kering primer	11,4	10,5	276,6	-	298,5	-	298,5	-	298,5			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	1.462,1	1.126,9	2.187,6	3.424,5	8.201,2	530,9	8.732,1	1.431,2	10.163,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	1.182,0	1.106,4	985,5	452,6	3.726,5	112,0	3.838,5	261,6	4.100,0			
	- Hutan rawa sekunder	280,1	20,5	911,9	2.940,2	4.152,7	350,1	4.502,8	1.042,0	5.544,8			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	290,2	31,7	322,0	68,8	390,8	127,6	518,4			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	(58,3)	(1.074,6)	(1.132,9)	-	(1.132,9)	(74,0)	(1.206,9)			
	TOTAL	1.473,5	1.137,5	2.405,9	2.349,9	7.366,8	530,9	7.897,7	1.357,1	9.254,8			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
4	SUMATERA BARAT												
	A. Hutan Primer	958,0	974,1	16,5	12,2	1.960,8	-	1.960,8	54,1	2.014,9			
	- Hutan lahan kering primer	958,0	974,1	16,5	0,4	1.949,0	-	1.949,0	54,1	2.003,1			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	11,8	11,8	-	11,8	-	11,8			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	757,5	1.249,4	320,8	374,2	2.701,9	198,7	2.900,6	902,0	3.802,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	757,5	1.231,9	320,8	352,9	2.663,0	96,7	2.759,7	875,0	3.634,7			
	- Hutan rawa sekunder	-	17,6	-	21,3	38,9	102,0	140,9	21,2	162,1			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	5,8	5,8			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
-	TOTAL	1.715,5	2.223,5	337,3	386,3	4.662,7	198,7	4.861,4	956,1	5.817,5			
5	JAMBI												
	A. Hutan Primer	1.520,9	119,6	80,7	153,6	1.874,7	-	1.874,7	83,7	1.958,4			
	- Hutan lahan kering primer	1.520,9	119,6	80,7	153,6	1.874,7	-	1.874,7	83,7	1.958,4			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	1.615,7	33,0	750,9	820,2	3.219,9	-	3.219,9	288,7	3.508,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	1.615,7	33,0	750,9	529,0	2.928,6	-	2.928,6	284,4	3.213,1			
	- Hutan rawa sekunder	-	0,0	-	291,3	291,3	-	291,3	4,2	295,5			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	3.136,6	152,6	831,6	973,9	5.094,6	-	5.094,6	372,3	5.467,0			
6	SUMATERA SELATAN												
	A. Hutan Primer	35,2	113,0	-	-	148,2	-	148,2	45,0	193,2			
	- Hutan lahan kering primer	26,0	113,0	-	-	138,9	-	138,9	-	138,9			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	9,3	-	-	-	9,3	-	9,3	45,0	54,3			
	B. Hutan Sekunder	101,1	1.681,1	230,5	44,1	2.056,8	-	2.056,8	497,5	2.554,3			
	- Hutan lahan kering sekunder	101,1	549,6	207,9	10,7	869,3	-	869,3	165,8	1.035,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	11,0	22,6	31,8	65,4	-	65,4	46,3	111,8			
	- Hutan mangrove sekunder	-	1.120,6	-	1,5	1.122,1	-	1.122,1	285,4	1.407,4			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(2.341,6)	(2.341,6)	-	(2.341,6)	(2,0)	(2.343,6)			
	TOTAL	136,3	1.794,1	230,5	(2.297,5)	(136,6)	-	(136,6)	540,5	403,9			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
7	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG												
	A. Hutan Primer	-	12,9	-	34,0	46,9	-	46,9	2,5	49,4			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	12,9	-	34,0	46,9	-	46,9	2,5	49,4			
	B. Hutan Sekunder	12,6	327,6	-	1.296,7	1.636,9	-	1.636,9	528,7	2.165,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	12,6	47,7	-	651,1	711,4	-	711,4	301,9	1.013,3			
	- Hutan rawa sekunder	-	160,0	-	622,4	782,3	-	782,3	136,7	919,0			
	- Hutan mangrove sekunder	-	119,9	-	23,3	143,2	-	143,2	90,1	233,3			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	12,6	340,5	-	1.330,7	1.683,8	-	1.683,8	531,3	2.215,0			
8	BENGKULU												
	A. Hutan Primer	241,7	352,4	31,1	-	625,2	-	625,2	0,4	625,6			
	- Hutan lahan kering primer	241,7	352,4	31,1	-	625,2	-	625,2	0,4	625,6			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	272,4	614,3	2.140,8	770,7	3.798,1	9,0	3.807,1	329,7	4.136,8			
	- Hutan lahan kering sekunder	272,4	614,3	2.140,8	770,7	3.798,1	9,0	3.807,1	329,7	4.136,8			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	514,1	966,6	2.171,9	770,7	4.423,3	9,0	4.432,3	330,0	4.762,4			
9	LAMPUNG												
	A. Hutan Primer	136,7	14,9	7,9	-	159,5	-	159,5	-	159,5			
	- Hutan lahan kering primer	136,7	14,9	7,9	-	159,5	-	159,5	-	159,5			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	28,7	341,9	27,5	-	398,1	-	398,1	66,1	464,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	28,7	341,9	27,5	-	398,1	-	398,1	33,2	431,3			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	32,9	32,9			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	165,4	356,8	35,4	-	557,6	-	557,6	66,1	623,7			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
13	JAWA BARAT												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	-	5,2	-	5,2	-	5,2	-	5,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	5,2	-	5,2	-	5,2	-	5,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	23,9	73,3	97,1	-	97,1	127,9	225,0			
	TOTAL	-	-	29,0	73,3	102,3	-	102,3	127,9	230,1			
14	JAWA TENGAH												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	6,2	74,2	92,1	24,4	196,8	-	196,8	(585,1)	(388,3)			
	- Hutan lahan kering sekunder	6,2	74,2	92,1	6,0	178,5	-	178,5	44,9	223,4			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	18,3	18,3	-	18,3	(630,0)	(611,7)			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	3,2	9,8	13,0	-	13,0	0,0	13,0			
	TOTAL	6,2	74,2	95,3	34,2	209,9	-	209,9	(585,1)	(375,2)			
15	D.I. YOGYAKARTA												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	12,9	-	-	-	12,9	-	12,9	-	12,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	12,9	-	-	-	12,9	-	12,9	-	12,9			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	12,9	-	-	-	12,9	-	12,9	-	12,9			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK		Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
16	JAWA TIMUR												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	19,4	-	-	19,4	-	19,4	50,4	69,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	19,4	-	-	19,4	-	19,4	50,4	69,9			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	-	19,4	-	-	19,4	-	19,4	50,4	69,9			
17	KALIMANTAN BARAT												
	A. Hutan Primer	16,0	99,0	668,6	8,7	792,3	-	792,3	-	792,3			
	- Hutan lahan kering primer	16,0	99,0	668,6	8,7	792,3	-	792,3	-	792,3			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	68,4	702,7	2.119,8	2.957,0	5.847,9	138,8	5.986,7	2.723,4	8.710,1			
	- Hutan lahan kering sekunder	52,4	625,7	2.098,3	728,6	3.505,0	10,9	3.515,8	1.383,3	4.899,1			
	- Hutan rawa sekunder	16,0	21,8	11,4	2.222,6	2.271,8	127,9	2.399,8	1.238,8	3.638,5			
	- Hutan mangrove sekunder	-	55,2	10,1	5,8	71,1	-	71,1	101,3	172,5			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	(120,1)	(1.530,1)	(1.650,1)	-	(1.650,1)	(6,6)	(1.656,7)			
	TOTAL	84,4	801,8	2.668,3	1.435,7	4.990,1	138,8	5.128,9	2.716,8	7.845,7			
18	KALIMANTAN SELATAN												
	A. Hutan Primer	-	3,0	-	-	3,0	-	3,0	-	3,0			
	- Hutan lahan kering primer	-	3,0	-	-	3,0	-	3,0	-	3,0			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	288,3	159,9	351,5	799,6	17,5	817,0	98,8	915,8			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	288,3	159,9	351,5	799,6	17,5	817,0	86,1	903,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	12,6	12,6			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(183,6)	(183,6)	-	(183,6)	(600,3)	(783,9)			
	TOTAL	-	291,2	159,9	167,8	618,9	17,5	636,4	(501,5)	134,9			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN											APL	TOTAL
		HUTAN TETAP												
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah		HPK	Jumlah					
						7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11				
19	KALIMANTAN TENGAH													
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	7,2	95,5	1.196,3	11.172,6	12.471,7	2.167,0	14.638,7	1.726,2	16.364,9				
	- Hutan lahan kering sekunder	-	95,5	1.196,3	9.003,1	10.295,0	813,9	11.108,9	888,8	11.997,7				
	- Hutan rawa sekunder	7,2	-	-	2.169,5	2.176,7	1.344,0	3.520,7	837,4	4.358,1				
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	9,1	9,1	-	9,1				
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(4.800,5)	(4.800,5)	-	(4.800,5)	-	(4.800,5)				
	TOTAL	7,2	95,5	1.196,3	6.372,1	7.671,2	2.167,0	9.838,2	1.726,2	11.564,4				
20	KALIMANTAN TIMUR													
	A. Hutan Primer	-	22,0	16,1	-	38,1	-	38,1	12,3	50,4				
	- Hutan lahan kering primer	-	22,0	16,1	-	38,1	-	38,1	12,3	50,4				
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	B. Hutan Sekunder	59,2	148,3	888,5	4.088,9	5.184,9	269,3	5.454,2	4.739,4	10.193,7				
	- Hutan lahan kering sekunder	5,6	148,3	888,5	3.909,1	4.951,5	269,3	5.220,8	4.507,1	9.727,9				
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	138,7	138,7				
	- Hutan mangrove sekunder	53,6	-	-	179,8	233,4	-	233,4	93,7	327,0				
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(1.523,5)	(1.523,5)	727,4	(796,0)	42,6	(753,5)				
	TOTAL	59,2	170,3	904,6	2.565,5	3.699,6	996,7	4.696,3	4.794,3	9.490,6				
21	KALIMANTAN UTARA													
	A. Hutan Primer	6,6	-	103,8	5,4	115,8	-	115,8	59,5	175,3				
	- Hutan lahan kering primer	6,6	-	103,8	-	110,4	-	110,4	53,4	163,7				
	- Hutan rawa primer	-	-	-	5,4	5,4	-	5,4	-	5,4				
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	6,1	6,1				
	B. Hutan Sekunder	1,6	28,0	349,0	325,3	703,9	78,7	782,6	3.331,0	4.113,6				
	- Hutan lahan kering sekunder	1,6	28,0	349,0	257,8	636,4	67,8	704,2	349,5	1.053,7				
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	4,9	4,9	-	4,9	2.960,4	2.965,3				
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	62,6	62,6	10,9	73,5	21,1	94,6				
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(20,6)	(20,6)	-	(20,6)	-	(20,6)				
	TOTAL	8,1	28,0	452,9	310,2	799,1	78,7	877,8	3.390,4	4.268,3				

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
22	SULAWESI UTARA												
	A. Hutan Primer	11,2	11,2	23,0	11,6	57,1	-	57,1	6,0	63,1			
	- Hutan lahan kering primer	11,2	11,2	23,0	11,6	57,1	-	57,1	6,0	63,1			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	2,7	4,8	219,6	2,9	230,1	8,0	238,1	83,4	321,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	2,7	4,8	219,6	2,9	230,1	8,0	238,1	83,4	321,5			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	13,9	16,1	242,6	14,6	287,2	8,0	295,2	89,4	384,6			
22	GORONTALO												
	A. Hutan Primer	13,8	-	18,1	-	32,0	-	32,0	-	32,0			
	- Hutan lahan kering primer	13,8	-	18,1	-	32,0	-	32,0	-	32,0			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	4,9	24,2	178,6	11,2	218,8	3,6	222,4	83,2	305,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	4,9	7,8	178,6	11,2	202,5	3,6	206,0	45,5	251,6			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	16,4	-	-	16,4	-	16,4	37,7	54,1			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	18,7	24,2	196,7	11,2	250,8	3,6	254,3	83,2	337,6			
24	SULAWESI TENGAH												
	A. Hutan Primer	1,4	66,3	487,1	59,2	614,0	88,5	702,4	104,3	806,7			
	- Hutan lahan kering primer	1,4	66,3	487,1	59,2	614,0	88,5	702,4	104,3	806,7			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	94,2	288,1	922,7	532,3	1.837,4	944,7	2.782,1	2.165,8	4.947,9			
	- Hutan lahan kering sekunder	94,2	288,1	922,7	532,3	1.837,4	944,7	2.782,1	2.164,4	4.946,5			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	5,9	-	5,9	-	5,9	-	5,9			
	TOTAL	95,6	354,4	1.415,8	591,5	2.457,2	1.033,2	3.490,4	2.270,1	5.760,5			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
25	SULAWESI TENGGARA												
	A. Hutan Primer	-	34,0	33,1	3,8	70,9	-	70,9	6,0	77,0			
	- Hutan lahan kering primer	-	34,0	33,1	3,8	70,9	-	70,9	6,0	77,0			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	48,4	1.744,7	644,1	185,4	2.622,6	7,2	2.629,8	910,6	3.540,4			
	- Hutan lahan kering sekunder	48,4	80,4	644,1	175,8	948,7	7,2	955,9	442,2	1.398,1			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	9,6	9,6	-	9,6	-	9,6			
	- Hutan mangrove sekunder	-	1.664,3	-	-	1.664,3	-	1.664,3	468,4	2.132,7			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	48,4	1.778,7	677,2	189,2	2.693,6	7,2	2.700,7	916,6	3.617,4			
26	SULAWESI BARAT												
	A. Hutan Primer	-	2,5	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5			
	- Hutan lahan kering primer	-	2,5	-	-	2,5	-	2,5	-	2,5			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	60,4	123,2	130,8	314,4	12,9	327,3	75,9	403,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	60,4	123,2	130,8	314,4	12,9	327,3	75,9	403,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	-	62,9	123,2	130,8	316,9	12,9	329,8	75,9	405,7			
27	SULAWESI SELATAN												
	A. Hutan Primer	12,1	80,5	38,1	-	130,7	-	130,7	-	130,7			
	- Hutan lahan kering primer	12,1	80,5	38,1	-	130,7	-	130,7	-	130,7			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	4,8	378,0	249,2	78,2	710,1	-	710,1	239,3	949,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	4,8	378,0	249,2	78,2	710,1	-	710,1	239,3	949,5			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	16,9	458,5	287,3	78,2	840,9	-	840,9	239,3	1.080,2			

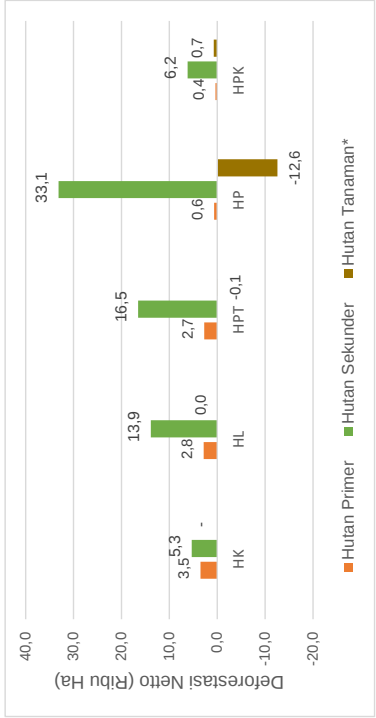
NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP						HPK	Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
28	BALI												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	-	51,2	-	-	51,2	-	51,2	2,0	53,2			
	- Hutan lahan kering sekunder	-	51,2	-	-	51,2	-	51,2	-	51,2			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	2,0	2,0			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	-	51,2	-	-	51,2	-	51,2	2,0	53,2			
29	NUSA TENGGARA BARAT												
	A. Hutan Primer	-	67,5	23,0	8,6	99,0	-	99,0	-	99,0			
	- Hutan lahan kering primer	-	67,5	23,0	8,6	99,0	-	99,0	-	99,0			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	B. Hutan Sekunder	354,8	1.520,0	1.542,0	1.285,8	4.702,6	-	4.702,6	1.566,5	6.269,1			
	- Hutan lahan kering sekunder	354,8	1.520,0	1.530,9	1.285,8	4.691,6	-	4.691,6	1.507,6	6.199,1			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	11,0	-	11,0	-	11,0	58,9	70,0			
	C. Hutan Tanaman*	-	6,4	8,6	13,9	28,8	-	28,8	14,3	43,0			
	TOTAL	354,8	1.593,8	1.573,5	1.308,2	4.830,4	-	4.830,4	1.580,8	6.411,1			
30	NUSA TENGGARA TIMUR												
	A. Hutan Primer	37,2	197,3	55,3	88,1	377,9	-	377,9	223,3	601,3			
	- Hutan lahan kering primer	36,5	197,3	55,3	88,1	377,2	-	377,2	197,4	574,6			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	0,7	-	-	-	0,7	-	0,7	26,0	26,7			
	B. Hutan Sekunder	23,8	716,1	189,1	349,0	1.278,0	-	1.278,0	2.065,4	3.343,4			
	- Hutan lahan kering sekunder	23,8	716,1	189,1	349,0	1.278,0	-	1.278,0	2.041,9	3.320,0			
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	23,5	23,5			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	TOTAL	61,1	913,4	244,4	437,1	1.656,0	-	1.656,0	2.288,8	3.944,7			

NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK	Jumlah					
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
31	MALUKU UTARA												
	A. Hutan Primer	14,8	39,7	56,6									
	- Hutan lahan kering primer	14,8	39,7	56,6									
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	20,2	127,3	283,8	894,9	1.326,1	880,5	2.206,6	342,5	116,7	116,7		
	- Hutan lahan kering sekunder	20,2	127,3	283,8	894,9	1.326,1	880,5	2.206,6	342,5	112,2	112,2		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	35,0	167,0	340,4	896,0	1.438,3	880,5	2.318,8	346,9	2.665,7	2.665,7		
32	MALUKU												
	A. Hutan Primer	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	1,9	1,9		
	- Hutan lahan kering primer	-	-	-	-	-	1,9	1,9	-	1,9	1,9		
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	-	174,1	98,4	990,3	1.262,9	147,9	1.410,8	50,5	1.461,3	1.461,3		
	- Hutan lahan kering sekunder	-	174,1	98,4	980,2	1.252,8	133,3	1.386,1	50,5	1.436,6	1.436,6		
	- Hutan rawa sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	10,1	10,1	14,6	24,8	-	24,8	24,8		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	TOTAL	-	174,1	98,4	990,3	1.262,9	149,8	1.412,7	50,5	1.463,2	1.463,2		
	PAPUA												
	A. Hutan Primer	119,9	23,2	691,4	-	834,5	282,2	1.116,7	366,8	1.483,5	1.483,5		
	- Hutan lahan kering primer	119,9	23,2	28,7	-	171,8	14,9	186,7	365,8	552,4	552,4		
	- Hutan rawa primer	-	-	662,7	-	662,7	267,4	930,1	1,0	931,1	931,1		
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	B. Hutan Sekunder	67,0	44,0	515,9	1.490,4	2.117,2	528,1	2.645,3	1.242,7	3.888,0	3.888,0		
	- Hutan lahan kering sekunder	67,0	12,0	352,5	26,7	458,2	481,9	940,1	1.030,7	1.970,8	1.970,8		
	- Hutan rawa sekunder	-	31,9	163,4	1.463,7	1.659,0	46,2	1.705,2	205,0	1.910,2	1.910,2		
	- Hutan mangrove sekunder	-	-	-	-	-	-	-	7,0	7,0	7,0		
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(839,5)	(839,5)	-	(839,5)	-	(839,5)	(839,5)		
	TOTAL	186,8	67,1	1.207,3	650,9	2.112,2	810,4	2.922,5	1.609,4	4.532,0	4.532,0		

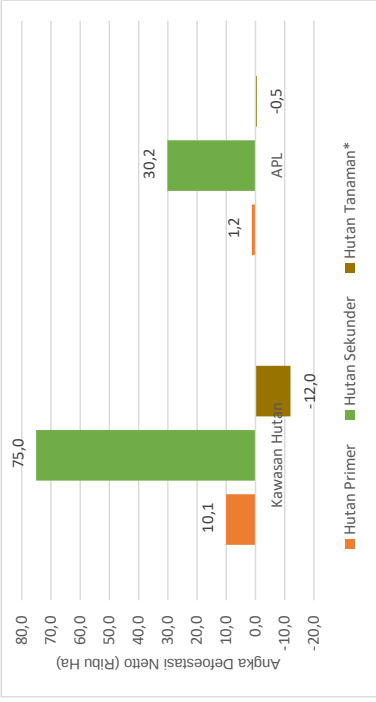
NO.	PROVINSI/ DEFORESTASI PADA TIPE HUTAN	KAWASAN HUTAN										APL	TOTAL
		HUTAN TETAP					HPK		Jumlah				
		HK	HL	HPT	HP	Jumlah	HPK	Jumlah					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
34	PAPUA BARAT												
	A. Hutan Primer	30,3	-	5,8	12,5	48,6	-	48,6	-	48,6			
	- Hutan lahan kering primer	30,3	-	5,8	-	36,1	-	36,1	-	36,1			
	- Hutan rawa primer	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	- Hutan mangrove primer	-	-	-	12,5	12,5	-	12,5	-	12,5			
	B. Hutan Sekunder	20,3	38,8	28,8	65,2	153,2	98,3	251,5	334,0	585,5			
	- Hutan lahan kering sekunder	4,7	5,3	28,7	-	38,7	98,3	137,0	332,3	469,4			
	- Hutan rawa sekunder	-	30,6	-	-	30,6	-	30,6	-	30,6			
	- Hutan mangrove sekunder	15,6	3,0	0,2	65,2	83,9	-	83,9	1,7	85,6			
	C. Hutan Tanaman*	-	-	-	(364,5)	(364,5)	(10,5)	(375,0)	-	(375,0)			
	TOTAL	50,6	38,8	34,6	(286,8)	(162,7)	87,8	(74,8)	334,0	259,2			
	INDONESIA												
	A. Hutan Primer	3.514,5	2.828,5	2.703,9	634,7	9.681,5	372,6	10.054,1	1.233,3	11.287,4			
	- Hutan lahan kering primer	3.335,0	2.815,6	2.041,2	570,9	8.762,7	105,2	8.867,9	1.076,4	9.944,3			
	- Hutan rawa primer	169,5	-	662,7	17,3	849,4	267,4	1.116,8	72,9	1.189,7			
	- Hutan mangrove primer	10,0	12,9	-	46,5	69,4	-	69,4	84,0	153,4			
	B. Hutan Sekunder	5.325,6	13.869,2	16.530,1	33.125,7	68.850,6	6.196,8	75.047,3	30.158,3	105.205,6			
	- Hutan lahan kering sekunder	4.807,3	10.393,7	15.067,6	22.527,8	52.796,4	4.116,0	56.912,4	21.921,6	78.834,0			
	- Hutan rawa sekunder	368,5	294,5	1.129,9	9.782,9	11.575,8	1.977,4	13.553,2	7.091,3	20.644,5			
	- Hutan mangrove sekunder	149,8	3.181,0	332,5	815,0	4.478,4	103,4	4.581,8	1.145,4	5.727,2			
	C. Hutan Tanaman*	-	6,4	(136,9)	(12.557,5)	(12.688,0)	716,9	(11.971,1)	(489,0)	(12.460,0)			
	TOTAL	8.840,0	16.704,0	19.097,0	21.202,9	65.844,0	7.286,3	73.130,4	30.902,6	104.032,9			

Ket. *: Hutan tanaman yang dihitung untuk deforestasi adalah berkurangnya tanaman yang berada diluar konsesi dan telah ditambahkan dengan hasil reforestasi.

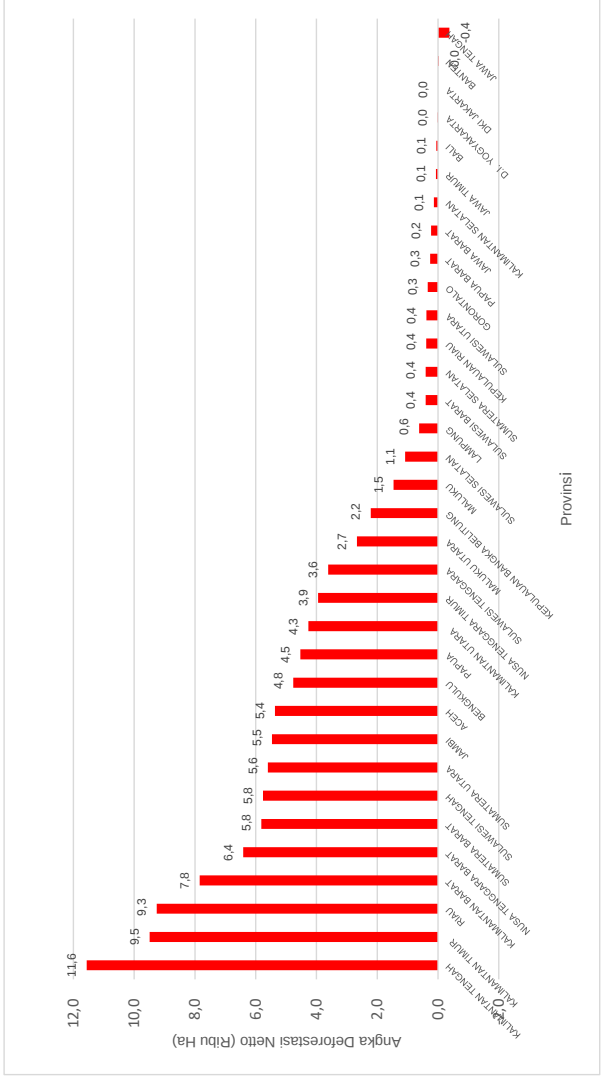
Sumber : - Hasil Penafsiran Citra Landsat 8 OLI Liputan Tahun 2021 dan 2022, Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan ,
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Data digital Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan pemutakhiran sampai dengan September 2022, diakses dari basis data JIG LHK pada bulan Februari 2023
Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



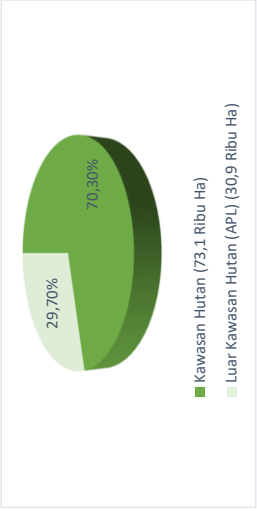
Gambar 3. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribu Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2021-2022 di Dalam Kawasan Hutan (KH)



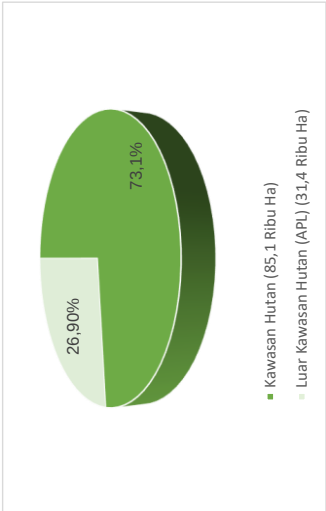
Gambar 4. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribu Ha) pada Hutan Primer, Sekunder, dan Tanaman Tahun 2021-2022 di Dalam dan di Luar KH



Gambar 5. Grafik Deforestasi Netto per Provinsi (Ribu Ha) Tahun 2021-2022



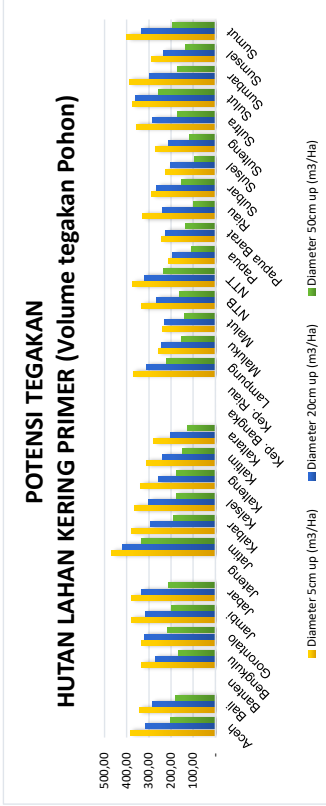
Gambar 6. Diagram Deforestasi Netto Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2021-2022



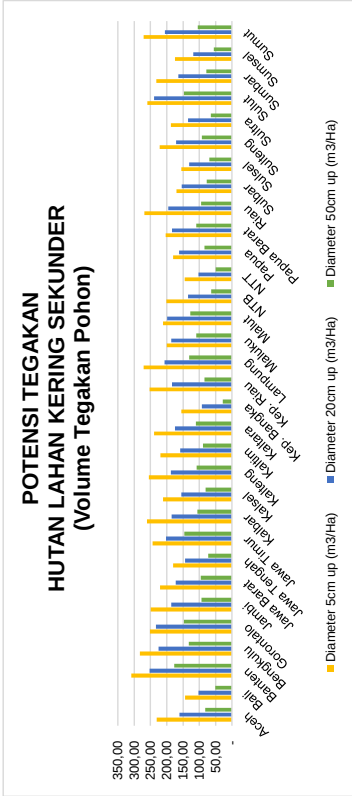
Gambar 7. Diagram Deforestasi Netto Hutan Alam Indonesia (Ribu Ha) Tahun 2021-2022 di Dalam KH dan di Luar KH (APL)

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	Volume Tegakan Pohon Diameter 5 Cm up (m3/ha)					Volume Tegakan Pohon Diameter 20 Cm up (m3/ha)					Volume Tegakan Pohon Diameter 50 Cm up (m3/ha)							
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	14	258.75	99.26	26.53	201.44	316.06	14	245.07	98.45	26.31	188.23	301.92	14	151.74	77.84	20.80	106.80	196.68
		Hutan Lahan Kering Sekunder	81	199.93	91.94	10.22	179.60	220.26	81	186.64	91.38	10.15	166.43	208.84	81	109.02	73.10	8.12	92.86	125.19
19	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Primer	3	239.36	61.54	35.53	86.49	392.23	3	229.00	61.14	35.30	77.11	380.88	3	137.11	40.54	23.41	36.40	237.83
		Hutan Lahan Kering Sekunder	26	211.07	122.02	23.93	161.78	260.35	26	198.62	123.66	24.25	148.67	248.57	26	128.16	88.59	17.37	92.38	163.94
20	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Primer	61	334.55	112.69	14.43	305.69	363.41	61	287.30	112.18	14.36	238.57	296.03	61	163.98	97.93	12.54	138.90	189.07
		Hutan Lahan Kering Sekunder	42	200.62	94.76	14.62	171.09	230.15	42	134.36	89.55	13.82	106.45	162.26	42	64.04	63.34	9.77	44.30	83.78
21	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Primer	38	371.70	189.73	30.78	309.34	434.06	38	319.51	190.10	30.84	257.03	382.00	38	231.89	187.12	30.36	170.39	293.40
		Hutan Lahan Kering Sekunder	74	145.47	89.44	10.40	124.75	166.20	74	102.86	82.70	9.61	83.70	122.02	74	49.53	50.50	5.87	37.83	61.23
22	Papua	Hutan Lahan Kering Primer	96	213.57	86.82	8.86	195.98	231.16	96	192.57	89.19	9.10	174.50	210.64	96	108.25	75.35	7.69	92.99	123.52
		Hutan Lahan Kering Sekunder	79	180.38	96.67	10.88	158.73	202.04	79	162.33	96.29	10.83	140.76	183.90	79	84.04	70.59	7.94	68.23	99.85
		Hutan Rawa Primer	61	163.35	94.75	12.13	139.08	187.61	61	148.27	93.32	11.95	124.37	172.17	61	82.95	78.75	10.08	62.79	103.12
		Hutan Rawa Sekunder	35	108.63	69.10	11.68	84.90	132.37	35	93.87	70.45	11.91	69.67	118.07	35	42.61	49.85	8.43	25.49	59.74
23	Papua Barat	Hutan Lahan Kering Primer	84	243.31	105.09	11.47	220.51	266.12	84	223.16	105.53	11.51	200.26	246.06	84	134.06	87.16	9.51	115.14	152.97
		Hutan Lahan Kering Sekunder	47	202.82	106.99	15.61	171.41	234.24	47	184.17	107.44	15.67	152.63	215.72	47	109.59	87.30	12.73	83.96	135.22
		Hutan Rawa Primer	12	192.89	77.85	22.47	143.42	242.35	12	177.65	77.87	22.48	128.17	227.13	12	115.40	69.74	20.13	71.09	159.71
		Hutan Rawa Sekunder	1	185.74	-	-	-	-	1	167.95	-	-	-	-	-	1	78.07	-	-	-
24	Riau	Hutan Lahan Kering Primer	10	327.70	116.35	36.79	244.46	410.93	10	240.52	121.69	38.48	153.47	327.57	10	100.05	102.23	32.33	26.92	173.19
		Hutan Lahan Kering Sekunder	49	268.98	111.81	15.97	236.87	301.10	49	195.69	105.43	15.06	165.41	225.97	49	94.04	77.09	11.01	71.90	116.18
		Hutan Rawa Primer	8	338.47	140.25	49.59	221.22	455.72	8	265.58	129.28	45.71	157.50	373.66	8	141.01	114.77	40.58	45.05	236.96
		Hutan Rawa Sekunder	110	226.73	101.62	9.69	207.52	245.93	110	150.55	91.01	8.68	133.35	167.75	110	45.15	50.61	4.83	35.58	54.71
25	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	24	287.33	129.16	26.36	232.80	341.87	24	264.33	119.49	24.39	213.88	314.79	24	150.84	100.68	20.55	108.33	193.35
		Hutan Lahan Kering Sekunder	19	170.49	81.03	18.59	131.44	209.55	19	154.00	78.86	18.09	115.99	192.01	19	77.48	57.36	13.16	49.84	105.13
26	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	42	223.49	119.60	18.46	186.22	260.76	42	200.98	112.77	17.40	165.84	236.12	42	96.26	98.01	15.12	65.72	126.80
		Hutan Lahan Kering Sekunder	40	154.66	116.12	18.36	117.53	191.80	40	131.29	107.05	16.93	97.06	165.53	40	68.78	84.42	13.35	41.78	95.78
27	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	121	271.23	112.85	10.26	250.91	291.54	121	212.90	117.47	10.68	191.75	234.04	121	114.98	105.99	9.64	95.91	134.06
		Hutan Lahan Kering Sekunder	86	221.90	87.16	9.40	203.21	240.58	86	170.88	84.32	9.09	152.80	188.96	86	92.28	69.74	7.52	77.32	107.23
28	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	38	357.52	126.95	20.59	315.79	399.25	38	285.71	126.24	20.48	244.21	327.20	38	172.73	106.77	17.32	137.63	207.82
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	186.77	106.58	13.43	159.93	213.61	63	134.84	99.10	12.49	109.88	159.80	63	64.35	76.80	9.68	45.01	83.69
29	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Primer	14	375.44	133.35	35.64	298.44	452.43	14	360.73	132.68	35.46	284.12	437.33	14	258.18	108.10	28.89	195.76	320.59
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	259.55	94.01	20.04	217.87	301.23	22	238.78	88.60	18.89	199.50	278.07	22	146.83	79.86	17.03	111.42	182.23
30	Sumatera Barat	Hutan Lahan Kering Primer	16	386.68	153.69	38.42	304.78	468.57	16	299.03	152.28	38.07	217.89	380.18	16	172.44	133.36	33.34	101.38	243.51
		Hutan Lahan Kering Sekunder	46	231.68	108.33	15.97	199.51	263.85	46	164.17	96.77	14.27	135.44	192.91	46	78.48	73.08	10.78	56.77	100.18
		Hutan Rawa Sekunder	4	111.88	77.40	38.70	-	235.05	4	71.74	76.77	38.39	-	193.90	4	11.62	19.58	9.79	-	42.78
31	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	20	289.23	101.28	22.65	241.83	336.63	20	234.73	91.68	20.50	191.82	277.64	20	133.86	76.23	17.04	98.18	169.53
		Hutan Lahan Kering Sekunder	41	175.00	105.15	16.42	141.82	208.19	41	118.56	97.31	15.20	87.84	149.27	41	55.59	62.28	9.73	35.93	75.25
		Hutan Rawa Primer	1	502.29	-	-	-	-	1	404.63	-	-	-	-	1	194.05	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	21	202.92	127.56	27.84	144.86	260.99	21	156.29	111.53	24.34	105.52	207.06	21	77.92	69.88	15.25	46.12	109.73
32	Sumatera Utara	Hutan Lahan Kering Primer	26	399.20	107.47	21.08	355.79	442.60	26	333.73	111.34	21.84	288.76	378.70	26	194.98	104.91	20.57	152.61	237.35
		Hutan Lahan Kering Sekunder	61	271.46	136.15	17.43	236.59	306.33	61	205.91	129.22	16.54	172.81	239.00	61	104.51	95.44	12.22	80.07	128.95
		Hutan Rawa Sekunder	6	215.98	195.77	79.92	10.53	421.44	6	149.24	164.49	67.15	-	321.86	6	64.81	89.75	36.64	-	159.00

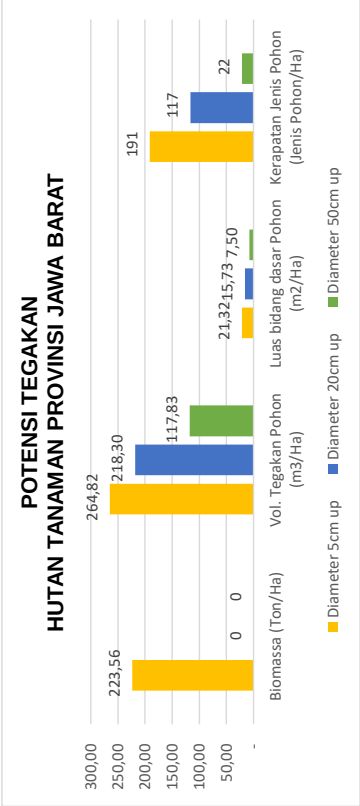
Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s.d. Desember 2022



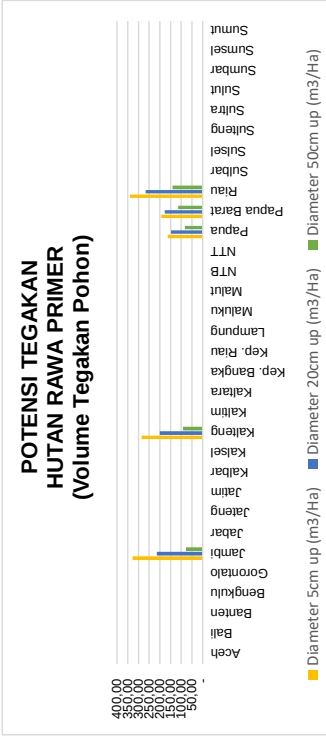
Gambar 8. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Primer Berdasarkan Volume Tegakan Pohon



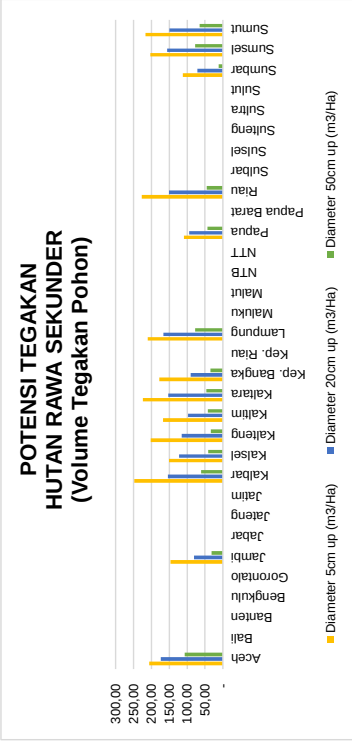
Gambar 10. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Sekunder Berdasarkan Volume Tegakan Pohon



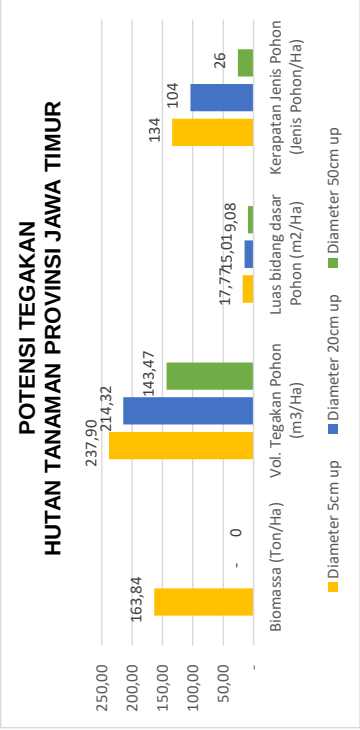
Gambar 12. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Tanaman di Provinsi Jawa Barat



Gambar 9. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Primer Berdasarkan Volume Tegakan Pohon



Gambar 11. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Sekunder Berdasarkan Volume Tegakan Po

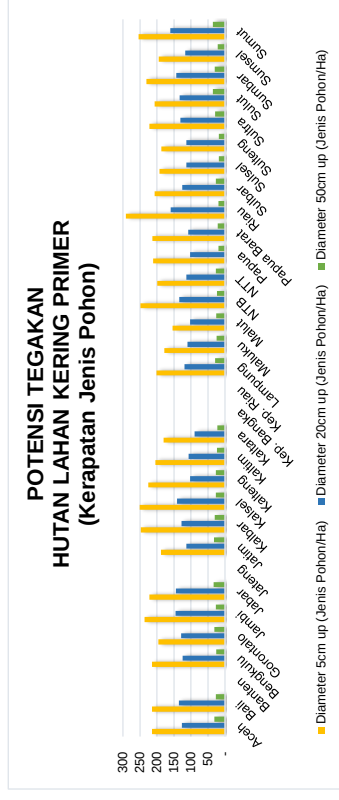


Gambar 13. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Tanaman di Provinsi Jawa Timur

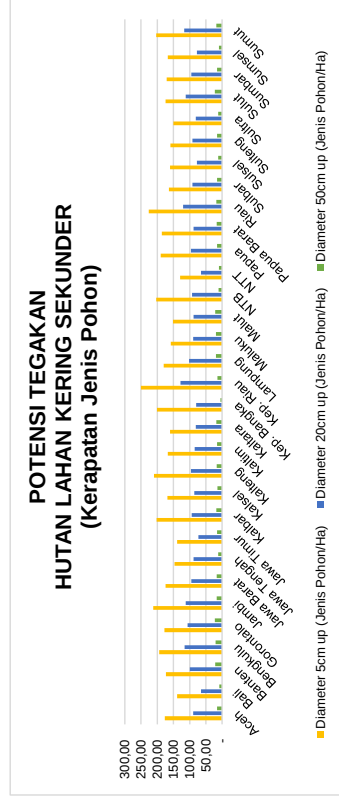
Keterangan Gambar 12 dan 13: Potensi Tegakan pada Hutan Tanaman yang Hanya Ada di 2 (Dua) Provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	Diameter 5 Cm up (Individu/ha)						Diameter 20 Cm up (Individu/ha)						Diameter 50 Cm up (Individu/ha)					
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	14	178,29	52,36	13,99	148,05	208,52	14	109,79	43,36	11,59	84,75	134,82	14	24,93	12,55	3,36	17,68	32,18
		Hutan Lahan Kering Sekunder	81	157,72	54,62	6,07	145,64	169,79	81	88,78	37,92	4,21	80,39	97,16	81	18,35	11,43	1,27	15,82	20,87
19	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Primer	3	154,33	25,79	14,89	90,26	218,41	3	102,67	27,61	15,94	34,08	171,25	3	26,00	10,44	6,03	0,06	51,94
		Hutan Lahan Kering Sekunder	26	151,19	61,35	12,03	126,41	175,97	26	87,85	49,94	9,79	67,67	108,02	26	21,73	15,01	2,94	15,67	27,79
20	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Primer	61	248,26	72,04	9,22	229,81	266,71	61	134,79	41,82	5,35	124,08	145,50	61	23,59	11,33	1,45	20,69	26,49
		Hutan Lahan Kering Sekunder	42	202,62	89,09	13,75	174,86	230,38	42	92,36	53,49	8,25	75,69	109,03	42	10,36	8,52	1,31	7,70	13,01
21	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Primer	38	199,50	80,87	13,12	172,92	226,08	38	113,34	46,96	7,62	97,91	128,78	38	26,95	16,36	2,65	21,57	32,32
		Hutan Lahan Kering Sekunder	74	129,04	79,66	9,26	110,59	147,50	74	64,39	46,32	5,38	53,66	75,12	74	9,34	9,63	1,12	7,11	11,57
22	Papua	Hutan Lahan Kering Primer	96	210,96	67,15	6,85	197,35	224,56	96	102,08	46,08	4,70	92,75	111,42	96	18,55	10,97	1,12	16,33	20,78
		Hutan Lahan Kering Sekunder	79	189,82	65,19	7,33	175,22	204,42	79	96,39	46,21	5,20	86,04	106,74	79	15,00	11,11	1,25	12,51	17,49
		Hutan Rawa Primer	61	158,34	69,31	8,87	140,59	176,09	61	79,51	53,39	6,84	65,83	93,18	61	13,28	10,78	1,38	10,52	16,04
		Hutan Rawa Sekunder	35	137,26	56,79	9,60	117,75	156,76	35	60,86	40,52	6,85	46,94	74,78	35	7,63	8,21	1,39	4,81	10,45
23	Papua Barat	Hutan Lahan Kering Primer	84	212,92	56,06	6,12	200,75	225,08	84	107,82	45,55	4,97	97,94	117,71	84	21,39	11,80	1,29	18,83	23,95
		Hutan Lahan Kering Sekunder	47	185,83	57,04	8,32	169,08	202,58	47	88,21	42,84	6,25	75,64	100,79	47	16,81	12,00	1,75	13,29	20,33
		Hutan Rawa Primer	12	152,92	76,07	21,96	104,58	201,25	12	71,17	33,40	9,64	49,95	92,38	12	18,50	11,69	3,37	11,07	25,93
		Hutan Rawa Sekunder	1	198,00	-	-	-	-	1	107,00	-	-	-	-	-	1	16,00	-	-	-
24	Riau	Hutan Lahan Kering Primer	10	291,00	54,04	17,09	252,34	329,66	10	159,70	48,08	15,20	125,30	194,10	10	18,90	19,52	6,17	4,94	32,86
		Hutan Lahan Kering Sekunder	49	225,67	74,12	10,59	204,38	246,96	49	120,16	49,61	7,09	105,91	134,41	49	17,39	12,40	1,77	13,82	20,95
		Hutan Rawa Primer	8	277,00	84,18	29,76	206,82	347,38	8	157,38	37,55	13,28	125,98	188,77	8	27,00	18,74	6,63	11,33	42,67
		Hutan Rawa Sekunder	110	227,06	95,57	9,11	209,00	245,12	110	120,13	61,60	5,87	108,49	131,77	110	9,88	9,85	0,94	8,02	11,74
25	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	24	206,75	64,18	13,10	179,65	233,85	24	125,54	40,70	8,31	108,36	142,73	24	26,25	15,63	3,19	19,65	32,85
		Hutan Lahan Kering Sekunder	19	163,95	55,85	12,81	137,03	190,87	19	91,42	33,91	7,78	75,08	107,76	19	15,11	10,54	2,42	10,02	20,19
26	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	42	192,76	66,97	10,33	171,89	213,63	42	113,33	45,27	6,99	99,23	127,44	42	18,05	14,22	2,19	13,61	22,48
		Hutan Lahan Kering Sekunder	40	160,88	59,63	9,43	141,60	179,75	40	77,65	45,65	7,22	63,05	92,25	40	12,03	13,77	2,18	7,62	16,43
27	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	121	187,42	50,92	4,63	178,26	196,59	121	113,38	38,09	3,46	106,53	120,24	121	18,19	13,30	1,21	15,80	20,58
		Hutan Lahan Kering Sekunder	86	159,85	48,39	5,22	149,47	170,22	86	91,01	33,80	3,64	83,77	98,26	86	15,95	9,62	1,04	13,89	18,02
28	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	38	222,03	71,64	11,62	198,48	245,57	38	130,71	50,78	8,24	114,02	147,40	38	29,13	16,84	2,73	23,59	34,67
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	150,38	59,38	7,48	135,43	165,34	63	80,65	40,04	5,04	70,57	90,73	63	11,46	10,26	1,29	8,88	14,04
29	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Primer	14	206,86	56,62	15,13	174,16	239,55	14	133,71	45,37	12,13	107,52	159,91	14	35,07	14,96	4,00	26,43	43,71
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	174,64	31,86	6,79	160,51	188,76	22	111,64	25,16	5,36	100,48	122,79	22	22,55	10,50	2,24	17,89	27,20
30	Sumatera Barat	Hutan Lahan Kering Primer	16	231,19	65,29	16,32	196,39	265,98	16	143,00	52,53	13,13	115,01	170,99	16	29,69	18,46	4,61	19,85	39,52
		Hutan Lahan Kering Sekunder	46	170,72	62,79	9,26	152,07	189,36	46	94,96	41,87	6,17	82,52	107,39	46	15,02	12,02	1,77	11,45	18,59
		Hutan Rawa Sekunder	4	106,75	86,78	43,39	-	244,84	4	65,00	83,49	41,75	-	197,86	4	3,25	5,25	2,63	-	11,61
31	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	20	194,30	48,93	10,94	171,40	217,20	20	116,40	29,82	6,67	102,44	130,36	20	21,75	11,17	2,50	16,52	26,98
		Hutan Lahan Kering Sekunder	41	166,90	84,84	13,25	140,12	193,68	41	77,73	53,13	8,30	60,96	94,50	41	9,32	9,73	1,52	6,25	12,39
		Hutan Rawa Primer	1	301,00	-	-	-	-	1	207,00	-	-	-	-	-	1	28,00	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	21	167,81	101,93	22,24	121,41	214,21	21	94,14	59,11	12,90	67,24	121,05	21	14,38	11,90	2,60	8,96	19,80
32	Sumatera Utara	Hutan Lahan Kering Primer	26	253,92	43,03	8,44	236,54	271,30	26	160,50	43,92	8,61	142,76	178,24	26	35,65	17,96	3,52	28,40	42,91
		Hutan Lahan Kering Sekunder	61	202,79	75,55	9,67	183,44	222,14	61	116,33	57,96	7,42	101,48	131,17	61	17,90	14,33	1,83	14,23	21,57
		Hutan Rawa Sekunder	6	156,17	88,95	36,32	62,81	249,52	6	90,00	72,65	29,66	13,76	166,24	6	12,83	18,54	7,57	-	32,29

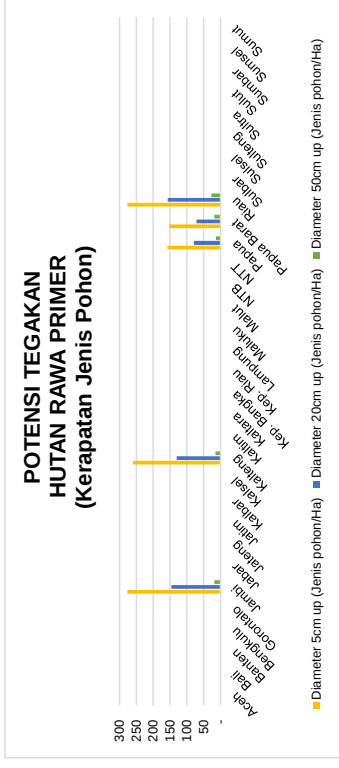
Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s.d. Desember 2022



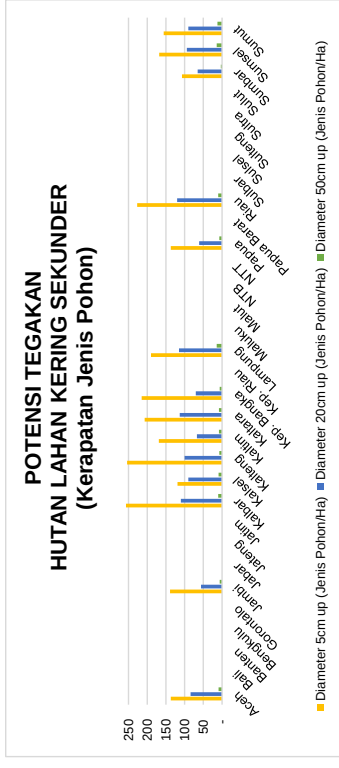
Gambar 14. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Primer Berdasarkan Kerapatan Jenis Pohon



Gambar 16. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Sekunder Berdasarkan Kerapatan Jenis Pohon



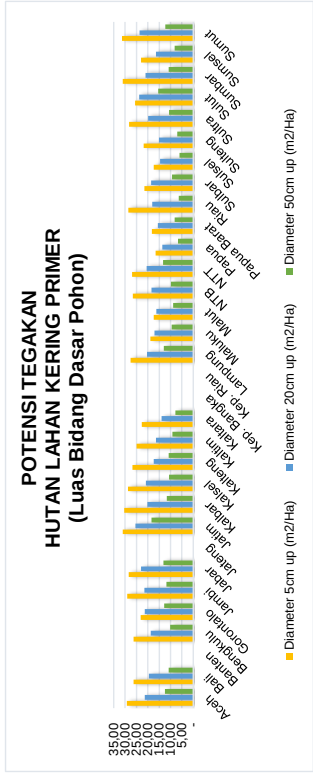
Gambar 15. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Primer Berdasarkan Kerapatan Jenis Pohon



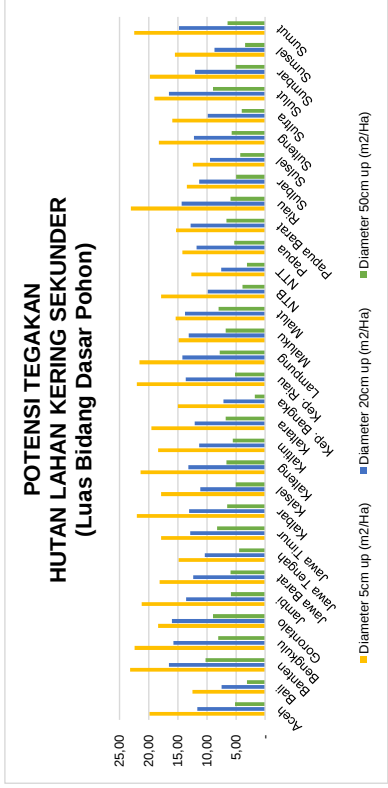
Gambar 17. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Sekunder Berdasarkan Kerapatan Jenis Pohon

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	Diameter 5 Cm up (m2/ha)					Diameter 20 Cm up (m2/ha)					Diameter 50 Cm up (m2/ha)							
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%	Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	14	18,85	6,78	1,81	14,93	22,76	14	17,05	6,65	1,78	13,21	20,89	14	9,44	4,77	1,27	6,68	12,19
		Hutan Lahan Kering Sekunder	81	14,85	6,14	0,68	13,49	16,21	81	13,10	6,05	0,67	11,77	14,44	81	6,78	4,40	0,49	5,80	7,75
19	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Primer	3	17,44	4,26	2,46	6,87	28,02	3	16,16	4,33	2,50	5,40	26,91	3	8,77	2,70	1,56	2,07	15,47
		Hutan Lahan Kering Sekunder	26	15,38	8,19	1,61	12,07	18,68	26	13,76	8,37	1,64	10,38	17,14	26	7,99	5,47	1,07	5,78	10,20
20	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Primer	61	26,59	7,35	0,94	24,71	28,48	61	18,44	6,84	0,88	16,69	20,19	61	9,82	5,51	0,71	8,41	11,23
		Hutan Lahan Kering Sekunder	42	17,88	7,30	1,13	15,60	20,15	42	9,85	6,14	0,95	7,94	11,77	42	3,91	3,65	0,56	2,77	5,05
21	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Primer	38	26,84	10,98	1,78	23,23	30,44	38	20,54	10,56	1,71	17,06	24,01	38	13,33	10,02	1,63	10,04	16,62
		Hutan Lahan Kering Sekunder	74	12,64	7,13	0,83	10,98	14,29	74	7,55	5,88	0,68	6,19	8,91	74	3,13	3,19	0,37	2,39	3,87
22	Papua	Hutan Lahan Kering Primer	96	16,48	5,73	0,58	15,32	17,65	96	13,69	5,91	0,60	12,49	14,89	96	6,73	4,49	0,46	5,82	7,64
		Hutan Lahan Kering Sekunder	79	14,20	6,64	0,75	12,71	15,68	79	11,77	6,51	0,73	10,31	13,23	79	5,26	4,26	0,48	4,31	6,22
		Hutan Rawa Primer	61	12,48	6,50	0,83	10,81	14,14	61	10,48	6,22	0,80	8,89	12,08	61	5,08	4,63	0,59	3,90	6,27
		Hutan Rawa Sekunder	35	8,83	4,87	0,82	7,16	10,51	35	6,91	4,93	0,83	5,22	8,60	35	2,66	2,99	0,51	1,63	3,69
23	Papua Barat	Hutan Lahan Kering Primer	84	18,24	6,79	0,74	16,77	19,71	84	15,52	6,81	0,74	14,05	17,00	84	8,20	5,08	0,55	7,10	9,30
		Hutan Lahan Kering Sekunder	47	15,28	6,95	1,01	13,24	17,32	47	12,79	6,94	1,01	10,75	14,82	47	6,67	5,16	0,75	5,15	8,18
		Hutan Rawa Primer	12	14,16	5,36	1,55	10,75	17,57	12	12,11	5,09	1,47	8,88	15,34	12	7,09	4,16	1,20	4,44	9,73
		Hutan Rawa Sekunder	1	14,78	-	-	-	-	1	12,47	-	-	-	-	1	5,00	-	-	-	-
24	Riau	Hutan Lahan Kering Primer	10	28,48	7,55	2,39	23,08	33,87	10	18,01	8,20	2,59	12,15	23,88	10	6,39	6,54	2,07	1,71	11,07
		Hutan Lahan Kering Sekunder	49	23,06	8,18	1,17	20,72	25,41	49	14,34	7,13	1,02	12,29	16,38	49	5,93	4,67	0,67	4,58	7,27
		Hutan Rawa Primer	8	28,15	9,90	3,50	19,87	36,42	8	19,36	8,29	2,93	12,42	26,29	8	9,01	7,13	2,52	3,06	14,97
		Hutan Rawa Sekunder	110	20,74	8,49	0,81	19,13	22,34	110	11,72	6,76	0,64	10,45	13,00	110	2,95	3,22	0,31	2,34	3,56
25	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	24	21,45	9,31	1,90	17,52	25,38	24	18,59	7,79	1,59	15,30	21,88	24	9,40	6,04	1,23	6,85	11,95
		Hutan Lahan Kering Sekunder	19	13,41	5,78	1,33	10,63	16,19	19	11,29	5,43	1,25	8,68	13,91	19	4,98	3,64	0,84	3,22	6,73
26	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	42	17,36	8,35	1,29	14,76	19,96	42	14,59	7,22	1,11	12,34	16,84	42	6,05	5,77	0,89	4,26	7,85
		Hutan Lahan Kering Sekunder	40	12,39	8,10	1,28	9,80	14,98	40	9,46	7,10	1,12	7,19	11,73	40	4,26	5,00	0,79	2,66	5,86
27	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	121	21,88	7,10	0,65	20,61	23,16	121	15,06	7,22	0,66	13,76	16,36	121	7,01	6,14	0,56	5,90	8,11
		Hutan Lahan Kering Sekunder	86	18,21	6,25	0,67	16,87	19,55	86	12,20	5,50	0,59	11,02	13,38	86	5,75	4,15	0,45	4,86	6,64
28	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	38	28,26	8,76	1,42	25,38	31,14	38	19,89	8,19	1,33	17,20	22,59	38	10,70	6,41	1,04	8,60	12,81
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	15,94	7,60	0,96	14,03	17,86	63	9,81	6,40	0,81	8,20	11,43	63	4,01	4,40	0,55	2,90	5,12
29	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Primer	14	25,61	8,63	2,31	20,63	30,59	14	23,76	8,51	2,28	18,85	28,68	14	15,36	6,27	1,68	11,74	18,98
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	19,02	6,20	1,32	16,27	21,77	22	16,50	5,45	1,16	14,08	18,92	22	8,94	4,69	1,00	6,86	11,02
30	Sumatera Barat	Hutan Lahan Kering Primer	16	31,01	10,49	2,62	25,42	36,60	16	21,06	9,70	2,43	15,89	26,23	16	10,77	7,90	1,98	6,56	14,98
		Hutan Lahan Kering Sekunder	46	19,80	8,23	1,21	17,36	22,25	46	12,01	6,55	0,97	10,06	13,96	46	5,01	4,49	0,66	3,68	6,34
		Hutan Rawa Sekunder	4	10,43	6,55	3,27	0,01	20,85	4	5,83	6,44	3,22	-	16,07	4	0,80	1,34	0,67	-	2,93
31	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	20	22,96	7,19	1,61	19,60	26,33	20	16,48	5,93	1,33	13,70	19,25	20	8,22	4,50	1,01	6,12	10,33
		Hutan Lahan Kering Sekunder	41	15,48	8,06	1,26	12,94	18,03	41	8,69	6,76	1,06	6,56	10,82	41	3,43	3,71	0,58	2,26	4,60
		Hutan Rawa Primer	1	39,92	-	-	-	-	1	28,91	-	-	-	-	-	1	11,87	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	21	17,05	10,22	2,23	12,39	21,70	21	11,43	7,90	1,72	7,83	15,02	21	4,93	4,33	0,94	2,96	6,90
32	Sumatera Utara	Hutan Lahan Kering Primer	26	31,43	7,02	1,38	28,59	34,26	26	23,63	7,23	1,42	20,71	26,55	26	12,33	6,45	1,26	9,73	14,94
		Hutan Lahan Kering Sekunder	61	22,49	9,81	1,26	19,97	25,00	61	14,78	8,61	1,10	12,57	16,98	61	6,44	5,56	0,71	5,02	7,87
		Hutan Rawa Sekunder	6	18,60	14,99	6,12	2,87	34,33	6	11,04	11,72	4,78	-	23,34	6	4,16	5,82	2,37	-	10,26

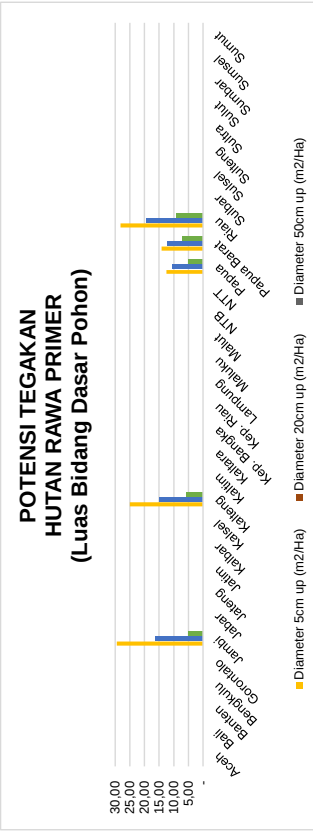
Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s.d. Desember 2022



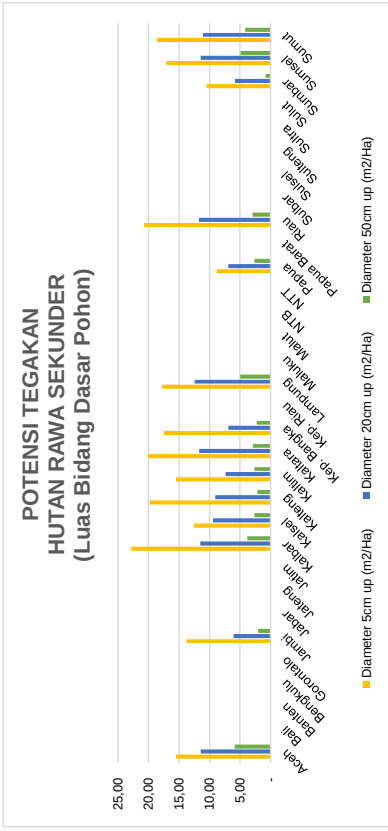
Gambar 18. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Primer Berdasarkan Luas Bidang Dasar Pohon



Gambar 20. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Lahan Kering Sekunder Berdasarkan Luas Bidang Dasar Pohon



Gambar 19. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Primer Berdasarkan Luas Bidang Dasar Pohon



Gambar 21. Grafik Potensi Tegakan pada Hutan Rawa Sekunder Berdasarkan Luas Bidang Dasar Pohon

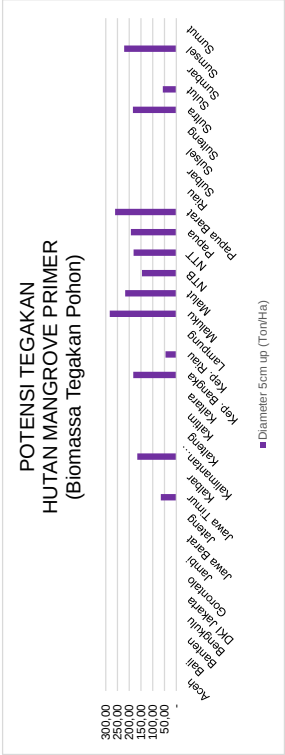
TABEL I.3. DATA POTENSI SUMBER DAYA HUTAN INDONESIA DARI PLOT INVENTARISASI HUTAN NASIONAL

D. Rata-rata Biomassa Tegakan Pohon Diameter 5 cm up per Provinsi

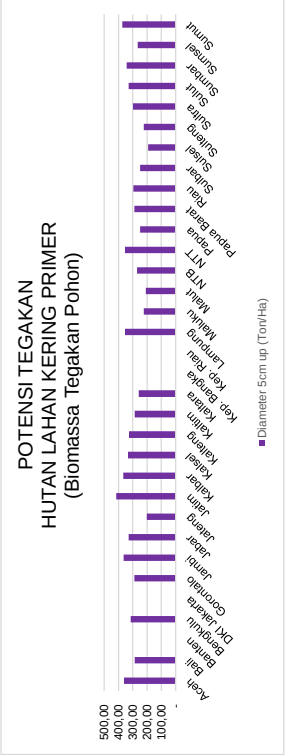
No.	Provinsi	Penutupan Lahan	BiomassaTegakan Pohon Diameter 5 Cm up (ton/ha)					
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Aceh	Hutan Lahan Kering Primer	36	361,49	158,87	26,48	307,74	415,25
		Hutan Lahan Kering Sekunder	36	200,25	90,50	15,08	169,63	230,87
		Hutan Rawa Primer	1	519,23	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	2	157,12	165,94	117,33	-	1.647,99
2	Bali	Hutan Mangrove Sekunder	2	19,17	24,90	17,61	-	242,88
		Hutan Lahan Kering Primer	11	286,42	73,50	22,16	237,05	335,80
		Hutan Lahan Kering Sekunder	9	122,46	76,60	25,53	63,58	181,34
		Hutan Mangrove Sekunder	2	89,07	24,19	17,10	-	306,38
3	Banten	Hutan Lahan Kering Sekunder	12	271,53	123,97	35,79	192,76	350,30
4	Bengkulu	Hutan Lahan Kering Primer	26	315,02	111,75	21,92	269,88	360,16
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	266,76	132,04	28,15	208,21	325,30
5	DKI Jakarta	Hutan Mangrove Sekunder	1	99,49	-	-	-	-
6	Gorontalo	Hutan Lahan Kering Primer	22	288,38	75,91	16,18	254,72	322,03
		Hutan Lahan Kering Sekunder	28	213,34	97,63	18,45	175,48	251,20
7	Jambi	Hutan Lahan Kering Primer	21	363,64	144,74	31,58	297,76	429,52
		Hutan Lahan Kering Sekunder	37	221,59	112,71	18,53	184,02	259,17
		Hutan Rawa Primer	5	280,13	138,43	61,91	108,24	452,02
		Hutan Rawa Sekunder	4	125,88	82,50	41,25	-	257,14
8	Jawa Barat	Hutan Lahan Kering Primer	4	329,13	71,35	35,67	215,60	442,66
		Hutan Lahan Kering Sekunder	27	180,72	96,01	18,48	142,74	218,70
		Hutan Tanaman	5	223,56	126,06	56,38	67,04	380,08
9	Jawa Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	1	201,03	-	-	-	-
		Hutan Lahan Kering Sekunder	6	140,95	51,22	20,91	87,20	194,70
		Hutan Mangrove Sekunder	1	15,48	-	-	-	-
10	Jawa Timur	Hutan Lahan Kering Primer	6	416,15	172,16	70,28	235,48	596,82
		Hutan Lahan Kering Sekunder	51	205,10	127,87	17,91	169,13	241,06
		Hutan Tanaman	1	163,84	-	-	-	-
		Hutan Mangrove Primer	2	66,71	40,88	28,90	-	433,97
		Hutan Mangrove Sekunder	1	18,16	-	-	-	-
11	Kalimantan Barat	Hutan Lahan Kering Primer	95	366,32	125,80	12,91	340,69	391,94
		Hutan Lahan Kering Sekunder	127	237,76	112,06	9,94	218,08	257,44
		Hutan Rawa Primer	1	290,63	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	73	208,72	106,12	12,42	183,96	233,48
		Hutan Mangrove Sekunder	24	263,56	214,93	43,87	172,80	-
12	Kalimantan Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	7	333,21	123,21	46,57	219,26	447,16
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	188,39	101,35	12,77	162,86	213,91
		Hutan Rawa Sekunder	1	106,33	-	-	-	-
		Hutan Mangrove Primer	2	166,48	56,71	40,10	-	676,01
		Hutan Mangrove Sekunder	12	155,36	78,93	22,78	105,21	205,51
13	Kalimantan Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	32	325,39	168,96	29,87	264,47	386,30
		Hutan Lahan Kering Sekunder	160	236,11	117,04	9,25	217,84	254,39
		Hutan Rawa Primer	5	248,24	86,39	38,63	140,98	355,51
		Hutan Rawa Sekunder	85	175,04	93,13	10,10	154,95	195,12
		Hutan Mangrove Sekunder	5	219,06	80,41	35,96	119,22	318,90
14	Kalimantan Timur	Hutan Lahan Kering Primer	30	285,65	133,62	24,40	235,76	335,55
		Hutan Lahan Kering Sekunder	214	195,69	102,02	6,97	181,94	209,43
		Hutan Rawa Primer	1	236,83	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	11	142,85	62,77	18,93	100,68	185,02
		Hutan Mangrove Sekunder	19	89,89	69,32	15,90	56,48	123,30
15	Kalimantan Utara	Hutan Lahan Kering Primer	46	257,58	151,32	22,31	212,64	302,51
		Hutan Lahan Kering Sekunder	55	218,59	106,73	14,39	189,74	247,44
		Hutan Rawa Primer	1	230,70	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	11	186,39	75,97	22,90	135,36	237,42
		Hutan Mangrove Sekunder	4	200,06	59,46	29,73	105,45	294,67
16	Kepulauan Bangka Belitung	Hutan Lahan Kering Sekunder	14	129,39	67,83	18,13	90,22	168,56
		Hutan Rawa Sekunder	4	153,32	33,62	16,81	99,82	206,81
		Hutan Mangrove Primer	7	183,61	63,47	23,99	124,91	242,31
		Hutan Mangrove Sekunder	3	114,59	73,06	42,18	-	296,08
17	Kepulauan Riau	Hutan Lahan Kering Sekunder	48	221,36	104,70	15,11	190,95	251,76
		Hutan Mangrove Primer	1	46,14	-	-	-	-
		Hutan Mangrove Sekunder	4	24,80	17,73	8,87	-	53,02
18	Lampung	Hutan Lahan Kering Primer	27	354,88	125,61	24,17	305,19	404,57
		Hutan Lahan Kering Sekunder	23	252,42	130,69	27,25	195,90	308,93
		Hutan Rawa Sekunder	7	190,92	24,30	9,18	168,45	213,40
19	Maluku	Hutan Lahan Kering Primer	14	222,24	88,80	23,73	170,97	273,51
		Hutan Lahan Kering Sekunder	81	167,54	84,03	9,34	148,96	186,12
		Hutan Mangrove Primer	3	283,45	65,41	37,76	120,96	445,94
		Hutan Mangrove Sekunder	2	241,42	32,10	22,70	-	529,79
20	Maluku Utara	Hutan Lahan Kering Primer	3	208,35	55,78	32,20	69,79	346,91
		Hutan Lahan Kering Sekunder	26	183,53	110,40	21,65	138,93	228,12
		Hutan Mangrove Primer	5	217,55	96,08	42,97	98,25	336,85
21	Nusa Tenggara Barat	Hutan Lahan Kering Primer	61	270,87	103,08	13,20	244,47	297,27
		Hutan Lahan Kering Sekunder	42	158,00	76,83	11,85	134,06	181,94
		Hutan Mangrove Primer	2	145,78	52,97	37,46	-	621,71
		Hutan Mangrove Sekunder	2	86,84	67,89	48,01	-	696,83

No.	Provinsi	Penutupan Lahan	BiomassaTegakan Pohon Diameter 5 Cm up (ton/ha)					
			Jumlah Plot Terpilih	Rata-Rata	Standar Deviasi	SE Mean	Lower 95%	Upper 95%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	Nusa Tenggara Timur	Hutan Lahan Kering Primer	38	355,30	226,96	36,82	280,70	429,90
		Hutan Lahan Kering Sekunder	74	122,96	79,05	9,19	104,65	141,28
		Hutan Mangrove Primer	2	181,57	35,45	25,06	-	500,04
23	Papua	Hutan Lahan Kering Primer	96	248,11	110,61	11,29	225,70	270,52
		Hutan Lahan Kering Sekunder	79	205,00	118,48	13,33	178,46	231,54
		Hutan Rawa Primer	61	189,31	123,13	15,76	157,78	220,84
		Hutan Rawa Sekunder	35	118,84	82,68	13,98	90,44	147,24
		Hutan Mangrove Primer	7	193,38	90,35	34,15	109,82	276,95
		Hutan Mangrove Sekunder	7	173,30	75,95	28,71	103,06	243,55
24	Papua Barat	Hutan Lahan Kering Primer	84	287,61	132,21	14,43	258,92	316,30
		Hutan Lahan Kering Sekunder	47	235,55	130,19	18,99	197,33	273,78
		Hutan Rawa Primer	12	226,18	94,58	27,30	166,09	286,28
		Hutan Rawa Sekunder	1	207,09	-	-	-	-
		Hutan Mangrove Primer	10	260,48	66,47	21,02	212,94	308,03
		Hutan Mangrove Sekunder	7	250,45	61,14	23,11	193,91	307,00
25	Riau	Hutan Lahan Kering Primer	10	295,56	124,47	39,36	206,52	384,60
		Hutan Lahan Kering Sekunder	49	234,94	109,88	15,70	203,38	266,50
		Hutan Rawa Primer	8	288,07	132,34	46,79	177,43	398,71
		Hutan Rawa Sekunder	110	185,41	88,33	8,42	168,71	202,10
		Hutan Mangrove Sekunder	7	69,72	42,89	16,21	30,06	109,39
26	Sulawesi Barat	Hutan Lahan Kering Primer	24	249,83	113,98	23,27	201,70	297,96
		Hutan Lahan Kering Sekunder	19	145,50	71,86	16,49	110,87	180,14
27	Sulawesi Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	42	191,68	110,74	17,09	157,17	226,19
		Hutan Lahan Kering Sekunder	40	128,45	100,01	15,81	96,47	160,44
28	Sulawesi Tengah	Hutan Lahan Kering Primer	121	222,88	102,43	9,31	204,45	241,32
		Hutan Lahan Kering Sekunder	86	179,02	74,06	7,99	163,15	194,90
29	Sulawesi Tenggara	Hutan Lahan Kering Primer	38	298,07	118,94	19,29	258,97	337,16
		Hutan Lahan Kering Sekunder	63	150,98	96,97	12,22	126,56	175,40
		Hutan Mangrove Primer	2	184,12	83,46	59,01	-	933,98
		Hutan Mangrove Sekunder	13	130,34	125,02	34,67	54,79	205,89
30	Sulawesi Utara	Hutan Lahan Kering Primer	14	327,80	122,35	32,70	257,15	398,44
		Hutan Lahan Kering Sekunder	22	218,83	84,16	17,94	181,52	256,15
		Hutan Mangrove Primer	2	58,09	40,69	28,77	-	423,69
31	Sumatera Barat	Hutan Lahan Kering Primer	16	342,88	149,52	37,38	263,20	422,55
		Hutan Lahan Kering Sekunder	46	201,35	101,75	15,00	171,14	231,57
		Hutan Rawa Sekunder	4	91,31	64,80	32,40	-	194,42
32	Sumatera Selatan	Hutan Lahan Kering Primer	20	266,19	103,57	23,16	217,72	314,67
		Hutan Lahan Kering Sekunder	41	152,48	100,75	15,73	120,68	184,28
		Hutan Rawa Primer	1	451,90	-	-	-	-
		Hutan Rawa Sekunder	21	182,53	116,13	25,34	129,67	235,39
		Hutan Mangrove Primer	10	221,95	30,02	9,49	200,48	243,42
33	Sumatera Utara	Hutan Mangrove Sekunder	3	152,41	141,93	81,94	-	504,98
		Hutan Lahan Kering Primer	26	372,39	117,65	23,07	324,87	419,91
		Hutan Lahan Kering Sekunder	61	244,83	135,96	17,41	210,01	279,65
		Hutan Rawa Sekunder	6	168,05	130,23	53,16	31,38	304,71
		Hutan Mangrove Sekunder	4	59,59	34,47	17,24	4,74	114,45

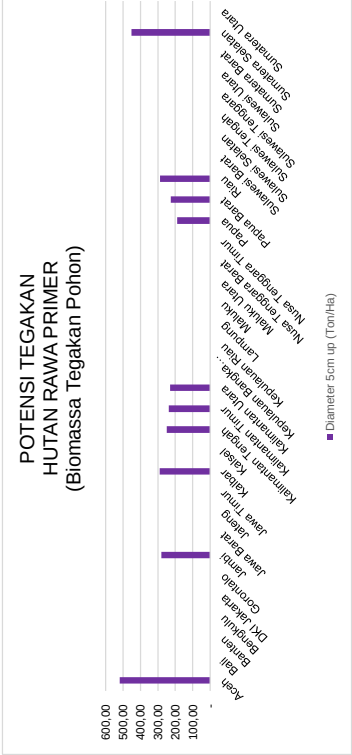
Sumber: Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan, Data s.d. Desember 2022



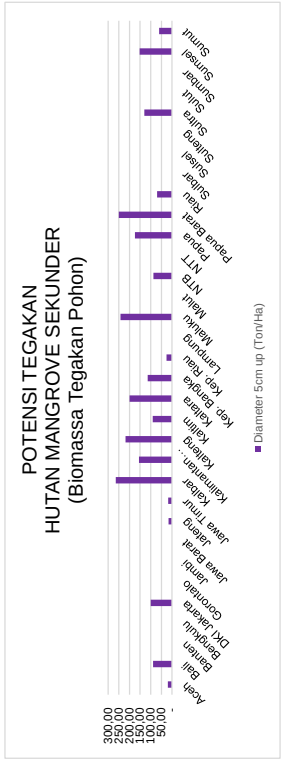
Gambar 22. Grafik Potensi Tegakan Hutan Mangrove Primer berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon



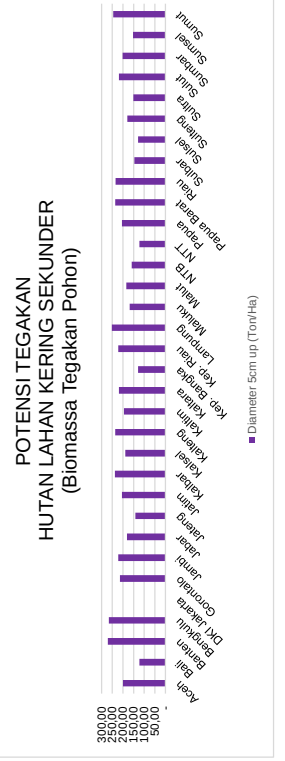
Gambar 24. Grafik Potensi Tegakan Hutan Lahan Kering Primer berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon



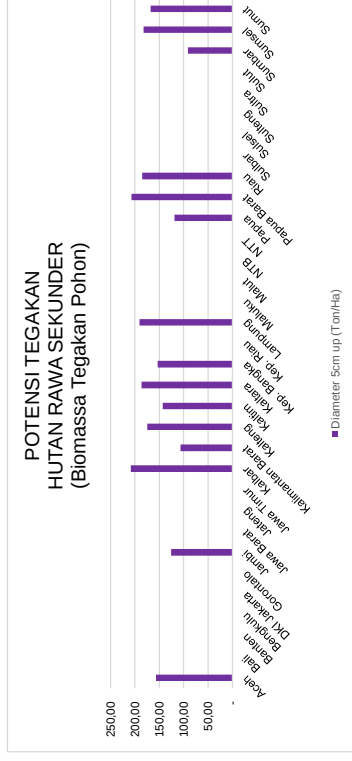
Gambar 26. Grafik Potensi Tegakan Hutan Rawa Primer berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon



Gambar 23. Grafik Potensi Tegakan Hutan Mangrove Sekunder berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon



Gambar 25. Grafik Potensi Tegakan Hutan Lahan Kering Sekunder berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon



Gambar 27. Grafik Potensi Tegakan Hutan Rawa Sekunder berdasarkan Biomassa Tegakan Pohon

PERENCANAAN KAWASAN HUTAN

DATA DAN INFORMASI

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2023

TABEL II.1 PERKEMBANGAN PENYUSUNAN/REVISI/REVIEW RKTP

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP				Keterangan	
		Belum susun	Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub		
1	Aceh		√/D								
2	Sumatera Utara				√					Peraturan Gubenur Sumatera Utara Nomor 13 Tahun 2022, tanggal 4 April 2022	
3	Sumatera Barat				√				√	- Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012, tanggal 17 Desember 2012 sebagaimana telah direvisi melalui - Peraturan Gubenur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020, tanggal 9 Juli 2020	
4	Jambi		√/F								
5	Riau		√/D								
6	Kepulauan Riau		√/D								
7	Bengkulu				√	√				Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 36 Tahun 2013, tanggal 27 Desember 2013	
8	Kepulauan Bangka Belitung				√	√				Peraturan Gubernur Bangka Belitung Nomor 56 Tahun 2014, tanggal 23 Juli 2014	
9	Sumatera Selatan		√/D								
10	Lampung		√/D								
11	Banten			√							
12	DKI Jakarta		√/D								
13	Jawa Barat				√		√			Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014	
14	Jawa Tengah				√				√	Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2012, 28 September 2012 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2023, 28 Maret 2023 Tentang RKTP Jawa Tengah Tahun 2011-2030	
15	D.I. Yogyakarta				√		√			Keputusan Gubernur DIY No. 10/KEP/2012, tanggal 9 Januari 2012	

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP				Keterangan
		Belum susun	Proses Penyusunan D (Draft) / F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
16	Jawa Timur				√			√		- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2013, tanggal 10 Juli 2013 - Proses pengesahan
17	Bali				√	√				Peraturan Gubernur Bali Nomor 77 Tahun 2014 tanggal 15 Desember 2014
18	Nusa Tenggara Barat				√	√				Peraturan Gubernur NTB Nomor 33 Tahun 2013, tanggal 2 November 2013
19	Nusa Tenggara Timur				√	√				Peraturan Gubernur NTT Nomor 34 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013
20	Kalimantan Barat				√	√				Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2016, tanggal 3 Oktober 2016
21	Kalimantan Selatan				√				√	Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 50 Tahun 2015, tanggal 6 Juli 2015 Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 86 Tahun 2023 http://bit.ly/3PJpUrQ
22	Kalimantan Tengah		√/D							
23	Kalimantan Timur				√				√	- Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 19 Tahun 2012, tanggal 5 Juli 2012 sebagaimana telah direvisi melalui - Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 55 Tahun 2018, tanggal 20 Desember 2018
24	Kalimantan Utara			v		-	-	-	-	sudah memperoleh Rekomendasi dari Direktur RPKHPWPH Dijien PKTL Dalam Proses pengesahan
25	Sulawesi Utara				√	√				Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 33 Tahun 2015, tanggal 18 September 2015
26	Gorontalo				√			√		Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 56 Tahun 2014 tanggal 29 Agustus 2014
27	Sulawesi Tengah				√	√				Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 68 Tahun 2013, tanggal 8 November 2013

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP				Progres Revisi RKTP				Keterangan
		Belum susun	Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	
28	Sulawesi Selatan				✓		✓			Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 147 Tahun 2018, tanggal 28 Desember 2018
29	Sulawesi Barat				✓	✓				Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 31 Tahun 2014 tanggal 17 November 2014
30	Sulawesi Tenggara				✓	✓				Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 47 Tahun 2015, tanggal 9 September 2015
31	Maluku Utara				✓	✓				Peraturan Gubernur Maluku Utara Nomor 31.1 Tahun 2016, tanggal 22 November 2016
32	Maluku				✓			-	-	Peraturan Gubernur Maluku Nomor 40 Tahun 2022 tanggal 31 Oktober 2022
33	Papua			✓						
34	Papua Barat				✓					Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 11 Tahun 2022 tgl 26 April 2022 Rekomendasi dari Direktur RPKHPWP Ditjen PKTL No: S.122/REN/RKPWP/PLA.0/2/2022 Tanggal 23 Februari 2022
Jumlah		-	8	3	23	11*	3	2	4	

Catatan :

*untuk Provinsi yang sudah disahkan melalui Pergub setelah Tahun 2021 (Prov. Maluku, Sumut, Papua Barat, Penyusunan RKTPnya sudah mengakomodir Dinamika Pembangunan Kehutanan dan perkembangan kebijakan serta sudah mengacu pada Peraturan Perundangan terbaru.

Untuk Provinsi Pemekaran di Pulau Papua Perlu disusun RKTPnya dengan memperhatikan RKTP Induk yaitu :

-Papua Barat Daya (sedang dalam proses penyusunan RKTP)

-Papua Selatan

-Papua Tengah dan

- Papua Pegunungan

Perkembangan Penyusunan RKTP dan Review /Revisi RKTP sampai dengan Bulan Desember 2022 sudah mengalami penambahan bila dibandingkan dengan Perkembangan Penyusunan RKTP dan Review /Revisi RKTP sampai dengan 2021

No.	Provinsi	Progres Penyusunan RKTP					Progres Revisi RKTP				Ket.
		Belum Menyusun	Proses Penyusunan D (Draft)/ F (Finalisasi)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub	Belum Menyusun Revisi	Proses Penyusunan (Draft)	Proses Pengesahan	Sudah Disahkan Melalui Pergub		
1.	Tahun 2021	-	12	2	20	16	2	-	2		
2.	Tahun 2022	-	8	3	23	11	3	3	3		
3.	Tahun 2023	-	8	3	23	11	3	2	4		

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data s.d 31 Oktober 2023

TABEL II.2. PERKEMBANGAN PERUBAHAN PERUNTUKAN DAN FUNGSI KAWASAN HUTAN DALAM PROSES REVIEW RTRWP

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				PERSETUJUAN PERUBAHAN KAWASAN HUTAN (Ha)				KETERANGAN
			KAWASAN HUTAN (Ha)		KAWASAN HUTAN (Ha)		KAWASAN HUTAN (Ha)		PENUNJUKAN BARU		
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	KSA/KPA	18.462	3.331	3.568	2.613	2.630	3.028	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.941/Menhut-II/2013 tanggal 23 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09507/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS		
		HL	64.654	67.488	18.224	60.590	35.010	7.864			
		HPT	4.517	5.496	5.743	654	960	10.113			
		HP	91.903	55.402	1.137	66.685	41.656	5.456			
		HPK	-	-	2.603	-	-	-			
2	SUMATERA UTARA	JUMLAH	179.536	131.717	31.275	130.542	80.256	26.461			
		KSA/KPA	-	4.850	-	-	-	1.140	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan mengenai kawasan hutan provinsi Sumatera Utara Nomor SK.579/Menhut-II/2014, tanggal 24 Juni 2014, menindaklanjuti keputusan MA no 47/PI/HUM/2011 tanggal 23 Desember 2013		
		HL	50.783	461.527	10.857	104.444	208.305	8.598			
		HPT	104.210	319.449	2.291	3.467	176.722	2.326			
		HP	141.270	447.156	21.577	28.504	222.009	5.830			
3	SUMATERA BARAT	HPK	-	36.302	704	70.947	35.680	-			
		JUMLAH	296.263	1.269.284	35.429	207.362	642.716	17.894			
		KSA/KPA	4.852	7.560	882	-	1.070	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.304/Menhut-II/2011, tanggal 9-6-2011 dan SK.141/Menhut-II/2012 tanggal 15/03/2012		
		HL	86.339	97.563	3.650	87.456	50.887	3.412			
		HPT	23.606	25.709	6.098	21.541	21.293	6.098			
		HP	97.062	50.204	1.045	33.621	36.230	253			
		HPK	4.330	30.350	1.869	4.595	16.806	143			
		JUMLAH	216.189	211.386	13.544	147.213	126.286	9.906			
		KSA/KPA	4.577	25.469	5.521	2.186	-	5.796	1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.878/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Provinsi Riau.		
		HPT	16.864	32.256	12.331	17.636	-	5	2. Rekomendasi Ombudsman RI No. 0002/REK/0361.2015/ PBP-41/II/2016 tanggal 16 Februari 2016		
4	RIAU	HP	597.466	546.252	8.875	481.978	173.039	4.846	3. Menindaklanjuti Rekomendasi Ombudsman RI tersebut telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.314/Menhut/II/2016		
		HP	296.400	327.677	19.491	11.493	84.446	905	Sejten/PLA.2/4/2016 tanggal 20 April 2016 jo SK.393/Menhut/II/2016		
		HPK	172.400	2.599.042	696	204.250	1.445.889	-	Sejten/PLA.0/5/2016 tanggal 23 Mei 2016		
		JUMLAH	1.087.707	3.530.696	46.914	717.543	1.703.374	11.552	4. Persub S.438/Menhut-PKTL/Rein/PLA.0/4/2016 tanggal 25 April 2016		
									5. Terdapat perubahan peruntukan DPCLS melalui Surat Menteri LHK ke DPR RI No. S.220/Menhut/Sejten/PLA.3/4/2016 tanggal 20 April 2016.		
5	JAMBI								6. Akan dilakukan pendampingan/fasilitasi sinkronisasi kawasan hutan dalam pola ruang RTRWPK.		
		KSA/KPA	-	1.582	-	-	-	336	7. Terdapat Usulan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan melalui Surat Gubernur Riau Nomor: (1) 525/DLHK/1744 tanggal 5 Juni 2023; (2) 525/DLHK/13793 tanggal 6 Oktober 2023; belum dilaksanakan ekspose.		
		HL	-	303	-	271	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.727/Menhut-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014 tanggal 24 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS;		
		HPT	63.411	5.010	-	1.323	167	-			
		HP	8.834	100.152	10.908	18.935	13.545	-			
		HPK	-	-	-	-	-	-			
		JUMLAH	72.245	107.047	10.908	20.529	14.048	-			

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN				PERSETUJUAN PERUBAHAN				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
6	SUMATERA SELATAN	KSA/KPA	607	22.145	6.207	607	21.903	7.624	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS; Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 1254/ORI-SRT/III/2018 tanggal 22 Februari 2018; 4. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.823/Menhk/Setjen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI persetujuan KH-APL (SM-APL seluas 9.329 ha).		
		HL	55.562	25.653	2.224	8.436	7.071	1.891	SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS; Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 1254/ORI-SRT/III/2018 tanggal 22 Februari 2018; 4. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.823/Menhk/Setjen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI persetujuan KH-APL (SM-APL seluas 9.329 ha).		
		HPT	23.838	9.432	1.493	24.099	1.912	1.493	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS; Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 1254/ORI-SRT/III/2018 tanggal 22 Februari 2018; 4. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.823/Menhk/Setjen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI persetujuan KH-APL (SM-APL seluas 9.329 ha).		
		HP	-	88.932	36.054	6.970	31.106	30.183	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS; Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 1254/ORI-SRT/III/2018 tanggal 22 Februari 2018; 4. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.823/Menhk/Setjen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI persetujuan KH-APL (SM-APL seluas 9.329 ha).		
		HPK	2.818	264.388	1.485	4.187	177.541	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS; Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 1254/ORI-SRT/III/2018 tanggal 22 Februari 2018; 4. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.823/Menhk/Setjen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI persetujuan KH-APL (SM-APL seluas 9.329 ha).		
		JUMLAH	82.825	410.550	47.463	44.299	239.533	41.191	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 September 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/IX/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS; Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.190/Menhk/Setjen/PLA.0/4/2018 tanggal 20 April 2018 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI No. 1254/ORI-SRT/III/2018 tanggal 22 Februari 2018; 4. Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.823/Menhk/Setjen/PLA.10/4/2019 tanggal 17 Oktober 2019 sebagai tindak lanjut rekomendasi/tindakan korektif atas Surat Ombudsman RI persetujuan KH-APL (SM-APL seluas 9.329 ha).		
7	BENGKULU	KSA/KPA	9.607	9.875	-	-	435	-	Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.553/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 mengenai Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan		
		HL	48.173	2.709	-	19.940	73	-	Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.553/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 mengenai Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan		
		HPT	2.723	35.969	-	333	928	-	Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.553/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 mengenai Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan		
		HP	-	2.949	-	-	256	-	Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.553/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 mengenai Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan		
		HPK	-	10.360	-	-	648	-	Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.553/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 mengenai Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan		
		JUMLAH	60.503	61.861	-	20.272	2.340	-	Telah terbit Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.553/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 mengenai Persetujuan Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan		
8	LAMPUNG	-	-	-	-	-	-	-	1. Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.798/Menhut-II/2012, tanggal 27-12-2012		
9	KEP. BANGKA BELITUNG	KSA/KPA	772	420	-	190	-	-	No. SK.798/Menhut-II/2012, tanggal 27-12-2012		
		HL	-	33.012	1.993	2.529	-	1.993	2. Terdapat Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan melalui surat Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 650/05/142/DPU/PRRPK tanggal 29 Juli 2022; Belum dilaksanakan ekspos.		
		HPT	-	-	-	-	-	-	2. Terdapat Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan melalui surat Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 650/05/142/DPU/PRRPK tanggal 29 Juli 2022; Belum dilaksanakan ekspos.		
		HP	8.589	100.158	1.225	8.159	19.131	1.225	2. Terdapat Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan melalui surat Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 650/05/142/DPU/PRRPK tanggal 29 Juli 2022; Belum dilaksanakan ekspos.		
		HPK	-	-	-	-	-	-	2. Terdapat Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan melalui surat Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 650/05/142/DPU/PRRPK tanggal 29 Juli 2022; Belum dilaksanakan ekspos.		
		JUMLAH	9.361	133.590	3.218	10.878	19.131	3.218	2. Terdapat Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan melalui surat Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 650/05/142/DPU/PRRPK tanggal 29 Juli 2022; Belum dilaksanakan ekspos.		
10	KEP. RIAU	KSA/KPA	3.120	12.943	3	4014	1.571	-	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014; telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri; 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 272/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Prov. Kepri sebagai tindak lanjut Persetujuan Sebagian DPCLS Provinsi Kepri didasarkan atas Surat DPR RI Nomor PW.105706/DPR RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018		
		HL	13.197	36.317	2.085	11.733	5.163	2.108	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014; telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri; 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 272/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Prov. Kepri sebagai tindak lanjut Persetujuan Sebagian DPCLS Provinsi Kepri didasarkan atas Surat DPR RI Nomor PW.105706/DPR RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018		
		HPT	11.374	114.252	282	25.807	67.243	-	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014; telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri; 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 272/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Prov. Kepri sebagai tindak lanjut Persetujuan Sebagian DPCLS Provinsi Kepri didasarkan atas Surat DPR RI Nomor PW.105706/DPR RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018		
		HP	163	6.461	-	720	8949	262	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014; telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri; 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 272/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Prov. Kepri sebagai tindak lanjut Persetujuan Sebagian DPCLS Provinsi Kepri didasarkan atas Surat DPR RI Nomor PW.105706/DPR RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018		
		HPK	30.869	362.981	-	104.688	256.152	-	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014; telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri; 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 272/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Prov. Kepri sebagai tindak lanjut Persetujuan Sebagian DPCLS Provinsi Kepri didasarkan atas Surat DPR RI Nomor PW.105706/DPR RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018		
		JUMLAH	58.723	532.954	2.370	146.962	339.078	2.370	Telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan nomor SK.867/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 mengenai Kawasan Hutan Prov. Kepri dan Surat DPR RI Nomor PW/09502/DPR RI/IX/2014; telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK.76/Menhk-II/2015 tanggal 06 Maret 2015 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Provinsi Kepri; 2. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 272/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2018 tanggal 6 Juni 2018 mengenai Perubahan Kawasan Hutan Prov. Kepri sebagai tindak lanjut Persetujuan Sebagian DPCLS Provinsi Kepri didasarkan atas Surat DPR RI Nomor PW.105706/DPR RI/III/2018 tanggal 21 Maret 2018		
11	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
12	JAWA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
13	JAWA TENGAH	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
14	DI. YOGYAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
15	JAWA TIMUR	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
16	BANTEN	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
17	BALI	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada usulan perubahan		
18	NUSA TENGGARA BARAT	-	-	-	-	-	-	-	1. Terdapat Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan melalui surat Gubernur NTB Nomor 522/6467/DL.HK/2022 tanggal 27 September 2022; Belum dilaksanakan		

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN				PERSETUJUAN PERUBAHAN				KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUBAHAN HUTAN (Ha)	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	KAWASAN HUTAN (Ha)	PENUNJUKAN BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
19	NUSA TENGGARA TIMUR	KSA/KPA Darat	3.613	7.352	5.328	617		5.328			Terdapat Usulan sesuai Surat Gubernur NTT, Nomor :
		KSA/KPA Air		1.993							1. Surat Gubernur Nomor BU.522/14/DISHUT/2013, tgl 11-10-2013
		HL	-	74.606	5.064		12.492	551			2. Surat Gubernur No. BU.522/19/DISHUT/2013, tgl 20-11-2013
		HPT	-	23.800	34		4.307	35			3. Surat Gubernur No. BU.522/13/DISHUT/2014 tgl 5-6-2014
		HP	6.263	59.939	14.092	3.499	10.307	5.897			4. Surat Gubernur No. BU.522/03/DISHUT/2015, tgl 15-4-2015
		HPK	11.472	45.535	-	8.052	27.057				Update per 31 Des 2015 adalah Review RTRW NTT dalam tahap finalisasi
		JUMLAH	21.348	213.195	24.518	12.168	54.163	11.811			Telah diterbitkan Keputusan Menteri LHK No. SK. 357/Menhk/Setjen/PLA.o/5/2016; 11 Mei 2016
20	KALIMANTAN BARAT	HL	198.125	220.648	77.186	66.048	-	29.156			Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.936/Menhut-II/2013 tanggal 20 Desember 2013 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Kalbar
		HPT	235.863	637.048	51.984	149.567	189.460	2.977			
		HP	126.769	1.064.863	87.434	41.681	294.912	20.253			
		HPK	111.339	211.200	5.768	77.007	69.765	-			
		JUMLAH	672.096	2.133.759	222.372	334.303	554.137	52.386			
21	KALIMANTAN TENGAH	KSA/KPA	148.512	38.856	15.169	48.412	-	13.601			Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.292/Menhut-II/2011, tanggal 31-5-2011 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Kalteng
		HL	180.947	5.426	50.472	33.116	-	9.968			
		HPT	636.399	124.183	17.933	86.977	101.157	3.179			
		HP	2.401.681	840.773	40.234	402.043	333.261	2.720			
		HPK	533.117	1.913.076	820.907	119.118	734.238	204			
		JUMLAH	3.900.656	2.922.314	944.715	689.666	1.168.656	29.672			
22	KALIMANTAN SELATAN	KSA/KPA	4.991.64	691.84	-	4.209.57	1.398.60				Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.16/MENLHK/SETJEN/PLA.0/1/2023 tanggal 13 Januari 2023
		HL	-	827.26	-	-	213.99				
		HPT	-	171.90	-	-	118.24				
		HP	-	30.998.18	-	5.978.15	23.822.90				
		HPK	-	631.24	-	-	516.34				
		JUMLAH	4.991.64	33.320.42	-	10.187.72	26.070.07				
23	KALIMANTAN UTARA	KSA/KPA	-	33.114	-	-	-				1. Usulan Gubernur Nomor: (1) 600/0242/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 27 Februari 2020; (2) 600/1235/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 5 April 2021; (3) 600/1585/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 30 April 2021; dan (4) 600/2160/PUPR-PERKIM/GUB tanggal 21 Juni 2021; (5) 522/3952/DISHUT/GUB tanggal 6 November 2023
		HL	-	34.555	-	-	-				2. Telah dilakukan kunjungan lapangan oleh Timdu (field study).
		HPT	-	251.399	-	-	-				3. Telah dilakukan pembahasan hasil kunjungan lapangan dan penyusunan draft kriteria dan indikator.
		HP	-	374.490	-	-	-				
		HPK	-	59.190	-	-	-				
		JUMLAH	-	752.748	-	-	-				

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN				PERSETUJUAN PERUBAHAN				KETERANGAN
			KAWASAN HUTAN (Ha)				KAWASAN HUTAN (Ha)				
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PENUNJUKAN BARU			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
24	KALIMANTAN TIMUR	KSA/KPA	-	62.416,69	15.095,85					1. Usulan Gubernur Nomor: (1) 522/6071/EK tanggal 3 November 2021; (2) 650/1121/PR-KASIPTR tanggal 9 November 2022; (3) 650/6506/BID-PR tanggal 18 April 2023; (4) 500.4.3.5/11359/6506/BID-PR tanggal 23 Juni 2023.	
		HL	20.914,15	22.352,00						2. Telah dilakukan ekspose usulan perubahan kawasan hutan oleh Gubernur Kalimantan Timur kepada Menteri LHK pada tanggal 28 Februari 2023	
		HPT	-	144.898,76	-					3. Telah dibentuk Tim Teknis, Tim GIS dan Sekretariat guna membantu Tim Terpadu melalui Keputusan Jenderal PKTL	
		HP	4.893,12	255.082,16						4. SK pembentukan Tim Terpadu saat ini masih dalam proses pengajuan kepada Sekjen LHK guna mendapat persetujuan dari Menteri LHK	
		HPK	-	114.989,32							
		JUMLAH	25.807,27	599.738,93	15.095,85						
25	SULAWESI UTARA	KSA/KPA	793	12.421		465	182			Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.434/Menhut-II/2013 tanggal 17 Juni 2013 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.734/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov.Sulut	
		HL	6.457	15.278	1.423	296	521	290			
		HPT		16.545	1.166		5.264				
		HP		3.821			904				
		HPK		526			166				
		JUMLAH	7.250	48.591	2.589	761	7.037	290			
26	SULAWESI TENGAH	KSA/KPA	-	71.581	57	1933	293	-		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.452/MENLHK/SETJEN/PLA.0/11/2020 tanggal 30 November 2020	
		HL	36.825	49.854	53	11.805	6.254	53			
		HPT	6.005	58.793	1.535	66	8.042	1535			
		HP	-	7.652	-	23107	966	-			
		HPK	-	54.328	103	17707	6.003	-			
		JUMLAH	42.830	242.207	1.749	54.618	21.558	1.588			
27	SULAWESI SELATAN	KSA/KPA	22.595	13.266		24.662	1.645	-		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.SK.362/MENLHK/SETJEN/PLA.0/5/2019 tanggal 28 Mei 2019	
		HL	76.036	98.388	886	49.291	45.726	170			
		HPT	13.403	50.105	160	10.079	23.683	139			
		HP		32.598	1.314	-	13.719	1.529			
		HPK		9.478		-	6.564	-			
		JUMLAH	112.034	203.836	2.360	84.032	91.337	1.838			
28	SULAWESI TENGGARA	KSA/KPA	28.823	8.334	-	8.061	-	-		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011	
		HL	187.128	30.236	-	52.660	-	-			
		HPT	23.706	29.427	-	15.773	13.059	-			
		HP	61.714	154.376	-	34.078	52.287	-			
		HPK	3.553	87.792	-	4.539	44.759	-			
		JUMLAH	304.924	310.165	-	115.111	110.105	-			
29	GORONTALO	KSA/KPA	17.031	-	-	15.024	167	-		Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.324/ Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.325/Menhut-II/2010 tanggal 25 Mei 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Gorontalo	
		HL	8.363	5.550	37	28.603	5.095	-			
		HPT	55.850	22.428	1.550	8.265	13.779	1.055			
		HP	14.161	4.535	2.316	3.661	2.055	1.194			
		HPK	-	3.319	2.048	-	1.509	1.538			
		JUMLAH	95.395	35.832	5.951	55.553	22.605	3.787			

No	PROVINSI	FUNGSI KAWASAN	LUAS USULAN PERUBAHAN				PERSETUJUAN PERUBAHAN			KETERANGAN
			PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUBAHAN HUTAN (Ha)	PERUBAHAN BARU	PERUBAHAN FUNGSI	PERUBAHAN PERUNTUKAN	PERUBAHAN BARU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
30	SULAWESI BARAT	KSA/KPA	-	825	-	-	-	825	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.726/Menhut-II/2012, tanggal 10-12-2012 dan dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 862/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2010 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Subar
		HL	214.184	44.126	-	214.184	-	8.470	-	
		HPT	80.446	44.566	-	37.416	-	11.671	-	
		HP	-	48.258	-	-	-	28.618	-	
		HPK	-	31.085	-	-	-	23.972	-	
		JUMLAH	294.630	168.860	-	251.600	-	73.556	-	
31	MALUKU	KSA/KPA	3.484	17.256	-	-	-	2	-	1. Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.871/Menhut-II/2013 tanggal 6 Desember 2013 dan Surat DPR RI Nomor PW/09557/DPR RI/X/2014 tanggal 25 September 2014 mengenai Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan yang DPCLS;
		HL	30.670	75.645	6.125	-	-	3.955	2.326	
		HP1	204.600	117.452	987	4.785	-	11.482	987	
		HP	41.439	84.196	-	12.264	-	26.863	-	2. Terdapat usulan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui surat Gubernur Maluku Nomor: (1) 522/3480 tanggal 30 November 2022; (2) surat a.n. Gubernur Maluku, Sekretaris Daerah Nomor 500.4.3.5/1903 tanggal 16 November 2023; belum dilaksanakan ekspose
		HPK	16.352	1.230.827	578	3.619	-	321.813	-	
		JUMLAH	296.545	1.525.376	-	20.668	-	364.115	3.313	
32	MALUT	JUMLAH								
		KSA/KPA	28.650	1.656	444	-	-	-	-	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.490/Menhut-II/2012 tanggal 5-9-2012
		HL	180.735	56.260	6.017	29.001	-	1.662	2.592	
		HP1	92.591	77.108	10.065	22.994	-	8.599	710	
		HP	40.641	136.148	1.122	9.585	-	15.648	1.479	
		HPK	42.156	679.564	7.071	30.642	-	247.452	-	
		JUMLAH	384.773	950.736	24.719	92.222	-	273.361	5.081	
33	PAPUA	KSA/KPA	8.108	133.814	521	763	-	9.662	521	1. Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.458/Menhut-II/2012 tanggal 15 Agustus 2012 dan dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua
		HL	405.429	269.758	10.661	395.176	-	44.532	7.742	
		HPT	156.662	80.581	18.189	133.115	-	39.468	18.282	2. Terdapat Usulan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan melalui Surat Plh. Gubernur PAPUA Kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 050/6668/SET tanggal 14 Juni 2023; belum dilaksanakan ekspose.
		HP	3.570.941	126.766	14.307	3.404.532	-	50.426	14.307	
		HPK	2.058.356	667.704	4.482	1.803.244	-	232.297	4.406	
		JUMLAH	6.199.496	1.278.623	48.160	5.736.830	-	376.385	45.258	
34	PAPUA BARAT	KSA/KPA	238.324	35.714	4	5.835	-	-	4	Persetujuan Perubahan Kawasan Hutan sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.710/Menhut-II/2014 tanggal 27 Agustus 2014 dan telah diterbitkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.783/Menhut-II/2014 tanggal 22 September 2014 mengenai penunjukan kawasan hutan prov. Papua Barat
		HL	97.990	145.399	1.687	8.388	-	-	59	
		HPT	92.203	102.674	2.150	23.532	-	44.817	2.633	
		HP	136.735	132.632	3.080	-	-	61.594	-	
		HPK	467.507	563.033	16.949	400.465	-	136.634	1.238	
		JUMLAH	1.032.759	979.452	23.870	438.220	-	243.045	3.934	

Sumber: Direktorat Rencana dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan (Data s.d 28 nov 2023)

Keterangan: pm = pro memory

PENGUKUHAN KAWASAN HUTAN

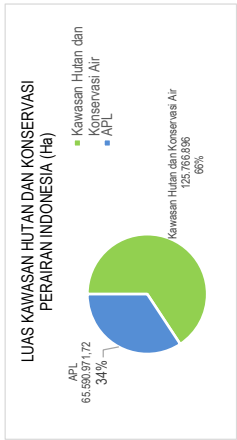
DATA DAN INFORMASI

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2023

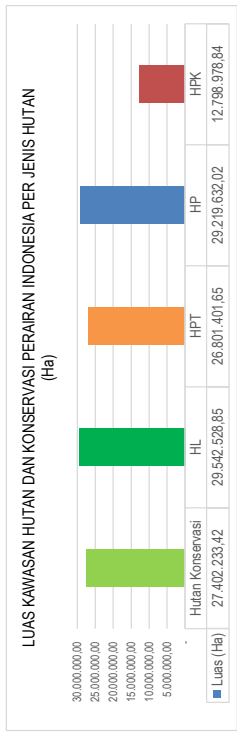
TABEL III.1 LUAS KAWASAN HUTAN DAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN INDONESIA BERDASARKAN SK MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

No.	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI AIR	KONSERVASI DARAT	JML KK AIR & DARAT	HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan	Luas Provinsi	Proporsi Luas KH (Daratan) (%)	Ket
1	Aceh	580/MENLHK/SETJEN/SET.1/12/2018	17/12/2018	0,00	1.058.364,40	1.058.364,40	1.781.677,92	145.778,34	549.794,88	15.374,69	3.550.390,23	3.550.390,23	5.795.600	61,3	
2	Bali	433/Kps-II/1999	15/08/1999	3.415,00	22.878,59	26.293,59	95.766,06	6.719,26	1.907,10	0,00	127.271,01	130.686,01	578.006	22,0	
3	Bangka Belitung	799/Menhut-II/2012	27/12/2012	0,00	34.500,00	34.500,00	166.371,00	0,00	442.051,00	693,00	643.615,00	643.615,00	1.642.406	39,2	
4	Banten	419/Kps-II/1999	15/06/1999	51.467,00	112.991,00	164.458,00	12.359,00	49.439,00	26.998,00	0,00	201.787,00	253.254,00	966.292	20,9	Perhitungan Digital khusus provinsi Banten
5	Bengkulu	784/Menhut-II/2012;SK.533/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2023	27-12-2012; 25/05/2023	0,00	462.862,36	462.862,36	230.737,69	172.018,85	45.596,91	11.115,35	922.291,16	922.291,16	1.991.933	46,3	
6	D.I.Yogyakarta	171/Kps-II/2000	29/06/2000	0,00	910,34	910,34	2.057,90	0,00	13.851,28	0,00	16.819,52	16.819,52	313.315	5,4	
7	DKI Jakarta	220/Kps-II/2000	02/08/2000	108.000,00	272,34	108.272,34	44,76	0,00	158,35	0,00	475,45	108.475,45	66.401	0,7	
8	Gorontalo	325/Menhut-II/2010	25/05/2010	0,00	196.653,00	196.653,00	204.608,00	251.097,00	89.879,00	82.431,00	824.668,00	824.668,00	1.125.707	73,3	
9	Jambi	863/Menhut-II/2014	29/09/2014	0,00	685.471,00	685.471,00	179.588,00	258.285,00	963.792,00	11.399,00	2.098.535,00	2.098.535,00	5.005.816	41,9	
10	Jawa Barat	195/Kps-II/2003	04/07/2003	0,00	132.180,00	132.180,00	291.306,00	190.152,00	202.965,00	0,00	816.603,00	816.603,00	3.537.776	23,1	
11	Jawa Tengah	359/Menhut-II/2004	01/10/2004	110.117,00	16.413,00	126.530,00	84.430,00	183.930,00	362.360,00	0,00	647.133,00	757.250,00	3.280.089	19,7	
12	Jawa Timur	395/Menhut-II/2011	21/07/2011	3.506,00	230.126,00	233.632,00	344.742,00	0,00	782.772,00	0,00	1.357.640,00	1.361.146,00	4.779.975	28,4	
13	Kalimantan Barat	733/Menhut-II/2014; 399/MENLHK/PKTL/PLA.2/10/2020; SK.1067/MENLHK/SETJEN/PLA.2/10/2022	02/09/2014; 16/10/2020; 7/10/2022	190.945,00	1.430.010,00	1.621.046,00	2.310.874,00	2.132.398,00	2.123.714,50	197.918,00	8.195.005,50	8.388.072,00	14.730.700	55,6	Pencabutan blad 1516 (ombudsman)
14	Kalimantan Selatan	435/Menhut-II/2009; SK 16/MENLHK/SETJEN/PLA.0/17/2023	23-07-2009; 13/01/2023	0,00	207.952,66	207.952,66	528.813,87	126.541,76	733.717,83	156.885,81	1.753.911,93	1.753.911,93	3.874.423	45,3	Hasil RTRW Kalsel 2023
15	Kalimantan Tengah	529/Menhut-II/2012	25/09/2012	22.542,00	1.608.286,00	1.630.828,00	1.346.066,00	3.317.461,00	3.881.817,00	2.543.535,00	12.697.165,00	12.719.707,00	15.356.450	82,7	
16	Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara	718/Menhut-II/2014 & 278/MENLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017 & 254/MENLHK/SETJEN/PLA.2/5/2018 136/MENLHK/SETJEN/PLA.2/2/2019; 478/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2020	29 Agustus 2014 & 9 Juni 2017 & 30 Mei 2018; 13 Februari 2019; 30/12/2020	0,00	1.704.666,00	1.704.666,00	2.846.243,00	5.045.164,45	4.022.075,55	211.575,88	13.831.724,88	13.831.724,88	20.453.434	67,6	SK 478/MENLHK/ SETJEN/ PLA.2/12/2020 merevisi blad 1916 (ombudsman)
17	Kepulauan Riau	76/MenLHK-II/2015 & 272/Menhk/Setjen/PLA.0/6/2018	06/03/2015 & 6 Juni 2018	0,00	4.734,73	4.734,73	97.362,65	118.832,99	78.830,62	82.071,11	381.832,10	381.832,10	820.172	46,6	

No.	Provinsi	SK	Tanggal	KONSERVASI AIR	KONSERVASI DARAT	JML KK AIR & DARAT	HL	HPT	HP	HPK	Luas Darat	Luas Darat dan Perairan	Luas Provinsi	Proporsi Luas KH (Daratan) (%)	Ket
18	Lampung	256/Kpts-II/2000	23/08/2000	0,00	462.030,00	462.030,00	317.615,00	33.358,00	191.732,00	0,00	1.004.735,00	1.004.735,00	3.462.380	29,0	
19	Maluku	854/Menhut-II/2014	29/09/2014	9.208,00	420.330,00	429.538,00	627.256,00	894.258,00	643.699,00	1.324.866,00	3.910.409,00	3.919.617,00	4.691.403	83,4	
20	Maluku Utara	302/Menhut-II/2013	01/05/2013	0,00	218.499,00	218.499,00	584.058,00	666.851,00	481.730,00	564.082,00	2.515.220,00	2.515.220,00	3.198.250	78,6	
21	N T B	598/Menhut-II/2009 & 270/MenLHK/SETJEN/PLA.2/6/2017	2 Oktober 2009 & 5 Juni 2017	11.121,00	167.913,00	179.034,00	430.485,00	286.700,00	150.740,00	0,00	1.035.838,00	1.046.959,00	1.857.232	55,8	
22	N T T	357/MenLHK/Sejen/PLA.0/5/2016	11 Mei 2016	256.482,00	264.930,00	521.412,00	684.572,00	169.707,00	288.214,00	78.494,00	1.485.917,00	1.742.399,00	4.871.810	30,5	
23	Papua	782/Menhut-II/2012	27/12/2012	1.019.017,00	6.736.267,00	7.755.284,00	7.815.283,00	5.961.240,00	4.739.327,00	4.116.385,00	29.368.482,00	30.387.499,00	31.903.605	92,1	
24	Papua Barat	783/Menhut-II/2014	22/09/2014	928.350,00	1.711.908,00	2.640.258,00	1.631.589,00	1.778.480,00	2.188.160,00	1.474.650,00	8.784.767,00	9.713.137,00	9.967.163	88,1	
25	Riau	903/MenLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016	07/12/2016	0,00	630.753,00	630.753,00	233.910,00	1.017.318,00	2.339.578,00	1.185.433,00	5.406.992,00	5.406.992,00	8.702.366	62,1	
26	Sulawesi Barat	862/Menhut-II/2014	29/09/2014	0,00	215.190,00	215.190,00	452.030,00	330.700,00	71.859,00	22.597,00	1.092.376,00	1.092.376,00	1.678.718	65,1	Hasil RTRWP Sulawesi 2019
27	Sulawesi Selatan	362/MenLHK/Sejen/PLA.0/5/2019	28/05/2019	606.804,00	231.029,00	837.833,00	1.162.498,00	479.518,00	140.036,00	16.412,00	2.029.493,00	2.636.297,00	4.671.748	43,4	
28	Sulawesi Tengah	869/Menhut-II/2014; 452/MenLHK/SETJEN/PLA.0/11/2020	29-09-2014; 30-11-2020	340.119,00	646.448,00	986.267,00	1.258.081,00	1.421.375,00	418.489,00	170.505,00	3.914.598,00	4.254.717,00	6.184.129	63,3	
29	Sulawesi Tenggara	465/Menhut-II/2011	09/08/2011	1.504.160,00	282.924,00	1.787.084,00	1.081.489,00	466.854,00	401.581,00	93.571,00	2.326.419,00	3.830.579,00	3.806.770	61,1	Perhitungan Digital
30	Sulawesi Utara	734/Menhut-II/2014	02/09/2014	69.800,00	245.165,00	314.965,00	161.784,00	208.927,00	64.367,00	14.696,00	694.939,00	764.739,00	1.385.164	50,2	
31	Sumatera Barat	36/Menhut-II/2013	15/01/2013	37.164,00	769.775,00	806.939,00	791.671,00	233.211,00	360.608,00	187.629,00	2.342.894,00	2.380.057,00	4.201.289	55,8	
32	Sumatera Selatan	454/MenLHK/Sejen/PLA.2/6/2016 & 190/MenLHK/Sejen/PLA.0/4/2018	17 Juni 2016 & 20 April 2018	49.104,00	741.681,00	790.785,00	578.279,00	213.918,00	1.712.819,00	160.996,00	3.407.693,00	3.456.797,00	9.159.243	37,2	
33	Sumatera Utara	579/Menhut-II/2014	24/06/2014	0,00	427.008,00	427.008,00	1.206.881,00	641.769,00	704.452,00	75.684,00	3.055.795,00	3.055.795,00	7.298.123	41,9	
JUMLAH				5.321.321,00	22.080.912,42	27.402.233,42	29.542.528,85	26.801.401,65	29.219.632,02	12.796.978,84	120.443.454,78	125.766.896,28	191.357.866,00	62,9	



Gambar 28. Diagram Perbandingan Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Indonesia dengan Luas APL



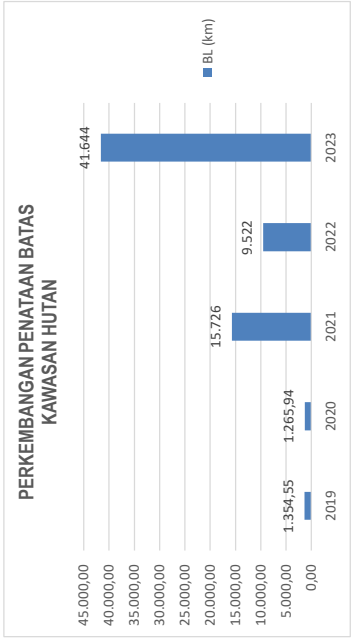
Gambar 29. Luas Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Indonesia Per Jenis Hutan

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan KH, Data sd 31 Oktober 2023

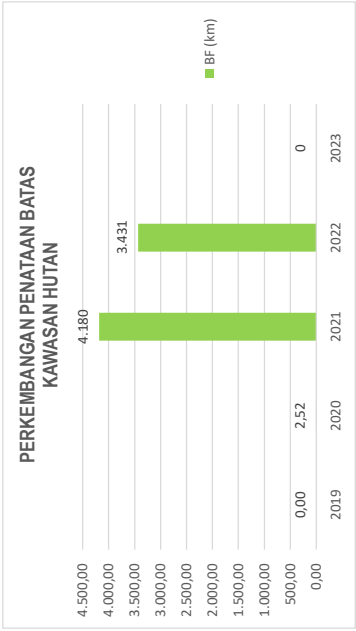
TABEL III.2. PERKEMBANGAN PENATAAN BATAS KAWASAN HUTAN

No.	Provinsi	S/D TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		BL	BF	BL	BF	BL	BF	BL	BF	BL	BF	HPK	BL	BF	HPK	BL	BF
		(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)	(Km)
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Aceh	4,911,31	1,257,75	185,143	0	-	-	271	343	-	-	-	2,659	-	-	8,026	1,601
2	Sumatera Utara	9,027,96	2,002,11	0	0	-	-	2,628	541	24	-	-	2,674	-	-	14,355	2,543
3	Sumatera Barat	3,914,23	1,589,66	0	0	-	-	63	-	11	-	-	2,593	-	-	6,582	1,590
4	Riau	9,474,92	1,520,54	116,164	0	-	-	303	208	3,189	1,266	-	9,276	-	-	22,358	2,995
5	Jambi	3,733,34	804,02	0	0	292,32	-	85	25	-	-	-	-	-	-	4,111	829
6	Sumatera Selatan	4,889,76	1,076,58	0	0	-	-	757	-	-	-	-	-	-	-	5,647	1,077
7	Bengkulu	1,663,49	489,85	0	0	-	-	-	-	-	-	-	341	-	-	2,004	490
8	Lampung	3,294,02	25,01	0	0	-	-	9	-	-	-	-	386	-	-	3,689	25
9	Kep. Bangka Belitung	705,16	77,42	0	0	307,36	-	98	-	-	-	-	-	-	-	1,111	77
10	Kepulauan Riau	1,200,23	861,91	6,252,54	0	-	-	285	-	660	34	-	1,866	-	-	4,018	896
11	DKI Jakarta	44,00	0,00	0	0	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-	53	-
12	Jawa Barat	20,212,85	17,27	0	0	-	-	116	12	-	-	-	50	-	-	20,379	29
13	Jawa Tengah	19,064,65	2,30	0	0	1,38	-	7	1	-	-	-	-	-	-	19,073	3
14	D.I. Yogyakarta	276,28	0,00	0	0	-	-	-	-	-	-	-	169	-	-	445	-
15	Jawa Timur	19,394,80	43,56	0	0	-	-	83	28	-	-	-	-	-	-	19,478	72
16	Banten	46,91	0,00	0	0	-	-	119	174	-	-	-	4	-	-	170	174
17	Bali	1,610,00	208,97	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,610	209
18	Nusa Tenggara Barat	4,806,47	856,16	0	0	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-	4,814	856
19	Nusa Tenggara Timur	5,707,25	13,30	0	0	-	-	1,083	25	-	-	-	1,139	-	-	7,929	38
20	Kalimantan Barat	10,562,80	8,868,39	32,42	0	-	-	941	275	847	122	-	-	-	-	12,383	9,265
21	Kalimantan Tengah	5,024,20	3,755,67	470,5	0	-	-	1,892	1,564	1,516	895	-	3,604	-	-	12,507	6,214
22	Kalimantan Selatan	11,731,88	3,455,67	181,13	0	31,91	2,52	-	-	2,086	935	17	-	-	-	14,031	4,393
23	Kalimantan Timur	9,764,16	11,282,94	212,3	0	-	-	421	67	300	111	35	-	-	-	10,697	11,461
24	Kalimantan Utara	0,00	0,00	-	-	632,97	-	196	184	246	68	-	-	-	-	1,075	252
25	Sulawesi Utara	2,869,43	7,773,10	6,58	0	-	-	53	46	-	-	-	-	-	-	2,929	7,819
26	Sulawesi Tengah	11,974,26	6,614,62	0	0	-	-	2,543	-	-	-	-	-	-	-	14,517	6,615
27	Sulawesi Selatan	776,14	1,653,77	0	0	-	-	735	88	-	-	-	1,607	-	-	3,118	1,742
28	Sulawesi Tenggara	6,007,45	4,228,80	0	0	-	-	330	-	135	-	-	194	-	-	6,667	4,229
29	Gorontalo	6,153,60	1,018,40	144,06	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,298	1,018
30	Sulawesi Barat	1,019,09	1,331,93	0	0	-	-	124	12	-	-	-	-	-	-	1,143	1,344
31	Maluku	7,913,28	4,000,41	0	0	-	-	66	-	58	-	-	4,122	-	-	12,159	4,000

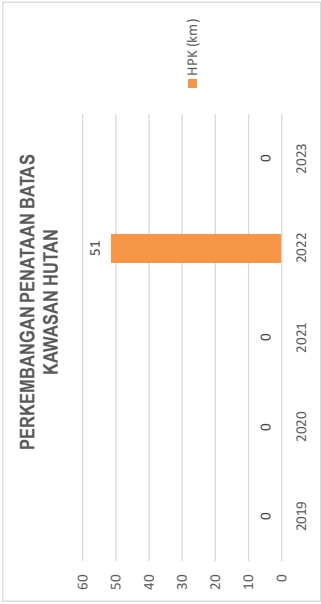
No.	Provinsi	S/D TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		BL		BL		BL		BL		BL		BF		BL		BF	
		(Km)		(Km)		(Km)		(Km)		(Km)		(Km)		(Km)		(Km)	
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
32	Maluku Utara	523,33	2.163,58	0	0	-	-	184	-	156	-	-	4.944	-	-	5.807	2.164
33	Papua Barat	1.740,55	3.223,66	0	0	-	-	547	263	-	-	-	3.799	-	-	6.087	3.487
34	Papua	12.106,69	11.890,80	0	0	-	-	1.788	323	294	-	-	2.201	-	-	16.389	12.214
JUMLAH		202.144,49	82.108,16	1.354,55	0,00	1.265,94	2,52	15.726	4.180	9.522	3.431	51	41.644	0	0	271.659	89.721
																	51



Gambar 30. Grafik Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan (Batas Luar)



Gambar 31. Grafik Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan (Batas Fungsi)



Gambar 32. Grafik Perkembangan Penataan Batas Kawasan Hutan (HPK)

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data s/d Oktober 2023

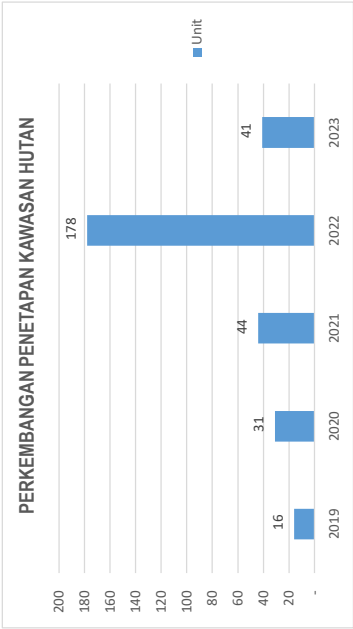
TABEL III.3. PERKEMBANGAN PENETAPAN KAWASAN HUTAN

No	Provinsi	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		SID TAHUN 2023	
		UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Aceh	4	6.564,90					13	1.577.929,23			32	2.504.127,28
2	Bali							9	80.606,40	1	3,37	35	218.037,87
3	Bangka Belitung											87	541.821,09
4	Banten											21	202.427,38
5	Bengkulu							1	9.304,34			55	714.652,22
6	DI. Yogyakarta											9	8.860,94
7	DKI. Jakarta											4	107.856,20
8	Gorontalo							2	6.720,18			34	812.008,94
9	Jambi							14	580.941,18			61	2.312.602,69
10	Jawa Barat					4	91,79	3	595,75	2	28,43	150	953.374,82
11	Jawa Tengah					3	238,62	1	0,90	5	139,89	146	787.556,52
12	Jawa Timur							7	88.587,70	2	976,26	155	1.060.765,05
13	Kalimantan Barat			2	8.752,44	10	284.440,22	22	1.223.087,31	1	21.653,96	198	7.678.887,11
14	Kalimantan Selatan			2	5.788,79	5	13.134,53	3	38.153,06	1	81.125,89	53	1.641.980,15
15	Kalimantan Tengah*					1	27.868,21	15	2.824.338,90	2	10.494,81	46	6.747.777,98
16	Kalimantan Timur			1	11.773,14	6	576.829,24	12	419.505,29	16	672.547,96	121	9.639.113,72
17	Kalimantan Utara			5	149.265,26			13	316.956,53	5	11.209,17	41	3.895.520,67
18	Kep. Riau											27	104.105,77
19	Lampung							4	282.045,31			33	885.282,75
20	Maluku			2	943,61			6	61.002,11			126	2.730.737,84
21	Maluku Utara			2	71.633,37	2	15.291,91					60	1.433.667,11
22	Nusa Tenggara Barat											62	1.187.580,98
23	Nusa Tenggara Timur			7	17.075,73	4	3.778,44			6	464,49	152	1.049.374,24
24	Papua			10	72.240,54	5	287.902,52	4	1.683.200,11			111	26.660.448,67
25	Papua Barat							1	27.099,36			40	8.148.997,99
26	Riau	5	63.416,35			3	60.215,34	11	51.577,56			66	2.228.795,22
27	Sulawesi Barat							2	14.859,10			21	1.076.853,50
28	Sulawesi Selatan							1	141,66			69	2.035.440,16
29	Sulawesi Tengah					1	7.289,60					63	2.570.986,95

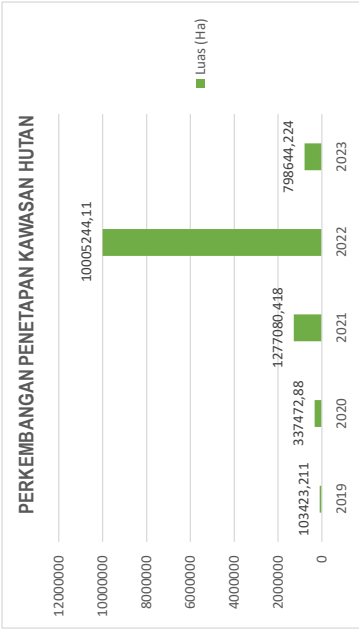
No	Provinsi	TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		SID TAHUN 2023	
		UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)	UNIT	Luas (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	Sulawesi Tenggara											46	3.263.657,61
31	Sulawesi Utara							1	26.989,60			61	408.349,04
32	Sumatera Barat							3	190.793,26			54	1.604.652,20
33	Sumatera Selatan							17	367.754,62			68	3.349.776,03
34	Sumatera Utara	7	33.441,96					13	133.054,64			61	1.891.763,03
	JUMLAH	16	103.423,21	31	337.472,88	44	1.277.080,42	178	10.005.244,11	41	798.644,22	2.368	100.457.839,70

Keterangan:

- Apabila terdapat ketidak sesuaian luas dan jumlah SK yang tercantum dalam matrik, maka perbaikan/koreksi mengacu pada fisik luas yang tercantum dalam SK.
- Perubahan data disebabkan terdapat perbaikan database penetapan kawasan hutan



Gambar 33. Grafik Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (Unit)



Gambar 34. Grafik Perkembangan Penetapan Kawasan Hutan (Luas)

Sumber: Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan, Data sid Oktober 2023

TABEL III.4. PERKEMBANGAN PENYEDIAAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA)

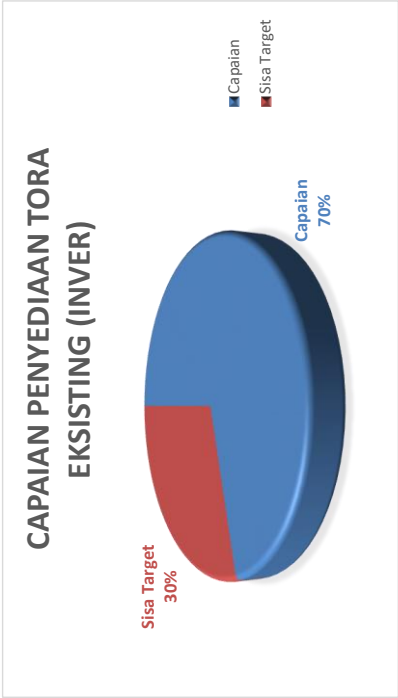
No		Kriteria	Luas Peta Indikator PPTPKH REVISI II	Target 2015-2024	Progres Capaian Tahun								
					2019						2020		
					2015	2016	2017	2018	RTRW*	Add IUPHHK	Perubahan Batas (APL)	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan Trans
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Non-Eksisting (Non-Inver)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	488.101	0	341.731	33.392	54.235	0	0	0			
2		Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.128.634	0	0	0	938.878	0	0	0			
3		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.492	0	0	0	39.229	0	0	0	0		
		Jumlah non eksisting	1.677.227	2.059.000	0	341.731	33.392	1.032.342	0	0	0		
4	Eksisting (Inver)	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	422.315	0	41.367	9.342	213.870	0	0	0		2.772	
5		Permukiman fasos dan fasum	657.846	0		0							
6		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat		360.000	0		0						
7		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	2.313.841	590.000	0	307.516	0	-	296.061	34.134	19.778	70.184	
		Jumlah eksisting	3.394.002	2.080.000	0	348.883	9.342	213.870	296.061	34.134	19.778	70.184	2.772
		TARGET IKU	5.071.229	4.139.000		10%	30%	40%			340.000		46.500
		REALISASI (APL) PERTAHUN		0	690.614	42.734	268.105				349.973		72.956
		REALISASI (APL) AKUMULASI		0	690.614	733.348	1.001.453				1.351.426		1.424.382
		PROGRES (APL+KH) AKUMULASI		0	690.614	733.348	1.979.560				2.329.533		2.402.489
		Persen Capaian Progres		0%	17%	18%	48%				56%		58%

TABEL III.4. PERKEMBANGAN PENYEDIAAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) Lanjutan

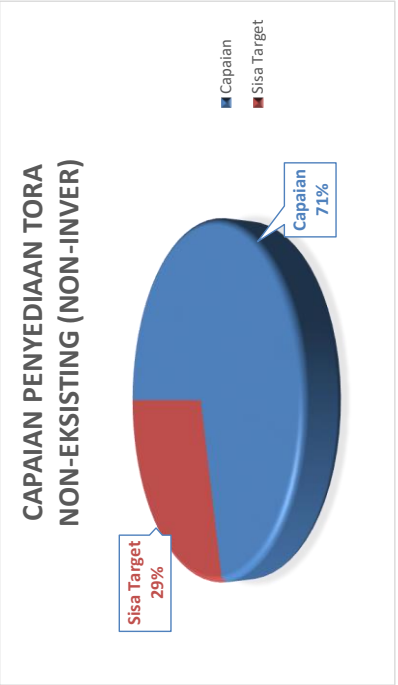
				Progres Capaian Tahun							
				2021			2022				
No	Kriteria	Luas Peta Indikator PPTPKH REVISI II	Target 2015-2024	RTRW Sulawesi Tengah	Perubahan Batas (APL)	SK Pelepasan dari HPK Tidak Produktif	Penataan Batas KH Reguler	Perubahan Batas (APL)	Penegasan Trans	Penataan Batas KH Reguler	
1	2	3	4	14	15	16	17	18	19	20	
1	Non-Eksisting (Non-Inver)	Alokasi TORA dari 20% Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan	488.101	430.000							
2		Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) berhutan tidak produktif	1.128.634	1.590.000			696				
3		Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru	60.492	39.000							
		Jumlah non eksisting	1.677.227	2.059.000			696				
4	Eksisting (Inver)	Permukiman Transmigrasi beserta fasos-fasumnya yang sudah memperoleh persetujuan prinsip	422.315	490.000					1.543		
5		Permukiman fasos dan fasum	657.846	640.000							
6		Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat		360.000	21.558	37.755		35.077	66.266		31.679
7		Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat	2.313.841	590.000							
		Jumlah eksisting	3.394.002	2.080.000	21.558	37.755		35.077	66.266	31.679	
		TARGET IKU	5.071.229	4.139.000				184.400		94.756	
		REALISASI (APL) PERTAHUN						95.085		99.487,70	
		REALISASI (APL) AKUMULASI						1.519.467		1.618.955	
		PROGRES (APL+KH) AKUMULASI						2.496.879		2.596.366	
		Persen Capaian Progres						60%		63%	

TABEL III.4. PERKEMBANGAN PENYEDIAAN TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA) Lanjutan

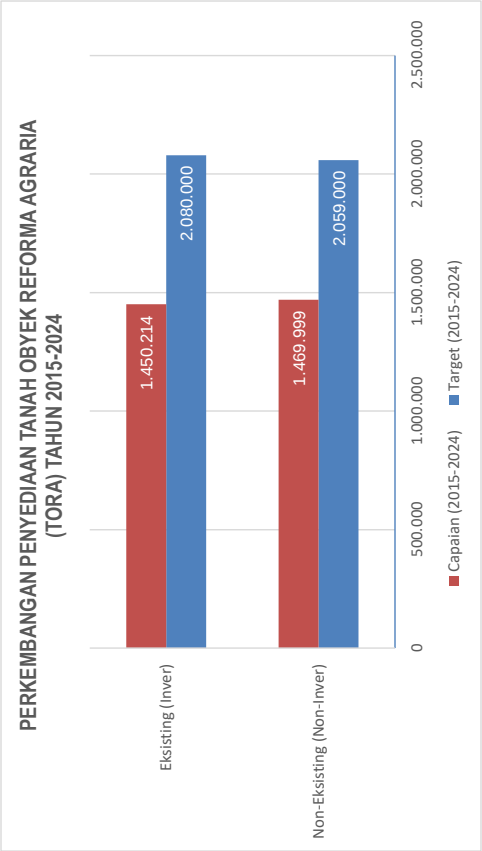
No	Kriteria	Luas Peta Indikatif PPTPKH REVISI II	Target 2015-2024	Progres Capaian Tahun								Total 2015- 2024	Persen Capaian Dari Target	SISA TARGET
				2023										
				Update 20% dari Pelepasan KH	Penegasa n Trans	RTRW	Peruba- han Batas (APL)	SK Pencada ngan HPK TP	SK Pelepa- san dari HPK Tidak Produktif	Persetujuan PB PPTKH				
1	2	3	4	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Non- Eksisting (Non-Inver)	488.101	430.000	58.724						0	488.082	114%	0	
2		1.128.634	1.590.000					3.810	965	0	942.688	59%	647.312	
3		60.492	39.000							0	39.229	101%	0	
		1.677.227	2.059.000	58.724		0	0	3.810	965	0	1.469.999	71%	29%	
4	Eksisting (Inver)	422.315	490.000		2.495						271.390	55%	218.610	
5		657.846	640.000											
6			360.000											
7		2.313.841	590.000			4.209	103.515,20				151.093	1.178.824	74%	411.176
	Jumlah eksisting	3.394.002	2.080.000		2.495	4.209	103.515			151.093	1.450.214	70%	30%	
	TARGET IKU	5.071.229	4.139.000							126.268,63				
	REALISASI (APL) PERTAHUN									169.907,90				
	REALISASI (APL) AKUMULASI									1.788.863				
	PROGRES (APL+KH) AKUMULASI									2.916.403	2.920.213		1.277.098	
	Persentase Capaian Progres									70%	71%		30%	



Gambar 35. Diagram Capaian Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (Eksisting/Inver)



Gambar 36. Diagram Capaian Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (Non-Eksisting/Non-Inver)



Gambar 37. Grafik Perkembangan Penyediaan Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Tahun 2015-2024

PERUBAHAN FUNGSI DAN PERUNTUKAN KAWASAN HUTAN

DATA DAN INFORMASI

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2023

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

1) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Hutan Produktif Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	180,00	-	-	-	-	-	180,00
3	Sumatera Barat	29.486,00	-	-	-	-	-	29.486,00
4	Riau	133.238,00	-	-	-	-	-	133.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	10,26	-	10,26
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	15.269,75	-	-	-	-	-	15.269,75
21	Kalimantan Tengah	84.948,00	12.224,00	34.645,00	97.830,98	111.190,00	22.495	363.332,98
22	Kalimantan Timur	53.760,00	-	-	-	-	-	53.760,00
23	Kalimantan Selatan	38.630,00	11.656,00	-	3.865	-	-	54.151,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	17.555,00	-	-	-	-	-	17.555,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	1.905,00	-	-	13.900,00	-	15.805,00
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	2.860,00	-	-	-	-	-	2.860,00
33	Papua	324.681,00	-	-	-	-	-	324.681,00
34	Papua Barat	4.076,00	-	-	-	-	-	4.076,00
JUMLAH		704.683,75	25.785,00	34.645,00	101.695,98	125.100,26	22.495,00	1.014.404,99

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Oktober 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

2) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) MENJADI Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	21.750,00	-	-	-	-	-	21.750,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	79,75	-	-	-	-	-	79,75
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	49.400,00	-	-	-	-	-	49.400,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	143	-	143,00
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	6.572,00	-	-	-	-	-	6.572,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		77.801,75	-	-	-	143,00	-	77.944,75

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

3) Perkembangan Perubahan Fungsi Antar Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	5.749,59	-	-	-	-	-	5.749,59
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	28.238,00	-	-	-	-	-	28.238,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	27.625,50	-	-	-	-	-	27.625,50
7	Bengkulu	-	87,00	-	-	-	-	87,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	18.677,75	-	-	-	-	-	18.677,75
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	6,50	-	-	-	-	-	6,50
15	D.I. Yogyakarta	283,58	-	-	-	-	-	283,58
16	Jawa Timur	-	-	214,12	-	-	-	214,12
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	71.645,64	-	-	-	31.200,15	-	102.845,79
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	300.040,00	-	-	-	-	-	300.040,00
22	Kalimantan Timur	61.850,00	-	-	-	-	-	61.850,00
23	Kalimantan Selatan	7.563,60	1.239,00	-	-	-	-	8.802,60
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	27.274,63	-	-	-	-	-	27.274,63
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	15.381,90	263,00	-	-	-	-	15.644,90
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	15,00	-	-	-	-	-	15,00
34	Papua Barat	-	1.396,00	-	-	-	-	1.396,00
JUMLAH		564.351,69	2.985,00	214,12	-	31.200,15	-	598.750,96

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

4) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	490,00	-	-	-	-	-	490,00
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	4.158,00	-	-	75,35	-	-	4.233,35
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	28.339,89	-	-	-	-	-	28.339,89
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	171,00	-	-	-	-	171,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	575,00	-	-	-	-	575,00
JUMLAH		32.987,89	746,00	-	75,35	-	-	33.809,24

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

5) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonservasi (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	169,95	-	-	-	-	-	169,95
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	25,00	-	-	-	-	-	25,00
23	Kalimantan Selatan	465,00	-	-	-	-	-	465,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		659,95	-	-	-	-	-	659,95

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

6) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	3.738,00	-	-	-	-	-	3.738,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	285,55	-	-	-	-	-	285,55
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		4.023,55	-	-	-	-	-	4.023,55

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

7) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Konservasi (KK) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	9.477,00	-	-	-	-	-	9.477,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	341,55	-	-	-	-	-	341,55
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		9.818,55	-	-	-	-	-	9.818,55

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

8) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	386,50	-	-	-	-	-	386,50
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	40,84	-	-	-	-	40,84
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	356	356,00
33	Papua	103,00	404,00	-	-	-	-	507,00
34	Papua Barat	271,00	-	197,00	-	-	-	468,00
JUMLAH		760,50	444,84	197,00	-	-	356,00	1.758,34

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

9) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	12.150,00	-	-	-	-	-	12.150,00
4	Riau	49.700,00	-	-	-	-	-	49.700,00
5	Kepulauan Riau	3.902,00	50,00	-	-	-	-	3.952,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	2.988,00	-	-	-	-	2.988,00
22	Kalimantan Timur	1.820,00	-	-	-	-	-	1.820,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	18.445,00	-	-	-	-	-	18.445,00
30	Sulawesi Barat	9.125,00	-	-	-	-	-	9.125,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.856,00	-	-	-	-	-	2.856,00
JUMLAH		97.998,00	3.038,00	-	-	-	-	101.036,00

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

10) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	5.920,00	-	-	-	-	-	5.920,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	61.747,00	-	-	-	-	2.439	64.186,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	3.221,00	-	-	-	-	-	3.221,00
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		70.888,00	-	-	-	-	2.439,00	73.327,00

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

11) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	800,00	-	3.711,00	-	-	-	4.511,00
3	Sumatera Barat	9.840,00	-	-	-	-	-	9.840,00
4	Riau	6.000,00	-	-	-	-	-	6.000,00
5	Kepulauan Riau	-	-	9,20	-	-	-	9,20
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	29.924,85	-	-	-	-	-	29.924,85
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	76.793,00	-	-	-	-	-	76.793,00
22	Kalimantan Timur	-	-	41.358,70	-	-	-	41.358,70
23	Kalimantan Selatan	14.033,57	-	-	-	-	-	14.033,57
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	405,00	-	405,00
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	64,00	-	-	-	-	-	64,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.915,00	-	-	-	-	-	3.915,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	2.436,00	-	-	-	-	-	2.436,00
JUMLAH		143.806,42	-	45.078,90	-	405,00	-	189.290,32

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

12) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	1.200,00	-	-	-	-	-	1.200,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	59.120,00	-	-	-	-	-	59.120,00
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		60.320,00	-	-	-	-	-	60.320,00

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

13) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Ball	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	11.595,00	-	-	-	-	-	11.595,00
23	Kalimantan Selatan	66.000,00	-	-	-	-	-	66.000,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		77.595,00	-	-	-	-	-	77.595,00

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

14) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	43.100,00	-	-	-	-	-	43.100,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	3.242,00	-	-	-	-	-	3.242,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	25.560,00	-	-	-	-	-	25.560,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	24.804,80	-	-	-	-	-	24.804,80
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	617,00	-	-	-	-	-	617,00
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	352,62	-	-	-	-	-	352,62
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	600.250,00	-	-	-	-	4.609	604.859,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	11.759,00	-	-	-	-	-	11.759,00
28	Sulawesi Selatan	10.355,00	-	-	-	-	-	10.355,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6.075,00	-	-	-	-	-	6.075,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		726.115,42	-	-	-	-	4.609,00	730.724,42

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

15) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Lindung (HL)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	3.528,00	-	-	-	3.528,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	14.780,00	-	-	-	-	-	14.780,00
5	Kepulauan Riau	12.950,00	-	-	-	-	-	12.950,00
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	133.075,00	-	-	-	-	-	133.075,00
22	Kalimantan Timur	31.685,00	-	-	-	-	-	31.685,00
23	Kalimantan Selatan	5.900,00	-	-	-	-	-	5.900,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		198.390,00	-	3.528,00	-	-	-	201.918,00

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

16) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	213.221,00	-	-	-	-	-	213.221,00
3	Sumatera Barat	11.148,00	-	-	-	-	-	11.148,00
4	Riau	194.440,00	-	-	-	-	-	194.440,00
5	Kepulauan Riau	342,82	-	-	-	-	-	342,82
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.710,00	-	-	-	-	-	2.710,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	20.160,00	-	-	-	-	-	20.160,00
22	Kalimantan Timur	77.010,00	-	-	-	-	-	77.010,00
23	Kalimantan Selatan	31.790,00	-	-	-	-	-	31.790,00
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		550.821,82	-	-	-	-	-	550.821,82

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

17) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	SID TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	14.747,00	-	9.571,00	-	-	-	24.318,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	13.388,00	-	-	-	-	-	13.388,00
5	Kepulauan Riau	-	144,00	361,80	-	-	-	505,80
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	-	-
22	Kalimantan Timur	-	-	46,48	-	-	-	46,48
23	Kalimantan Selatan	1.218,43	-	-	-	-	-	1.218,43
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	234,50	-	-	-	-	-	234,50
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	3.200,00	-	-	-	-	-	3.200,00
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	669,00	-	669,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	1.030,00	-	-	-	-	-	1.030,00
JUMLAH		33.817,93	144,00	9.979,28	-	-	669,00	44.610,21

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1. PERUBAHAN FUNGSI

18) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	SID TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	6.163,75	-	-	-	-	-	6.163,75
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	137.376,00	-	-	-	-	-	137.376,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	20.700,00	-	-	-	-	-	20.700,00
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	41.025,56	-	-	-	-	-	41.025,56
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-	-	-
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	649,00	-	-	-	-	1.821	2.470,00
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-	-	-
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	6.208,00	-	6.208,00
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	193,00	-	-	-	-	-	193,00
28	Sulawesi Selatan	145,00	-	-	-	-	-	145,00
29	Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	7.650,00	-	-	-	-	-	7.650,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		213.902,31	-	-	-	6.208,00	1.821,00	221.931,31

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

19) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) Menjadi Hutan Produksi Terbatas (HPT)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	20.290,00	-	-	-	-	-	20.290,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	55,00	-	-	-	-	-	55,00
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	2.958,00	-	-	-	-	-	2.958,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	48.021,12	-	-	-	-	-	48.021,12
21	Kalimantan Tengah	53.125,00	-	-	-	-	-	53.125,00
22	Kalimantan Timur	59.285,00	-	-	-	-	-	59.285,00
23	Kalimantan Selatan	56.007,21	-	-	-	-	-	56.007,21
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	1.260,71	-	-	-	-	-	1.260,71
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	1.962,75	-	-	4.033,00	-	-	5.995,75
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	6.549,76	-	5.435,00	-	-	-	11.984,76
33	Papua	44.599,00	-	-	-	-	-	44.599,00
34	Papua Barat	1.137,00	-	37,00	-	-	-	1.174,00
JUMLAH		295.250,55	-	5.472,00	4.033,00	-	-	304.755,55

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

20) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Lindung (HL) menjadi Hutan Produksi Tetap (HP)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	2.725,00	-	-	-	-	-	2.725,00
2	Sumatera Utara	-	-	-	-	-	-	-
3	Sumatera Barat	170,40	-	-	-	-	-	170,40
4	Riau	-	-	-	-	-	-	-
5	Kepulauan Riau	6.351,22	-	-	-	-	-	6.351,22
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	583,00	-	-	-	-	-	583,00
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	60,00	-	60,00
10	Lampung	102,00	-	-	-	-	-	102,00
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	5.170,00	-	-	-	-	-	5.170,00
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	-	-	-	-	11,66	-	11,66
15	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-
16	Jawa Timur	1.959,30	-	-	-	-	-	1.959,30
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3.155,00	-	-	-	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	-	-	-	-	-	-
21	Kalimantan Tengah	8.750,00	-	-	-	-	-	8.750,00
22	Kalimantan Timur	2.460,00	-	-	-	-	-	2.460,00
23	Kalimantan Selatan	11.926,54	-	-	-	-	-	11.926,54
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	1.983,00	-	1.983,00
27	Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-	-	-
28	Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-	-	-
29	Sulawesi Tenggara	295,40	-	-	-	-	-	295,40
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-
33	Papua	83.185,00	-	-	-	-	10.776	10.776,00
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	83.185,00
JUMLAH		126.832,86	-	-	-	2.054,66	10.776,00	139.663,52

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

TABEL IV.1.1. PERUBAHAN FUNGSI

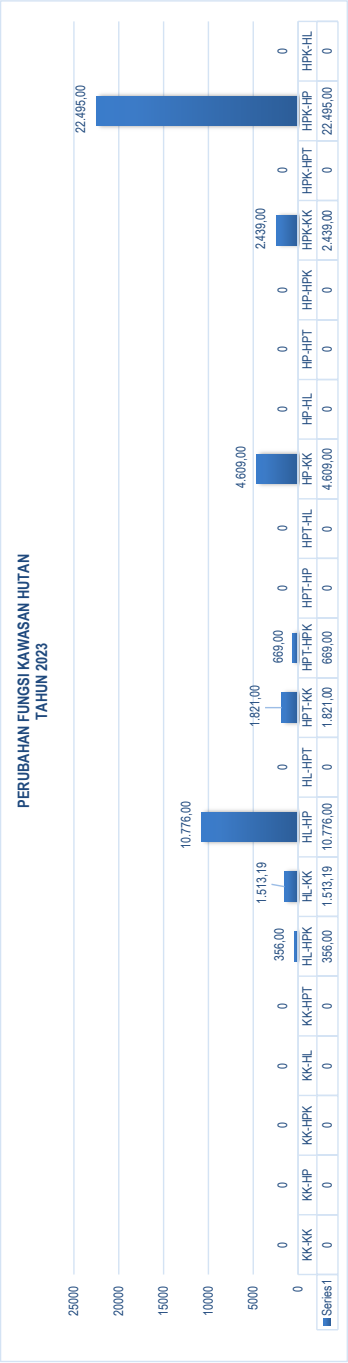
21) Perkembangan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Lindung (HL) menjadi Kawasan Konservasi (KK)

NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018 (ha)	TAHUN 2019 (ha)	TAHUN 2020 (ha)	TAHUN 2021 (ha)	TAHUN 2022 (ha)	TAHUN 2023 (ha)	S/D TAHUN 2023 (ha)
1	NAD	-	-	-	-	-	-	-
2	Sumatera Utara	70.755,00	-	-	-	-	-	70.755,00
3	Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-
4	Riau	40.390,00	-	-	-	-	-	40.390,00
5	Kepulauan Riau	-	-	-	-	-	-	-
6	Jambi	-	-	-	-	-	-	-
7	Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-
8	Kep. Bangka belitung	-	-	-	-	-	-	-
9	Sumatera selatan	-	-	-	-	-	-	-
10	Lampung	-	-	-	-	-	-	-
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	32.685,70	-	-	-	-	-	32.685,70
13	Banten	-	-	-	-	-	-	-
14	Jawa Tengah	11.075,56	-	-	-	-	-	11.075,56
15	D.I. Yogyakarta	1.000,66	-	-	-	-	-	1.000,66
16	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	3.155,00	-	-	-	-	-	3.155,00
19	Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-	-	-
20	Kalimantan Barat	-	3.923,00	-	-	-	-	3.923,00
21	Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-	1.513	1.513,19
22	Kalimantan Timur	-	-	-	-	-	-	-
23	Kalimantan Selatan	6.514,95	-	-	-	-	-	6.514,95
24	Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
25	Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
26	Sulawesi Utara	-	-	-	-	-	-	-
27	Sulawesi Tengah	10.659,00	-	-	-	-	-	10.659,00
28	Sulawesi Selatan	22.063,10	-	-	-	-	-	22.063,10
29	Sulawesi Tenggara	4.000,00	-	-	-	-	-	4.000,00
30	Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
31	Maluku	-	-	-	-	-	-	-
32	Maluku Utara	153.575,00	-	-	-	-	-	153.575,00
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH		355.873,97	3.923,00	-	-	-	1.513,19	361.310,16

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

Keterangan :

- : Nihil/Tidak ada kegiatan



Gambar 38. Grafik Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Indonesia pada Tahun 2023

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d November 2023

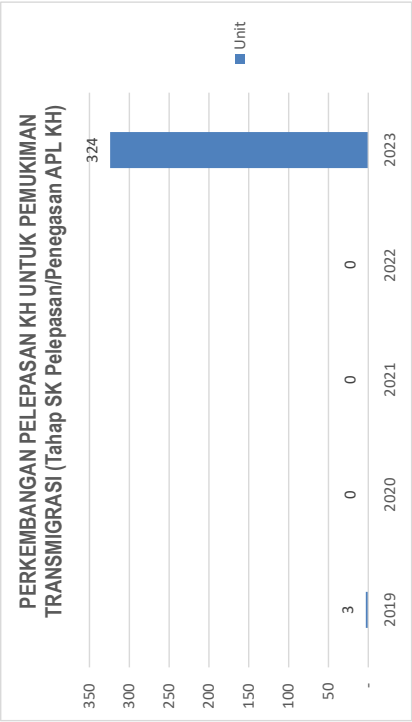
TABEL IV.2. PERKEMBANGAN PELEPASAN KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN TRANSMIGRASI (TAHAP SK PELEPASAN /PENEKASAN APL KAWASAN HUTAN)

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		SID TAHUN 2022		TAHUN 2023*		SID TAHUN 2023	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	15	16	13	14	15	16
1	Aceh	12	39.376,65	-	-	-	-	-	-	-	-	12	39.376,65	13	12132	25	51.508,95
2	Sumatera Utara	14	29.449,00	-	-	-	-	-	-	-	-	12	28.054,00	9	6733	21	34.787,00
3	Sumatera Barat	12	18.733,60	-	-	-	-	-	-	-	-	11	18.334,60	7	5062	18	23.396,60
4	Riau	15	76.163,98	-	-	-	-	-	-	-	-	12	68.812,98	3	7351	15	76.163,98
5	Jambi	14	78.412,53	-	-	-	-	-	-	-	-	14	78.412,53	1	985	15	79.397,03
6	Sumatera Selatan	33	122.140,80	-	-	-	-	-	-	-	-	33	122.140,80	8	11234	41	133.374,80
7	Bengkulu	5	14.327,45	-	-	-	-	-	-	-	-	5	14.327,45	4	2679	9	17.006,45
8	Lampung	16	134.147,20	-	-	-	-	-	-	-	-	16	134.147,20	4	4459	20	138.606,20
9	Kep. Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2468	1	2.468,00
10	Kepulauan Riau	3	8.701,50	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7.530,00	1	1172	3	8.701,50
11	DKI Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Jawa Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	D.I. Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Bali	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Nusa Tenggara Barat	4	4.788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.950,00	9	7487	11	10.437,05
19	Nusa Tenggara Timur	4	2.543,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.137,00	2	1406	4	2.543,00
20	Kalimantan Barat	17	28.804,72	-	-	-	-	-	-	-	-	17	28.804,72	4	4200	21	33.004,52
21	Kalimantan Tengah	61	96.147,87	1	1.194,85	-	-	-	-	-	-	35	72.582,72	39	38214	74	110.797,19
22	Kalimantan Selatan	9	31.916,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9	31.916,00	17	15105	26	47.021,30
23	Kalimantan Timur	22	65.631,08	-	-	-	-	-	-	-	-	7	36.600,08	27	43004	34	79.603,68
24	Kalimantan Utara	2	3.291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.291,00	4	3365	6	6.656,00
25	Sulawesi Utara	1	659	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1259	2	1.259,00
26	Sulawesi Tengah	24	27.078,15	-	-	-	-	-	-	-	-	18	21.558,15	13	13313	31	34.871,54
27	Sulawesi Selatan	6	4.015,35	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4.015,35	1	540	7	4.555,74
28	Sulawesi Tenggara	35	45.867,71	-	-	-	-	-	-	-	-	21	37.035,71	21	13020	42	50.055,59
29	Gorontalo	4	5.661,30	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5.661,30	-	-	4	5.661,30
30	Sulawesi Barat	3	3.730,78	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.730,78	7	6186	10	9.916,78
31	Maluku	26	27.117,58	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.664,58	28	24389	31	30.053,58

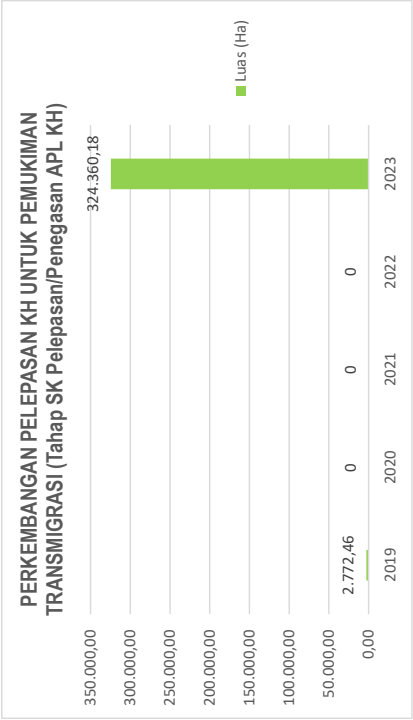
NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023*		S/D TAHUN 2023	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Maluku Utara	27	34.816,30	2	1.577,61	-	-	-	-	-	-	14	22.288,91	16	14465
33	Papua	68	147.709,46	-	-	-	-	-	-	-	-	17	92.532,46	52	56317
34	Papua Barat	39	44.212,74	-	-	-	-	-	-	-	-	8	16.397,74	31	27815
JUMLAH		476	1.095.442,75	3	2.772,46	-	0,00	-	0,00	0,00	897.302,71	324	324.360,18	609	1.221.662,89

Sumber : Direktorat Pengukuran dan Penatagunaan Kawasan Hutan 2023, Data s/d Oktober 2023

- Keterangan :
- : Nihil/Tidak ada kegiatan
 - * Seluruhnya merupakan data Penegasan APL Kawasan Hutan



Gambar 39. Grafik Unit Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi

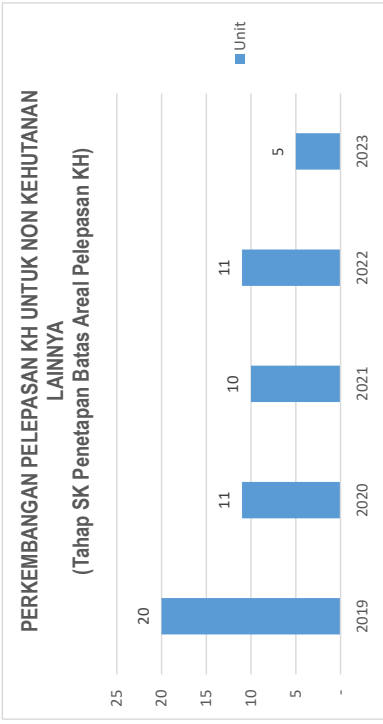


Gambar 40. Grafik Luas Perkembangan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pemukiman Transmigrasi

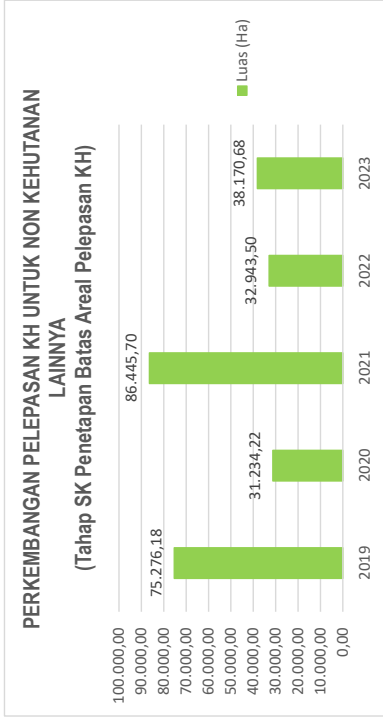
NO	PROVINSI	S/D TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		S/D TAHUN 2023	
		UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)	UNIT	LUAS (Ha)
1	2			7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
32	Maluku Utara	11	59.949,14	-	-	-	-	-	-	-	-	11	59.949,14
33	Papua	46	1.102.994,42	-	-	-	-	-	-	-	-	46	1.102.994,42
34	Papua Barat	27	460.888,86	-	-	-	-	-	-	-	-	27	460.888,86
JUMLAH		785	7.212.510,88	11	31.234,22	10	86.445,70	11	32.943,50	5	38.170,68	822	7.401.304,98

Sumber : Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Oktober 2023

Keterangan :



Gambar 41. Grafik Unit Perkembangan Pelepasan kawasan Hutan untuk Non Kehutanan Lainnya



Gambar 42. Grafik Luas Perkembangan Pelepasan kawasan Hutan untuk Non Kehutanan Lainnya

NO	PROVINSI	SID TAHUN 2018		TAHUN 2019		TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		TAHUN 2023		SID TAHUN 2023	
		Tanah Masuk	Tanah Keluar	Tanah Masuk	Tanah Keluar	Tanah Masuk	Tanah Keluar	Tanah Masuk	Tanah Keluar	Tanah Masuk	Tanah Keluar	Tanah Masuk	Tanah Keluar	Tanah Masuk	Tanah Keluar
		Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)	Unit	Luas (ha)
33	Papua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	82	46.298,86	79	38.021,03	7	29.433,89	7	28.140,11	2	29.162,00	2	25.384,78	12	107.799,52
										17	92.413,53	28	125.233,00	31	143.645,14

Sumber : *Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan s.d Oktober 2023*

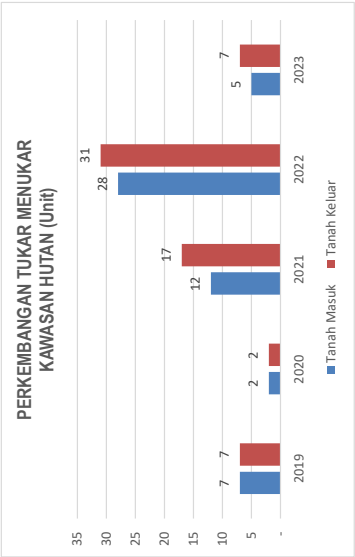
Ket :

TM : Tanah Masuk / *Compensated area for forest*

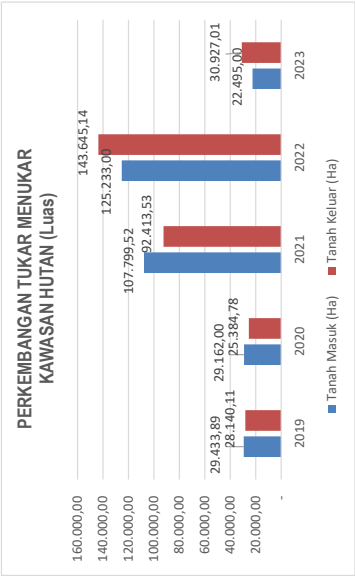
TK : Tanah Keluar / *Converted forest area for non forest*

- : Nihil/Tidak ada kegiatan

*) : Perubahan terjadi karena ada hasil pencermatan proses TMKH dan Pelepasan Kawasan Hutan (termasuk proses pelepasan sesuai mekanisme PP 60 Tahun 2012 dan Pasal 51 PP 104 Tahun 2015)



Gambar 43. Grafik Unit Perkembangan Tukar Menukar Kawasan Hutan



Gambar 44. Grafik Luas Perkembangan Tukar Menukar Kawasan Hutan

PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN

DATA DAN INFORMASI

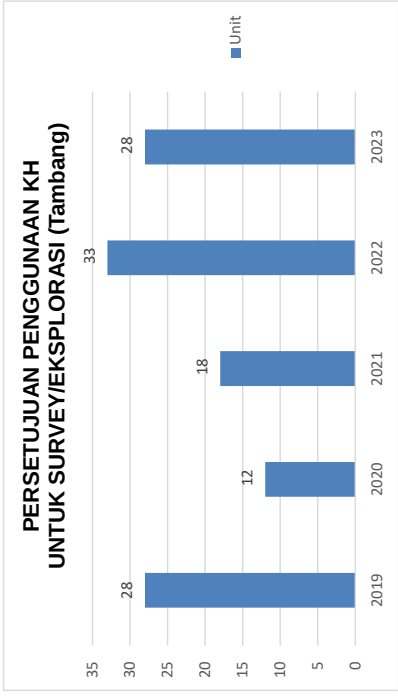
Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2023

TABEL V.1. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK SURVEY/EKSPLORASI (TAMBAH)

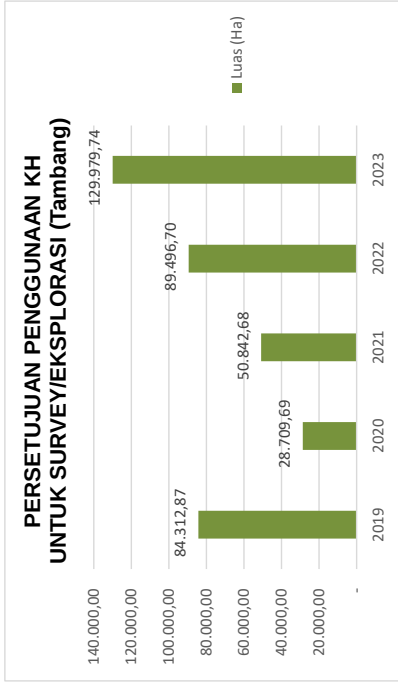
NO	PROVINSI	SID 2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	PAPUA PEGUNUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7,67	2	7,67
TOTAL		675	4.493.667,17	28	84.312,87	12	28.709,69	18	50.842,68	33	89.496,70	28	129.979,74	794	4.877.008,85

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pijinan Pakai Kawasan Hutan

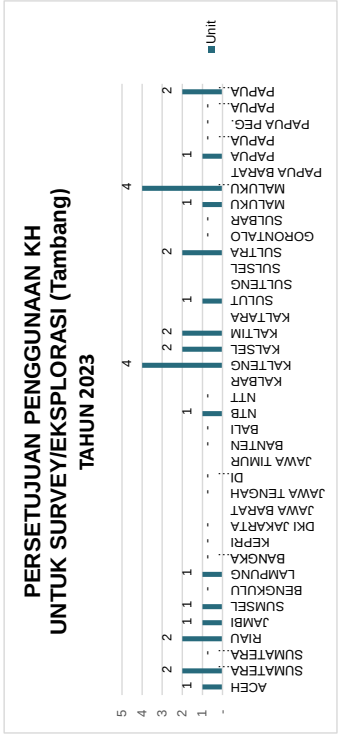
Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data SID 31 Oktober 2023



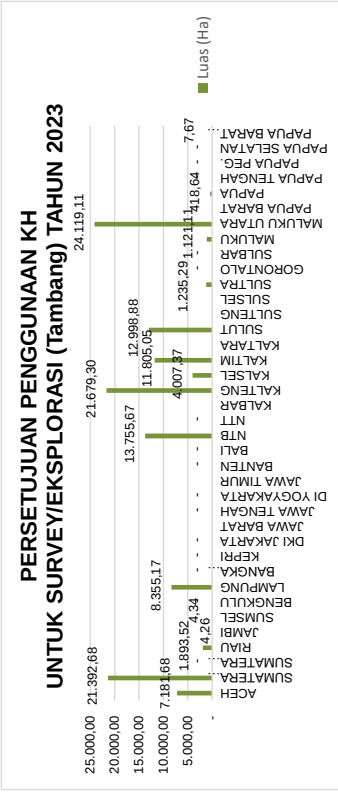
Gambar 45. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Tambang)



Gambar 46. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Tambang)



Gambar 47. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Tambang) per Provinsi Tahun 2023

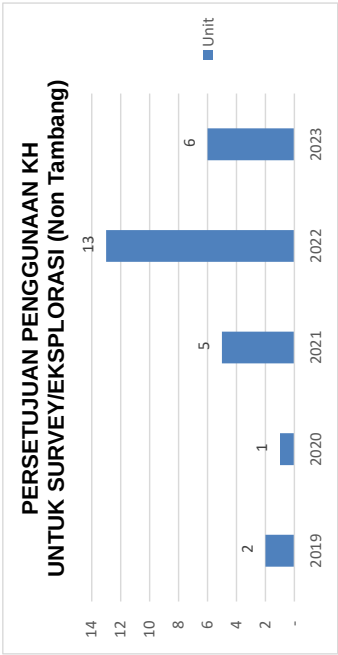


Gambar 48. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Tambang) per Provinsi Tahun 2023

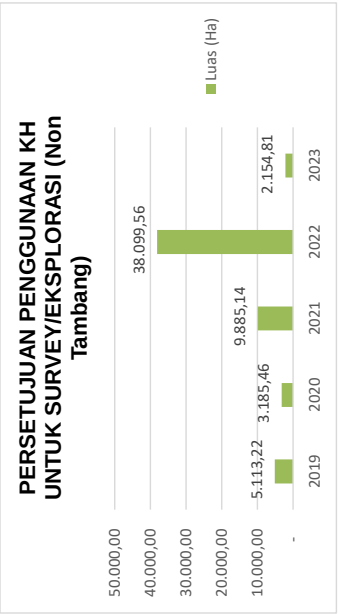
NO	PROVINSI	SID 2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		19	27.811,15	2	5.113,22	1	3.185,46	5	9.885,14	13	38.099,56	6	2.154,81	46	86.249,34

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

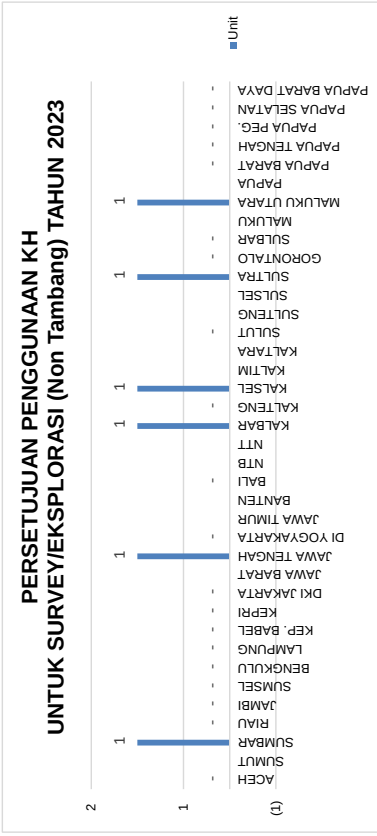
Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Oktober 2023



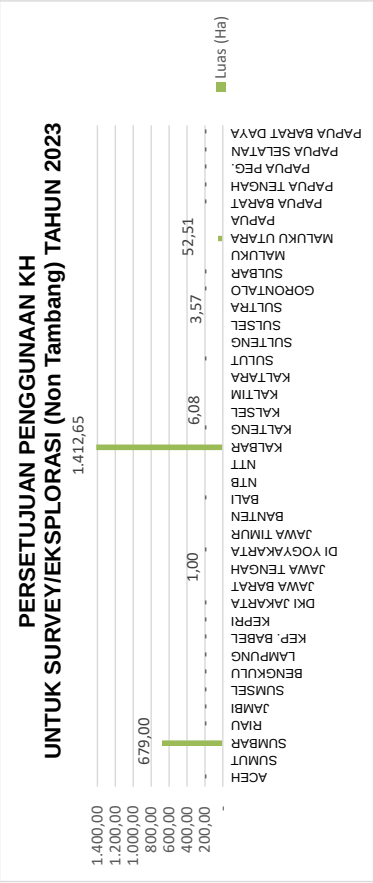
Gambar 49. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang)



Gambar 50. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang)



Gambar 51. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang) per Provinsi Tahun 2023

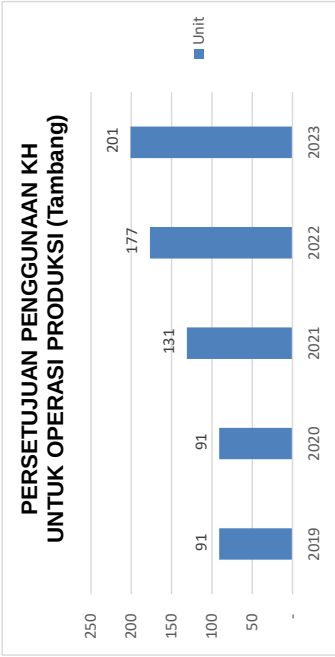


Gambar 52. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Survey/Eksplorasi (Non Tambang) per Provinsi Tahun 2023

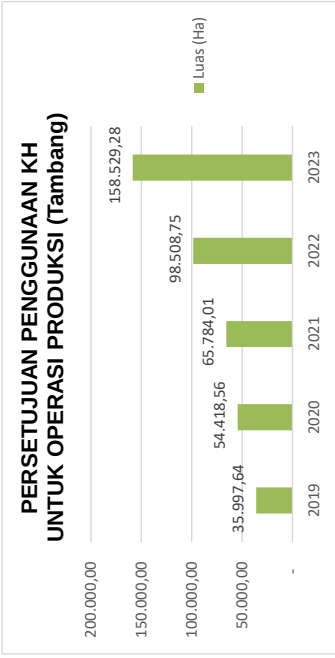
NO	PROVINSI	S/D 2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
36	PAPUA PEGUNGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10,70	2	10,70
TOTAL		421	223.617,14	91	35.997,64	91	54.418,56	131	65.784,01	177	98.508,75	201	158.529,28	1.112	636.855,38

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

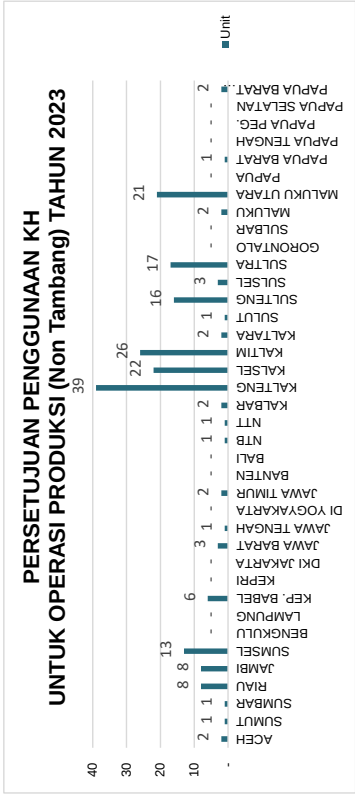
Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data SD 31 Oktober 2023



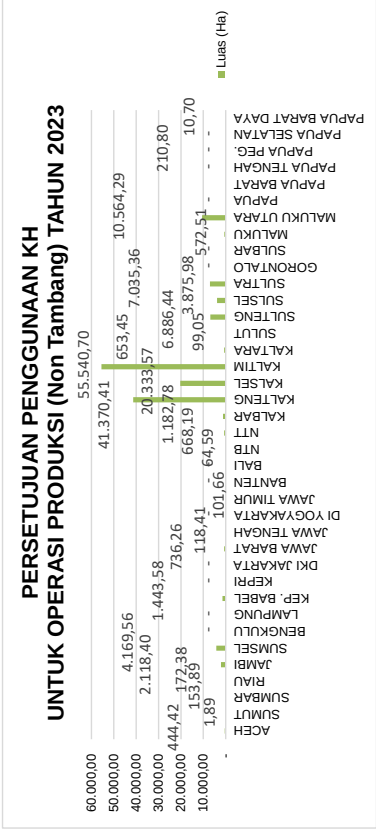
Gambar 53. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Operasi Produksi (Non Tambang)



Gambar 54. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Operasi Produksi (Non Tambang)



Gambar 55. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Operasi Produksi (Non Tambang) per Provinsi Tahun 2023

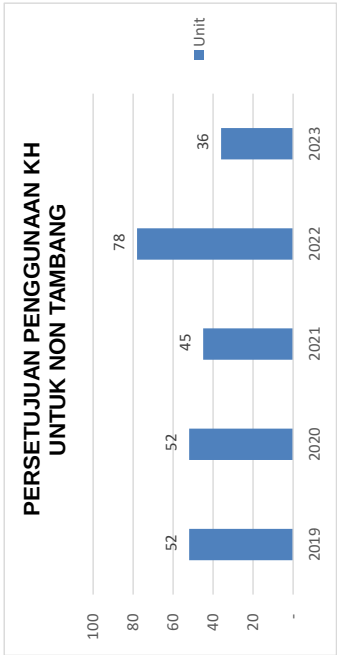


Gambar 56. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Operasi Produksi (Non Tambang) per Provinsi Tahun 2023

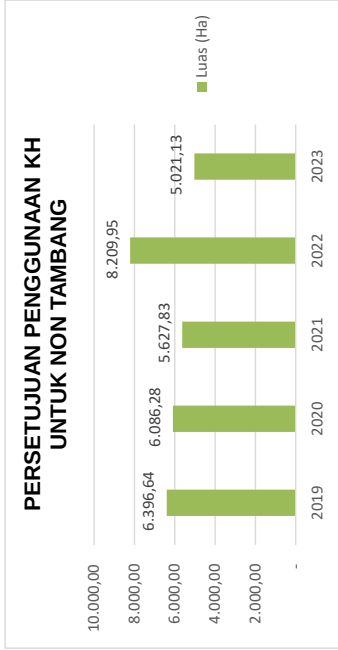
NO	PROVINSI	SID 2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL (Ha)	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
37	PAPUA SELATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PAPUA BARAT DAYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	332	57.725,06	52	6.396,64	52	6.086,28	45	5.627,83	78	8.209,95	36	5.021,13	595	89.066,88

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

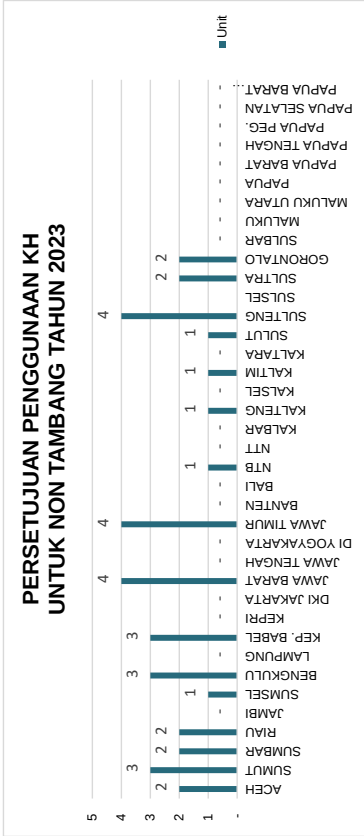
Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data SD 31 Oktober 2023



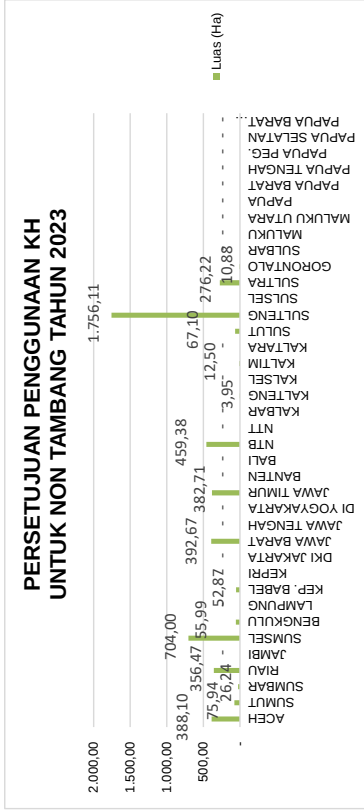
Gambar 57. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Non Tambang



Gambar 58. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Non Tambang



Gambar 59. Grafik Unit Persetujuan Penggunaan KH untuk Non Tambang per Provinsi Tahun 2023



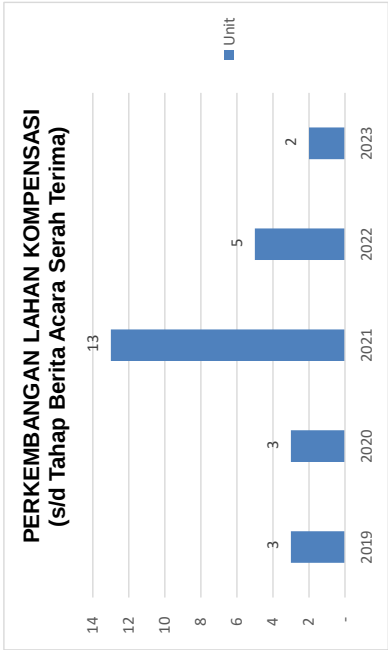
Gambar 60. Grafik Luas Persetujuan Penggunaan KH untuk Non Tambang per Provinsi Tahun 2023

TABEL V.5 PERKEMBANGAN LAHAN KOMPENSASI (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima)

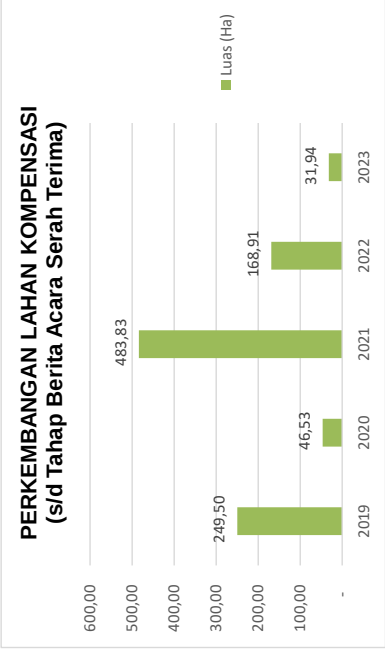
No.	PROVINSI	S/D 2018		2019		2020		2021		2022		2023		TOTAL	
		Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas	Unit	Luas
1	BALI	1	7,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7,50
2	BANTEN	1	12,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12,01
3	DKI JAKARTA	2	4,18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5,87	3	10,04
4	JAWA BARAT	71	7.214,32	2	39,51	3	46,53	2	24,30	2	41,90	1	26,07	81	7.392,62
5	JAWA TENGAH	37	1.779,03	-	-	-	-	5	84,39	-	-	-	-	42	1.863,42
6	JAWA TIMUR	45	3.942,46	-	-	-	-	5	274,75	1	53,09	-	-	51	4.270,30
7	LAMPUNG	9	355,96	1	209,99	-	-	1	100,40	2	73,92	-	-	13	740,27
8	SUMATERA UTARA	1	104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	104,00
Grand Total		167	13.419,46	3	249,50	3	46,53	13	483,83	5	168,91	2	31,94	193	14.400,17

Catatan : Rincian izin-izin tahun sebelumnya masih dapat berubah karena adanya Penetapan Areal Kerja, Perubahan dan atau Perpanjangan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Data S/D 31 Oktober 2023



Gambar 61. Grafik Unit Lahan Kompensasi (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima)

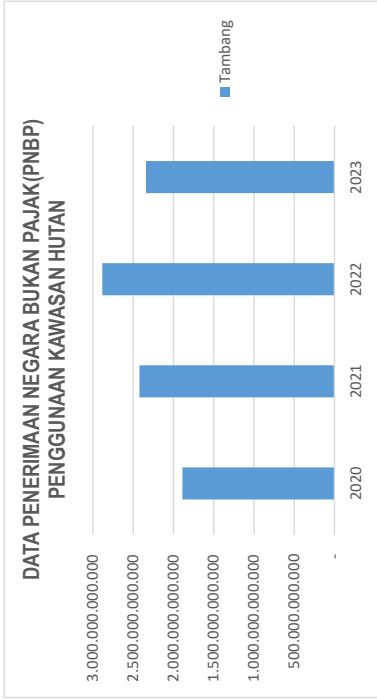


Gambar 62. Grafik Luas Lahan Kompensasi (s/d Tahap Berita Acara Serah Terima)

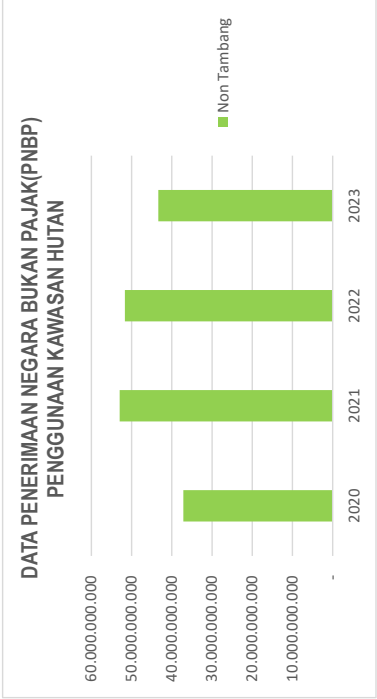
TABEL V.6. DATA PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN (PKH) PER PROVINSI

No	Provinsi	Tahun 2020				Tahun 2021				Tahun 2022				Tahun 2023			
		TAMBAH	NON TAMBAH	TOTAL (Rp.)	TAMBAH	NON TAMBAH	TOTAL (Rp.)	TAMBAH	NON TAMBAH	TOTAL (Rp.)	TAMBAH	NON TAMBAH	TOTAL (Rp.)	TAMBAH	NON TAMBAH	TOTAL (Rp.)	
1	Aceh	712.250.000	189.804.000	902.054.000	-	189.804.000	189.804.000	-	189.804.000	189.804.000	-	189.804.000	-	189.804.000	-	189.804.000	
2	Banten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.504.000	-	1.504.000	-	20.304.000	
3	Bengkulu	3.610.140.861	725.614.342	4.335.755.203	6.343.942.150	1.075.608.693	7.419.550.843	4.766.044.543	766.284.881	5.532.329.424	5.142.840.665	754.165.090	5.897.005.755	591.221.360	18.492.960	20.304.000	
4	Di Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	580.066.240	-	580.066.240	-	580.066.240	-	591.221.360	
5	Dki Jakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	214.056.000	-	214.056.000	-	214.056.000	-	18.492.960	
6	Gorontalo	3.099.854.343	396.048.424	3.495.902.767	1.643.024.979	423.660.000	2.065.684.979	10.443.698.300	524.935.840	10.968.634.140	8.085.338.450	628.013.516	8.713.351.966	1.649.347.330	734.626.400	734.626.400	
7	Jambi	5.060.277.897	2.232.225.831	7.292.503.728	11.811.612.732	1.790.136.000	13.601.748.732	9.882.540.150	1.736.343.296	11.618.883.446	20.621.708.714	3.004.467.520	23.626.176.234	1.649.347.330	1.651.896.784	16.564.001.728	
8	Jawa Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	382.978.176	-	382.978.176	-	382.978.176	-	456.990.528	
9	Jawa Tengah	-	-	-	-	137.130.240	137.130.240	-	-	88.063.140	-	88.063.140	-	88.063.140	-	36.128.000	
10	Jawa Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	584.081.630.677	391.605.362.752	3.112.383.712	391.605.362.752	3.112.383.712	391.605.362.752	391.641.490.752	
11	Kalimantan Barat	1.261.018.150	388.320.000	1.649.338.150	5.867.009.864	388.400.294	6.255.410.158	29.132.245.353	388.431.594	584.081.630.677	391.605.362.752	1.027.402.240	356.188.319.727	976.272.949.636	976.272.949.636	976.272.949.636	
12	Kalimantan Selatan	397.555.403.898	1.899.105	397.557.303.003	480.695.352.978	1.710.000	480.697.062.978	583.445.712.677	635.918.000	412.127.148.683	355.160.917.487	1.027.402.240	356.188.319.727	976.272.949.636	976.272.949.636	976.272.949.636	
13	Kalimantan Tengah	182.079.556.510	677.158.400	182.756.714.910	285.505.997.827	451.284.160	285.957.281.987	411.520.332.683	606.816.000	412.127.148.683	355.160.917.487	1.027.402.240	356.188.319.727	976.272.949.636	976.272.949.636	976.272.949.636	
14	Kalimantan Timur	701.772.394.193	4.088.750.753	705.861.144.946	1.025.144.230.401	16.173.051.360	1.041.317.281.761	1.073.090.742.354	4.853.233.451	1.077.943.975.805	971.682.433.478	4.590.516.158	976.272.949.636	976.272.949.636	976.272.949.636	976.272.949.636	
15	Kalimantan Utara	29.728.395.395	3.190.189.754	32.918.585.149	84.931.995.262	1.512.752.000	86.444.747.262	71.435.445.151	1.411.698.624	72.847.143.775	87.575.523.405	3.112.383.712	90.687.907.117	90.687.907.117	90.687.907.117	90.687.907.117	
16	Kepulauan Bangka Belitung	8.491.476.626	38.492.000	8.529.968.626	8.184.544.788	40.858.760	8.225.403.548	13.052.345.264	45.408.000	13.097.753.264	7.941.521.800	38.584.169	7.980.105.969	7.980.105.969	7.980.105.969	7.980.105.969	
17	Kepulauan Riau	4.528.287.020	187.915.659	4.716.202.679	5.696.020.566	187.667.546	5.883.688.112	4.750.203.880	188.769.329	4.938.973.209	2.972.887.771	249.320.780	3.222.208.551	3.222.208.551	3.222.208.551	3.222.208.551	
18	Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	23.120.000	-	23.120.000	-	23.120.000	-	23.120.000	
19	Maluku	860.765.694	19.125.176	879.890.870	798.175.000	467.137.146	1.265.312.146	902.082.324	260.568.000	1.162.650.324	1.047.793.600	257.118.400	1.304.912.000	1.304.912.000	1.304.912.000	1.304.912.000	
20	Maluku Utara	74.828.851.569	11.248.000	74.840.099.569	89.222.605.327	341.109.630	89.563.714.957	122.514.385.658	327.124.800	122.841.510.458	79.141.996.222	358.657.514	79.500.653.736	79.500.653.736	79.500.653.736	79.500.653.736	
21	Nusa Tenggara Barat	34.096.437.500	125.490.281	34.221.927.781	35.284.547.500	132.203.965	35.416.751.465	39.912.366.749	111.618.281	40.023.985.030	33.690.377.031	118.020.000	33.808.397.031	33.808.397.031	33.808.397.031	33.808.397.031	
22	Nusa Tenggara Timur	-	204.339.168	204.339.168	223.216.374	245.192.256	468.408.630	18.491.200	240.736.320	259.227.520	107.219.000	242.440.081	349.659.081	349.659.081	349.659.081	349.659.081	
23	Papua	211.796.039.279	1.799.809.200	213.595.848.479	26.171.717.619	1.497.787.120	27.669.504.739	26.171.717.619	2.649.131.701	28.820.849.320	26.682.753.981	532.398.160	27.215.152.141	27.215.152.141	27.215.152.141	27.215.152.141	
24	Papua Barat	3.342.539.201	331.896.801	3.674.436.002	3.409.560.000	-	3.409.560.000	4.656.437.500	14.883.260.800	19.539.698.300	5.557.159.450	1.383.668.932	6.950.828.382	6.950.828.382	6.950.828.382	6.950.828.382	
25	Riau	4.808.420.782	9.708.096.839	14.516.517.621	16.953.671.725	4.942.099.994	21.895.771.719	22.490.413.275	4.481.211.477	26.971.624.752	6.147.472.100	6.241.627.124	12.389.099.224	12.389.099.224	12.389.099.224	12.389.099.224	
26	Sulawesi Barat	42.124.215	356.268.000	398.392.215	18.181.820	356.268.000	374.449.820	-	-	-	-	-	40.458.000	40.458.000	40.458.000	40.458.000	
27	Sulawesi Selatan	67.616.463.272	671.782.999	68.288.246.271	81.020.753.286	584.600.550	81.605.353.836	59.199.774.544	585.635.761	59.785.410.305	24.285.389.116	1.059.285.811	25.344.674.927	25.344.674.927	25.344.674.927	25.344.674.927	
28	Sulawesi Tengah	42.877.004.443	2.499.442.273	45.376.446.716	64.607.632.474	1.258.415.794	65.866.048.268	63.359.248.985	2.263.404.034	65.622.653.019	63.894.747.850	763.415.395	64.658.163.245	64.658.163.245	64.658.163.245	64.658.163.245	
29	Sulawesi Tenggara	60.639.389.516	235.605.209	60.874.994.725	71.518.228.811	184.908.954	71.703.137.765	152.439.516.453	243.838.550	152.683.355.003	128.208.783.756	179.184.720	128.387.968.476	128.387.968.476	128.387.968.476	128.387.968.476	
30	Sulawesi Utara	5.955.516.830	829.937.750	6.785.454.580	6.114.496.062	981.252.160	7.095.748.222	13.664.855.288	850.017.750	14.514.873.038	11.389.070.086	994.319.637	12.383.389.723	12.383.389.723	12.383.389.723	12.383.389.723	

No	Provinsi	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
		TAMBAH	NON TAMBAH	TOTAL (Rp.)	TAMBAH	NON TAMBAH	TOTAL (Rp.)	TAMBAH	NON TAMBAH	TOTAL (Rp.)	TAMBAH	NON TAMBAH	TOTAL (Rp.)
31	Sumatera Barat	3.238.095.277	203.568.000	3.441.663.277	2.123.968.842	556.524.288	2.680.493.130	11.987.640.950	766.318.825	12.753.959.775	3.249.454.200	457.644.080	3.707.098.280
32	Sumatera Selatan	37.592.957.798	5.170.766.870	42.763.724.668	105.747.798.088	16.174.205.172	121.922.003.240	152.915.918.923	7.916.492.963	160.832.411.886	88.663.107.257	8.598.145.241	97.261.252.498
33	Sumatera Utara	3.295.565.824	2.838.388.844	6.133.954.668	2.888.122.245	2.853.188.753	5.741.310.998	1.604.010.750	3.221.230.530	4.825.241.280	1.687.946.750	3.554.229.685	5.242.176.435
TOTAL		1.888.889.226.091	37.122.183.678	1.926.011.409.769	2.421.926.406.700	52.946.956.835	2.474.873.363.535	2.883.356.170.576	51.670.275.563	2.935.026.446.139	2.340.881.981.721	43.334.231.727	2.384.216.213.448



Gambar 63. Grafik Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (Tambah)



Gambar 64. Grafik Data Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Penggunaan Kawasan Hutan (Non Tambang)

Sumber: Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, data s.d November 2023

PERSETUJUAN LINGKUNGAN

DATA DAN INFORMASI

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2023

TABEL VI.1. DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN REKOMENDASI DAN IZIN LINGKUNGAN (UKL-UPL) TAHUN 2013-2022

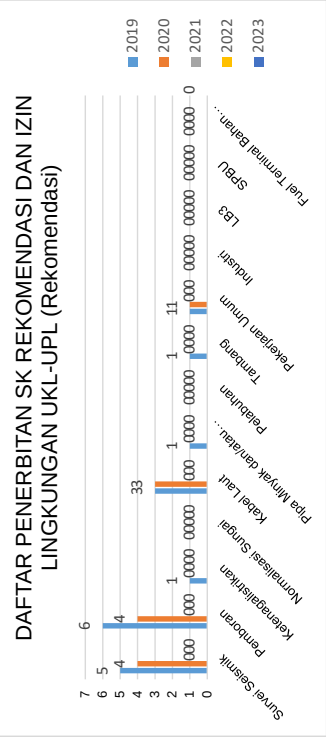
No	JENIS KEGIATAN		2019	2020	2021	2022	2023
1	2		9	10	11	12	13
1	Survei Seismik	Rekomendasi	5	4	-	-	-
		SKIL	5	4	-	-	-
		PKPLH	-	-	4	-	-
2	Pemboran	Rekomendasi	6	4	-	-	-
		SKIL	6	6	-	-	-
		PKPLH	-	-	5	-	1
3	Ketenagalistrikan	Rekomendasi	1	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-	-
		PKPLH	-	-	1	28	73
4	Normalisasi Sungai	Rekomendasi	-	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-	-
		PKPLH	-	-	-	-	-
5	Kabel Laut	Rekomendasi	3	3	-	-	-
		SKIL	0	0	-	-	-
		PKPLH	-	-	2	-	-
6	Pipa Minyak dan/atau Gas	Rekomendasi	1	-	-	-	-
		SKIL	2	-	-	-	-
		PKPLH	-	-	-	54	28
7	Pelabuhan	Rekomendasi	-	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-	-
		PKPLH	-	-	2	4	3
8	Tambang	Rekomendasi	1	-	-	-	-
		SKIL	1	-	-	-	-
		PKPLH	-	-	2	3	4
9	Pekerjaan Umum	Rekomendasi	1	1	-	-	-
		SKIL	1	1	-	-	1
		PKPLH	-	-	1	36	22
10	Industri	Rekomendasi	-	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-	-
		PKPLH	-	-	1	7	17
11	SPBU	Rekomendasi	-	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-	-
		PKPLH	-	-	15	66	4
12	Fuel Terminal Bahan Bakar/DPPU	Rekomendasi	18	12	-	-	-
		SKIL	14	11	-	-	-
	JUMLAH	PKPLH	-	-	33	201	154

Keterangan:

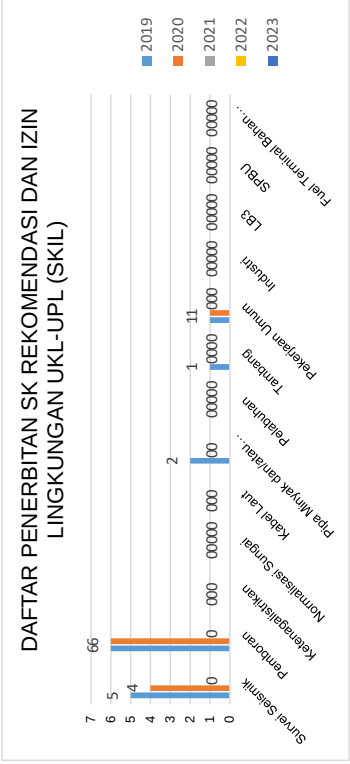
SKIL : Surat Keputusan Izin Lingkungan

PKPLH : Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup

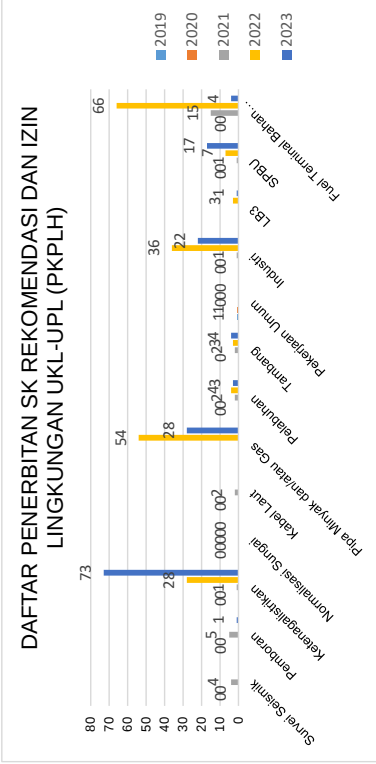
Sumber : Direktorat Pengolahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d 31 Desember 2022



Gambar 65. Grafik Daftar Penerbitan SK Rekomendasi dan Izin Lingkungan UKL-UPL (Rekomendasi)



Gambar 66. Grafik Daftar Penerbitan SK Rekomendasi dan Izin Lingkungan UKL-UPL (SKIL)



Gambar 67. Grafik Daftar Penerbitan SK Rekomendasi dan Izin Lingkungan UKL-UPL (PKPLH)

TABEL VI.2 DAFTAR PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN LINGKUNGAN DAN IZIN LINGKUNGAN (AMDAL) TAHUN 2013-2022

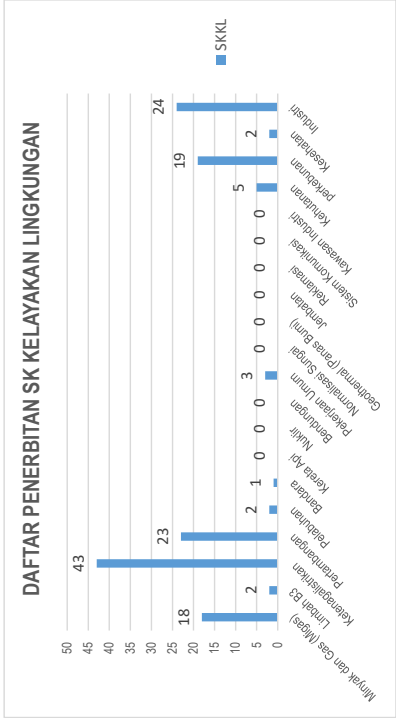
No.	JENIS KEGIATAN	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1	Minyak dan Gas (Migas)	SKKL	16	16	65	18
		SKIL	17	21	-	-
2	Limbah B3	SKKL	8	4	9	1
		SKIL	0	1	-	-
3	Ketenagalistrikan	SKKL	4	3	8	29
		SKIL	0	0	-	-
4	Pertambangan	SKKL	2	2	2	14
		SKIL	2	2	-	-
5	Pelabuhan	SKKL	6	6	-	3
		SKIL	0	0	-	-
6	Bandara	SKKL	4	6	-	-
		SKIL	0	0	-	-
7	Kereta Api	SKKL	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-
8	Nuklir	SKKL	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-
9	Bendungan	SKKL	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-
10	Pekerjaan Umum	SKKL	-	-	-	3
11	Normalisasi Sungai	SKKL	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-
12	Geothermal (Panas Bumi)	SKKL	-	2	2	-
		SKIL	-	1	-	-
13	Jembatan	SKKL	-	-	-	-
		SKIL	-	-	-	-
14	Reklamas	SKKL	-	-	1	-
		SKIL	-	-	-	-
15	Sistem Komunikasi	SKKL	-	-	1	-
		SKIL	-	-	-	-
16	Kawasan Industri	SKKL	-	-	1	-
		SKIL	-	-	-	-
17	Kehutanan	SKKL	-	-	-	2
		SKIL	-	-	-	-
18	perkebunan	SKKL	-	-	6	19
		SKIL	-	-	-	-
19	Kesehatan	SKKL	-	-	1	2
		SKIL	-	-	11	24
20	Industri	SKKL	-	-	-	-
		IL	-	-	-	-
	JUMLAH	SKKL	40	39	93	142
		SKIL	19	25	-	-

Keterangan:

SKKL : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan

SKIL : Surat Keputusan Izin Lingkungan

Sumber : Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan, Data s/d Oktober 2023



Gambar 68. Grafik Daftar Penerbitan SK Kelayakan Lingkungan Tahun 2023

KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

DATA DAN INFORMASI

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2023

TABEL VII.1 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW)

Provinsi	PRA VALIDASI		VALIDASI		
	No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal
2017					
Jawa Tengah			S.1263/MenLHK/PDLKWS/PLA.3/10/2017	06/10/2017	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029
DIY	Notulensi	03/08/2017	S.1535/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017	Validasi KLHS PK RTRW Daerah Istimewa Yogyakarta
2018					
Lampung	BA.2/PDLKWS/PKLHWS/1/2018	26/01/2018	S.370/PKTL/PDLKWS/PLA.3/04/2018	02/04/2018	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Lampung Tahun 2009-2029
Riau			S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11/04/2018	Validasi KLHS RTRW Provinsi Riau Tahun 2017-2037
Nusa Tenggara Timur			S.584/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2018	24/05/2018	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur
Gorontalo			S.676/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25/06/2018	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2010-2030
2019					
DKI Jakarta	BA.27/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	20/12/2018	S.76/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2019	24/01/2019	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2030
Nusa Tenggara Barat	BA.20/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	10/12/2018	S.513/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019	Validasi KLHS RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010-2030
Sumatera Barat	BA.09/PDLKWS/PKLHWS/03/2019	11/03/2019	S.761/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.07/2019	22/07/2019	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032
Bali	BA.8/PDLKWS/PKLHWS/7/2018	31/07/2018	S.862/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	09/08/2019	Validasi KLHS Terhadap Revisi RTRW Provinsi Bali Tahun 2009-2029
Revisi Sulawesi Selatan Substansi Kehutanan	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/3/2019	29/03/2019	S.466/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/5/2019	10/05/2019	Validasi KLHS Revisi RTRW Substansi Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan
	BA.16/PDLKWS/PKLHWS/5/2019	08/05/2019			
Sulawesi Selatan	BA.07/PDLKWS/PKLHWS/3/2019	04/03/2019	S.598/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019	Validasi KLHS RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029
Bengkulu	BA.15/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	12/11/2018	S.1112/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/9/2019	12/09/2019	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032
Jawa Barat	BA.19/PDLKWS/PKLHWS/6/2019	28/06/2019	S.1226/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/10/2019	07/10/2019	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029
Sulawesi Tenggara	BA.26/PDLKWS/PKLHWS/11/2019	01/11/2019			
	BA.31/PDLKWS/PKLHWS/11/2019	04/12/2019			
Sulawesi Tengah	BA.27/PDLKWS/PKLHWS/11/2019	07/11/2019			
Sulawesi Tengah (Arahan Zonasi)	BA.31/PDLKWS/PKLHWS/11/2019	28/11/2019			
2020					
PPFKH RTRW Sulawesi Tengah	BA.39/PDLKWS/PKLHWS/09/2020	21/09/2020	S.1956/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/11/2020	18/11/2020	Validasi KLHS Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Provinsi Sulawesi Tengah
Jawa Timur	BA.04/PDLKWS/PKLHWS/06/2020	04/06/2020	S.2069/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2020	07/12/2020	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031
Maluku Utara	BA.1/PDLKWS/PKLHWS/1/2020	31/01/2020			
Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan RTRW Bengkulu	BA.38/PDLKWS/PKLHWS/12/2020	19/12/2019			
Nusa Tenggara Barat Revisi	BA.7/PDLKWS/PKLHWS/12/2020	29/12/2020			
	BA.5/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	24/11/2020			
Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Kalimantan Utara	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/12/2020	18/12/2020			
2021					
Revisi RTRW Sulawesi Tengah	BA.27/PDLKWS/PKLHWS/11/2019	07/11/2019			
	BA.4/PDLKWS/PKLHWS/09/2020	21/09/2020	S.462/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	04/01/2021	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tengah
Revisi RTRW Nusa Tenggara Barat	BA.5/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	24/11/2020	S.497/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	04/06/2021	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2009-2029
Revisi Papua Barat RTRW Integrasi RZWP3K	BA.34/PDLKWS/PKLHWS/10/2021	19/10/2021	S.2264/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2021	27/12/2021	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Papua Barat tahun 2021-2041

Provinsi	PRA VALIDASI		VALIDASI		
	No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal
2022					
Kalimantan Selatan	BA.40/PDLKWS/KLHS/12/2021	10/12/2021	S.275/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	22/02/2022	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015-2035
Jawa Barat	BA.7/PDLKWS/KLHS/01/2022	24/01/2022	S.563/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	14/04/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042
Bali RTRW integrasi RZWP3K	BA.9/PDLKWS/KLHS/01/2022	01/03/2022	S.648/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	28/04/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Bali Tahun 2022-2042
Banten	BA.8/PDLKWS/KLHS/02/2022	17/02/2022	S.1024/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2022	11/07/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Banten Tahun 2022-2042
DKI Jakarta	BA.16/PDLKWS/KLHS/06/2022	29/06/2022	S.1136/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2022	29/07/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022-2042
Sulawesi Tengah	BA.17/PDLKWS/KLHS/08/2022	04/08/2022	S.1521/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2022	22/09/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022-2042
Kalimantan Timur	BA.20/PDLKWS/KLHS/09/2022	15/09/2022	S.1680/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2022	14/10/2022	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2022-2042
Jambi	BA.19/PDLKWS/KLHS/09/2022	05/09/2022	S.1749/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2022	28/10/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Jambi Tahun 2022-2042
Kalimantan Tengah	BA.22/PDLKWS/KLHS/09/2022	20/09/2022	S.2113/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2022	30/12/2022	Validasi KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2022-2042
2023					
Sulawesi Tenggara	BA.30/PDLKWS/KLHS/12/2022	02/12/2022	S.239/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023	13/02/2023	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2014-2034
Bengkulu	BA.34/PDLKWS/KLHS/12/2022	27/12/2022	S.238/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023	13/02/2023	Validasi KLHS RTRW Provinsi Bengkulu Tahun 2023-2043
NTB	BA.26/PDLKWS/KLHS/12/2022	01/11/2022	S.185/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023	03/02/2023	Validasi KLHS Revisi RTRW Provinsi NTB Tahun 2023-2043
DIY	BA.35/PDLKWS/KLHS/12/2022	27/12/2022	S.268/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023	17/02/2023	Validasi KLHS RTRW Provinsi DIY Tahun 2023-2043
Maluku	BA.02/PDLKWS/KLHS/01/2023	10/01/2023	S.269/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023	17/02/2023	Validasi KLHS RTRW Provinsi Maluku Tahun 2022-2042
Jawa Timur	BA.27/PDLKWS/KLHS/11/2022	02/11/2022	S.212/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023	09/02/2023	Validasi KLHS RTRW Provinsi Jawa Timur
Papua	BA.12/PDLKWS/KLHS/02/2023	14/02/2023	S.293/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023	28/02/2023	Validasi KLHS RTRW Provinsi Papua Tahun 2023-2042
Kalimantan Selatan			S.366/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2023	24/03/2023	Perubahan Validasi KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042
Lampung	BA.15/PDLKWS/KLHS/04/2023	03/04/2023	S.505/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2023	12/05/2023	Validasi KLHS RTRW Provinsi Lampung Tahun 2023-2043
Kepulauan Riau	BA.31/PDLKWS/KLHS/12/2022	08/12/2022	S.599/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2023	12/06/2023	Validasi KLHS RTRW Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2022-2042
Gorontalo	BA.17/PDLKWS/KLHS/05/2023	16/05/2023	S.700/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2023	10/07/2023	Validasi KLHS RTRW Provinsi Gorontalo Tahun 2023-2042
Sumatera Selatan	BA.19/PDLKWS/KLHS/05/2023	24/05/2023	S.726/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2023	12/07/2023	Validasi KLHS RTRW Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023-2042
Jawa Tengah	BA.35/PDLKWS/KLHS/12/2022	27/12/2023	proses pengajuan persetujuan validasi ke Dirjen PKTL		
Maluku Utara	BA.28/PDLKWS/KLHS/11/2023	01/11/2023	proses pembuatan konsep surat validasi		

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Oktober 2023

TABEL VII.2 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA RINCI TATA RUANG KAWASAN (RRTR)

No.	Provinsi	PRA VALIDASI		VALIDASI		
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal
22	KSP Gugus Kepulauan Togeau	BA. 7/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	26/11/2020	S.580/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	16/4/2021	Validasi KLHS RTR KSP Gugus Kepulauan Togeau, Provinsi Sulawesi Tengah
23	Masterplan IKN	BA. 3/PDLKWS/PKLHWS/2/2021	16/02/2021	S.321/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2021	26/2/2021	Validasi KLHS Masterplan Ibu Kota Negara
2022						
24	RDTR KPN Entikong	BA. 7/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	19/05/2021	S.41/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Entikong Provinsi Kalimantan Barat
25	RDTR KPN Nangabadau dan Paloh-Aruk	BA. 8/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	19/05/2021	S.36/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Nangabadau Provinsi Kalimantan Barat
26		BA. 8/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	19/05/2021	S.35/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Paloh Aruk Provinsi Kalimantan Barat
27	RDTR KPN Motamasin, Nusa Tenggara Timur	BA. 10/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	21/05/2021	S.39/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Motamasin Provinsi Nusa Tenggara Timur
28	RDTR KPN Motaain dan RDTR KPN Wini	BA. 11/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	21/05/2021	S.37/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Motaain Provinsi Nusa Tenggara Timur
29		BA. 11/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	21/05/2021	S.38/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Motaain Provinsi Nusa Tenggara Timur
30	RDTR KPN Skouw Provinsi Papua	BA. 12/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	24/05/2021	S.40/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	10/01/2022	Validasi KLHS RDTR KPN Skouw Provinsi Papua
31	Pelabuhan Palembang Baru Tanjung Carat			S.272/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022	Validasi KLHS Dalam Rangka Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat Provinsi Sumatera Selatan
32	RTR KSN Ibu Kota Nusantara	BA. 13/PDLKWS/KLHS/3/2022	17/03/2022	S.502/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	08/04/2022	Validasi KLHS RTR KSN Ibu Kota Nusantara
33	RTR KSN BANJARBAKULA	BA. 41/PDLKWS/PKLHWS/12/2021	23/12/2021	S.645/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2022	28/04/2022	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin-Banjjar Baru-Banjjar-Barito Kuala-Tanah Laut (Banjarbakula)
34	RTR KSN TN KERINCI SEBLAT	BA. 2/PDLKWS/KLHS/01/2022	18/01/2022	S.789/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2022	24/5/2022	Validasi KLHS untuk Ranperpres RTR KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS)
35	RDTR KPN Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur	BA. 4/PDLKWS/KLHS/01/2022	19/01/2022	S.872/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/6/2023	Validasi KLHS RDTR KPN Atambua di Provinsi Nusa Tenggara Timur
36	RDTR KPN Yeketun di Provinsi Papua	BA. 3/PDLKWS/KLHS/01/2022	19/01/2022	S.873/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/6/2024	Validasi KLHS RDTR KPN Yeketun di Provinsi Papua
37	RDTR KPN Merauke di Provinsi Papua	BA. 5/PDLKWS/KLHS/01/2022	20/01/2022	S.874/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/6/2025	Validasi KLHS RDTR KPN Merauke di Provinsi Papua
38	RDTR KPN di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis di Provinsi Riau	BA. 6/PDLKWS/KLHS/01/2022	20/01/2022	S.875/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	13/6/2022	Validasi KLHS RDTR KPN di Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Bengkalis di Provinsi Riau
39	RDTRWP Provinsi DKI Jakarta			S.917/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2022	21/06/2022	Validasi KLHS RDTR Wilayah Perencanaan DKI Jakarta
40	RDTR WP IKN WP Timur 1	BA. 23/PDLKWS/KLHS/10/2022	18 Oktober 2022	S.2050/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2022	20/12/2022	Validasi KLHS RDTR WP IKN WP Timur 1

No.	Provinsi	PRA VALIDASI		VALIDASI		
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal
41	RDTR WP IKN WP Timur 2	BA.24/PDLKWS/KLHS/10/2022	18 Oktober 2022	S.2051/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2022	20/12/2022	Validasi KLHS RDTR WP IKN WP Timur 2
42	RTR KSN Subak Bali Landscape	BA.10/PDLKWS/KLHS/03/2022	04 Maret 2022	S.1189/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2022	05/08/2022	Validasi KLHS RTR KSN Subak Bali Landscape
43	RTR KSN Kawasan Cagar Budaya Muarajambi	BA.12/PDLKWS/KLHS/03/2022	04 Maret 2022	S.1190/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2022	05/08/2022	Validasi KLHS RTR KSN Muarajambi
44	RTR KSN Kawasan Ekosistem Leuser	BA.11/PDLKWS/KLHS/03/2022	04 Maret 2022	S.1188/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2022	05/08/2022	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Ekosistem Leuser
45	RTR KSN Danau Limboto	BA.15/PDLKWS/KLHS/03/2022	20 Juni 2022	S.1423/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2022	13/09/2022	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Danau Limboto
46	RTR KSN Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung	BA.14/PDLKWS/KLHS/04/2022	19/04/2022	S.1774/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2022	03/11/2022	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Perkotaan Palembang-Betung-Indralaya-Kayuagung
47	RTR KSN Kawasan Candi Prambanan	BA.21/PDLKWS/KLHS/09/2022	19/09/2022	S.1993/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2022	12/12/2022	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Candi Prambanan
2023						
48	RDTR WP IKN Barat			S.49/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2023	11/01/2023	Validasi KLHS untuk Ranperka OIKN RDTR WP IKN Barat
49	RDTR WP 1 KIPP			S.48/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2023	11/01/2023	Validasi KLHS untuk Ranperka OIKN RDTR WP 1 KIPP
50	RTR Pulau Jawa Bali	BA.18/PDLKWS/KLHS/9/2022	09/02/2022	S.124/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2023	20/01/2023	Validasi KLHS RTR Pulau Jawa Bali
51	RDTR Sei Pancang	BA.22/PDLKWS/KLHS/10/2022	10/10/2022	S.159/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2023	31/01/2023	Validasi KLHS RDTR KPN Sei Pancang
52	RTR Pulau Sulawesi	BA.33/PDLKWS/KLHS/12/2022	15/12/2022	S.240/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2023	13/02/2023	Validasi KLHS RTR Pulau Sulawesi
53	RTR Pulau Sumatera	BA.32/PDLKWS/KLHS/12/2022	15/12/2022	S.360/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2023	20/03/2023	Validasi KLHS RTR Pulau Sumatera
54	RDTR WP IKN Selatan	BA.07/PDLKWS/KLHS/02/2023	06/02/2023	S.359/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2023	20/03/2023	Validasi KLHS RDTR IKN Selatan
55	RDTR WP 9 IKN Muara Jawa	BA.10/PDLKWS/KLHS/02/2023	06/02/2023	S.380/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2023	28/03/2023	Validasi KLHS RDTR WP 9 IKN Muara Jawa
67	RTR KSN Bimindo	BA.25/PDLKWS/KLHS/11/2022	01/11/2022	S.491/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2023	09/05/2023	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Perkotaan Bimindo
57	RDTR WP 7 IKN Simpang Samboja			S.378/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2024	28/03/2023	Validasi KLHS RDTR WP 7 Simpang Samboja
58	RDTR WP 6 IKN Utara			S.385/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2023	31/03/2023	Validasi KLHS untuk Ranperka OIKN RDTR WP 6 IKN Utara
59	RDTR WP 8 IKN Kuala Samboja			S.418/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2023	11/04/2023	Validasi KLHS RDTR WP 8 Kuala Samboja
60	RTR KPN dengan Laut Lepas	BA.11/PDLKWS/KLHS/02/2023	13/02/2023	S.598/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2023	12/06/2023	Validasi KLHS RTR KPN dengan Laut Lepas
61	RTR KSN Kerajaan Majapahit Trowulan	BA.01/PDLKWS/KLHS/1/2023	09/01/2023	S.815/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2023	31/07/2023	Validasi KLHS RTR KSN Kawasan Kerajaan Majapahit Trowulan Tahun 2022-2042
62	RTR KSN Maminasata	BA.16/PDLKWS/KLHS/05/2023	03/05/2023			proses pengajuan persetujuan validasi ke Dirjen PKTL
63	RTR Pulau Kalimantan	BA.21/PDLKWS/KLHS/8/2023	01/08/2023			proses pengajuan persetujuan validasi ke Dirjen PKTL
64	RDTR KSPN Ranai					proses pengajuan persetujuan validasi ke Dirjen PKTL
65	RDTR KSPN Serasan					proses pengajuan persetujuan validasi ke Dirjen PKTL

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Oktober 2023

TABEL VII.3 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR PULAU-PULAU KECIL (RZWP3K)

No.	Provinsi	Pra Validasi		Validasi		
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal
2017						
1	Jawa Timur	BA.01/PDLKWS/PKLHWS/05/2017	31/05/2017	S.1371/PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2017	06/10/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Jawa Timur
2	NTB	BA.13/PDLKWS/PKLHWS/09/2017	22/09/2017	S.1537/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat
3	NTT			S.1570/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Timur
4	Sulawesi Tengah	BA.11/PDLKWS/PKLHWS/7/2017	21/07/2017	S.1534/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Sulawesi Tengah
5	Sumatera Barat	BA.20/PDLKWS/PKLHWS/08/2019	07/08/2017	S.1669/PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2017	21/12/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Nusa Tenggara Barat
6	Jawa Tengah	BA.10/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	10/07/2017	S.1670/PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2017	21/12/2017	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Jawa Tengah
7	Sulawesi Barat	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/08/2017	04/08/2017			
2018						
8	Lampung			S.166/PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018	12/02/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Lampung
9	Kalimantan Selatan	BA.07/PDLKWS/PKLHWS/07/2017	05/07/2017	S.169/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2018	12/02/2018	Validasi KLHS RZWP3K Kalimantan Selatan Tahun 2018-2038
10	Kalimantan Utara			S.414/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11/04/2018	Validasi KLHS RZWP3K Kalimantan Utara Tahun 2017-2037
11	Jawa Barat	BA.06/PDLKWS/PKLHWS/4/2018	23/04/2018	S.775/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/7/2018	12/07/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Jawa Barat
12	Gorontalo			S.675/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2018	25/06/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Gorontalo
13	Kalimantan Tengah	BA.03/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	30/01/2018	S.841/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	02/08/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Kalimantan Tengah
14	Sulawesi Selatan	BA.04/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	19/02/2018	S.895/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	10/08/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Sulawesi Selatan
15	DI Yogyakarta	BA.07/PDLKWS/PKLHWS/07/2018	26/07/2018	S.1214/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.01/0/2018	30/10/2018	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
16	Kalimantan Barat	BA.17/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	14/11/2018			
17	Kepulauan Riau	BA.23/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	11/12/2018			
18	Papua Barat	BA.22/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	11/12/2018			
2019						
19	Bengkulu	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/10/2018	15/10/2018	S.80/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/01/2019	24/01/2019	Validasi KLHS RZWP3K Bengkulu Tahun 2018-2038
20	Sumatera Utara	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	01/11/2018	S.77/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/01/2019	24/01/2019	Validasi KLHS RZWP3K Kalimantan Utara Tahun 2018-2038
21	Sulawesi Tenggara	BA.25/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	13/12/2018	S.213/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.003/2019	06/03/2019	Validasi KLHS RZWP3K Sulawesi Tenggara Tahun 2018-2038
22	DKI Jakarta	BA.28/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	31/12/2018	S.338/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.004/2019	09/04/2019	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi DKI Jakarta
23	Aceh	BA.21/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	11/12/2018	S.510/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019	Validasi KLHS RZWP3K Aceh Tahun 2018-2038
24	Sumatera Selatan	BA.04/PDLKWS/PKLHWS/02/2019	23/04/2018	S.902/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.08/2019	14/08/2019	Validasi KLHS RZWP3K Sumatera Selatan Tahun 2019-2039
25	Bangka Belitung	BA.05/PDLKWS/PKLHWS/4/2018	17/05/2019	S.938/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.08/2019	16/08/2019	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019-2039
26	Jambi	Notulensi	11/12/2018	S.1275/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.01/0/2019	14/10/2019	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Jambi Tahun 2019-2039
27	Papua Barat	BA.22/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	31/07/2018	S.1490/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.01/11/2019	10/11/2019	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Papua Barat
28	Bali	BA.25/PDLKWS/PKLHWS/09/2019	26/08/2019	S.1612/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.01/2/2019	19/12/2019	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Bali Tahun 2019-2039
29	Banten	BA.23/PDLKWS/PKLHWS/8/2019	15/11/2019			
30	Kepulauan Riau	Notulensi				
2020						
31	Kalimantan Timur	BA.18/PDLKWS/PKLHWS/06/2019	21/06/2019	S.1103/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.07/2020	31/07/2020	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2039
32	Riau	BA.20/PDLKWS/PKLHWS/08/2019	07/08/2019	S.1563/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.08/2020	26/08/2020	Validasi KLHS RZWP3K Provinsi Riau Tahun 2019-2039
33	Papua	BA.39/PDLKWS/PKLHWS/12/2019	20/12/2019			
		BA.8/PDLKWS/PKLHWS/11/2020	27/11/2020			

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2022

TABEL VII.4 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)

No.	Provinsi	PRA VALIDASI		VALIDASI		
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	Perihal
2018						
1	Jawa Barat	BA. 10/PDLKWS/PKLHWS/10/2018	8 Oktober 2018	S.1331/MenLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.O/11/2018	23 November 2018	Validasi KLHS Revisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025
2020						
2	Sumatera Barat			S.469/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.O/3/2020	13 Maret 2020	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025
2023						
1	Sulawesi Tenggara	BA.20/PDLKWS/KLHS/8/2023	1 Agustus 2023	S.1085/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2023	3 Oktober 2023	Validasi KLHS RPJPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025-2045
2	Gorontalo	BA.26/PDLKWS/KLHS/8/2023	28 Agustus 2023	proses pengajuan persetujuan validasi ke Dirjen PKTL		

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Oktober 2023

TABEL VII.5 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

No.	Provinsi	Pra Validasi		Validasi	
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat
2017					
1	Gorontalo	BA.14/PDLKWS/PKLHWS/09/2017	28/09/2017	S.1533/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017
2	Kepulauan Bangka Belitung	BA.24/PDLKWS/PKLHWS/08/2019	30/08/2019	S.1536/PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2017	06/11/2017
2018					
3	Sulawesi Utara			S.38/MenLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2018	17/01/2018
4	DKI Jakarta			S.344/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2018	27/03/2018
5	Sulawesi Barat	BA.4/PDLKWS/PKLHWS/1/2018	30/01/2018	S.415/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2018	11/04/2018
6	DI Yogyakarta			S.896/MENLHK PKTL/PDLKWS/PLA.3/8/2018	10/08/2018
7	Jawa Tengah			S.1363/MENLHK PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018	03/12/2018
8	Jawa Barat	BA.19/PDLKWS/PKLHWS/11/2018	26/11/2018	S.1472/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/12/2018	27/12/2018
9	Papua	BA.26/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	13/12/2018		
2019					
10	Sulawesi Tenggara	BA.24/PDLKWS/PKLHWS/12/2018	13/12/2018	S.133/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2019	12/02/2019
11	Sumatera Selatan	BA.01/PDLKWS/PKLHWS/01/2019	11/01/2019	S.509/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019
12	Maluku	BA.05/PDLKWS/PKLHWS/02/2019	19/02/2019	S.512/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/5/2019	20/05/2019
13	Lampung	BA.15/PDLKWS/PKLHWS/04/2019	29/04/2019	S.859/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	09/08/2019
14	Jawa Timur	BA.02/PDLKWS/PKLHWS/01/2019	14/01/2019	S.864/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/8/2019	09/08/2019
15	Riau	BA.08/PDLKWS/PKLHWS/03/2019	08/03/2019	S.1115/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/9/2019	12/09/2019
16	Bangka Belitung	BA.24/PDLKWS/PKLHWS/08/2019	30/08/2019	S.1634/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2019	27/12/2019
17	Sulawesi Selatan	BA.6/PDLKWS/PKLHWS/3/2019	04/03/2019		
18	Bali	BA.12/PDLKWS/PKLHWS/4/2019	05/04/2019		
19	Nusa Tenggara Barat	BA.14/PDLKWS/PKLHWS/04/2019	18/04/2019		
20	Banten	BA.22/PDLKWS/PKLHWS/08/2019	26/08/2019		
21	Sulawesi Tengah	BA.28/PDLKWS/PKLHWS/11/2019	07/11/2019		
22	Kalimantan Barat	BA.30/PDLKWS/PKLHWS/11/2019	21/11/2019		
23	Maluku Utara	Notulensi	09/12/2019		

No.	Provinsi	Pra Validasi		Validasi		
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat	
2020						
24	Kalimantan Timur	BA.11/PDLKWS/IPKLHWS/04/2019	01/04/2019	S.241/MENLHK-PKTL/PDLKWS/OTL.0/2/2020	10/02/2020	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2018-2023
25	Nusa Tenggara Barat	BA.6/PDLKWS/IPKLHWS/11/2020	24/11/2020	S.469/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	04/05/2021	
26	Sulawesi Selatan	BA.9/PDLKWS/IPKLHWS/12/2020	07/12/2020			
2021						
27	Perubahan Kalimantan Barat	BA.1/PDLKWS/IPKLHWS/1/2021	01/12/2021			
28	Perubahan RPJMD Jawa Barat	BA.2/PDLKWS/IPKLHWS/2/2021	02/04/2021	S.717/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	13/04/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023
29	Perubahan RPJMD DKI Jakarta	BA.4/PDLKWS/IPKLHWS/3/2021	03/01/2021	S.716/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/3/2021	10/02/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi DKI Jakarta
30	Nusa Tenggara Barat			S.469/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/4/2021	05/04/2021	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2024
31	Sumatera Barat	BA.6/PDLKWS/IPKLHWS/4/2021	22/4/2021	S.1553/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2021	15/09/2021	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026
32	Kalimantan Tengah	BA.14/PDLKWS/IPKLHWS/6/2021	06/06/2021			
33	Perubahan Jawa Tengah	BA.15/PDLKWS/IPKLHWS/6/2021	06/09/2021	S.1577/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2021	17/09/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023
34	Bengkulu	BA.17/PDLKWS/IPKLHWS/6/2021	25/6/2021	S.1696/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/10/2021	07/10/2021	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026
35	Perubahan Sumatera Utara	BA.18/PDLKWS/IPKLHWS/6/2021	28/6/2021			
36	Perubahan Lampung	BA.19/PDLKWS/IPKLHWS/6/2021	30/06/2021	S.1552/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/9/2021	15/09/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024
37	Kalimantan Selatan	BA.21/PDLKWS/IPKLHWS/6/2021	15/07/2021	S.2031/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2021	19/11/2021	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026
38	Perubahan Maluku	BA.25/PDLKWS/IPKLHWS/8/2021	27/8/2021	S.2032/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2021	19/11/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019-2024
39	Perubahan Jawa Timur	BA.26/PDLKWS/IPKLHWS/9/2021	09/01/2021	S.2030/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2021	19/11/2021	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024
40	Jambi	BA.28/PDLKWS/IPKLHWS/9/2021	09/10/2021	S.2089/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/11/2021	01/12/2021	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2021-2026
41		BA.35/PDLKWS/IPKLHWS/11/2021	11/05/2021			
42	Perubahan Kalimantan Timur	BA.29/PDLKWS/IPKLHWS/9/2021	09/10/2021			
43	Sulawesi Utara	BA.30/PDLKWS/IPKLHWS/9/2021	15/9/2021			
47	Riau	BA.36/PDLKWS/IPKLHWS/11/2021	11/09/2021			
2022						
48	Kalimantan Tengah	BA.14/PDLKWS/IPKLHWS/6/2021	06/06/2021	S.14/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	06/01/2022	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026
49	Sulawesi Tengah	BA.20/PDLKWS/IPKLHWS/6/2021	30/06/2021	S.13/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	06/01/2022	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026
	Sumatera Selatan	BA.32/PDLKWS/IPKLHWS/9/2021	30/9/2021	S.265/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019-2023
	Kepulauan Riau	BA.31/PDLKWS/IPKLHWS/9/2021	16/9/2021	S.46/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	11/01/2022	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026
	Bali	BA.33/PDLKWS/IPKLHWS/10/2021	18/10/2021	S.266/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	21/02/2022	Validasi KLHS RPJMD Provinsi Bali Tahun 2018-2023
	Kalimantan Timur	BA.29/PDLKWS/IPKLHWS/9/2021	09/10/2021	S.94/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	18/01/2022	Validasi KLHS Perubahan RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2022

TABEL VII.6 STATUS VALIDASI KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) FOOD ESTATE (FE)

No.	Provinsi	Pra Validasi		Validasi	
		No. BA Pra Validasi	Tanggal Pra Validasi	No. Surat	Tanggal Surat
2021					
1	KHKP Kalimantan Tengah	BA.5/PDLKWS/PKLHWS/3/2021	25/03/2021	S.1047/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/6/2021	16/06/2021
2	BCLS Jambi	BA.9/PDLKWS/PKLHWS/5/2021	20/5/2021		
3	BCLS Kab. Merauke Papua	BA.22/PDLKWS/PKLHWS/8/2021	08/02/2021		
2022					
4	KHKP Bangka Belitung	BA.24/PDLKWS/PKLHWS/8/2021	27/08/2021	S.66/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/1/2022	Validasi KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
5	KHKP Ketapang	BA.16/PDLKWS/PKLHWS/6/2021	17/06/2021	S.267/MENLHK-PKTL/PDLKWS/PLA.3/2/2022	Validasi KLHS Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate di Kabupaten Ketapang
		BA.27/PDLKWS/PKLHWS/9/2021	09/06/2021		

Sumber: Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor, Data s.d Desember 2022

DUKUNGAN MANAJEMEN

DATA DAN INFORMASI

Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Tahun 2023

TABEL VIII.1. REKAPITULASI SEBARAN PNS DAN CPNS BERDASARKAN GOLONGAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH

No.	UNIT KERJA	GOLONGAN																	KET
		IV				III			II			I				JUMLAH			
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
I	Sekretariat Dijien. Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	8	7	15	25	25	50	6	6	12	-	-	-	-	39	38	77		
II	Direktorat Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wliayah Pengelolaan Hutan	7	8	15	32	33	65	-	3	3	-	-	-	-	39	44	83		
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan	7	6	13	23	14	37	-	5	5	-	-	-	-	30	25	55		
IV	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	9	3	12	38	22	60	4	1	5	1	-	1	52	26	78			
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	6	6	12	14	10	24	3	4	7	-	-	-	23	20	43			
VI	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4	6	10	15	14	29	4	4	8	-	-	-	23	24	47			
	JUMLAH	41	36	77	147	118	265	17	23	40	1	-	1	206	177	383			
1.	BPKH Wil. I Medan	3	-	3	19	10	29	10	9	19	-	-	-	32	19	51			
2.	BPKH Wil. II Palembang	4	-	4	16	9	25	4	6	10	-	-	-	24	15	39			
3.	BPKH Wil. III Pontianak	4	-	4	16	10	26	6	2	8	-	-	-	26	12	38			
4.	BPKH Wil. IV Samarinda	2	1	3	24	12	36	7	4	11	-	-	-	33	17	50			
5.	BPKH Wil. V Banjarbaru	5	-	5	13	15	28	8	7	15	-	-	-	26	22	48			
6.	BPKH Wil. VI Manado	5	-	5	14	7	21	3	4	7	-	-	-	22	11	33			
7	BPKH Wil. VII Makasar	3	4	7	18	14	32	6	5	11	-	-	-	27	23	50			
8.	BPKH Wil. VIII Denpasar	3	1	4	25	10	35	2	5	7	-	-	-	30	16	46			
9.	BPKH Wil. IX Ambon	1	-	1	18	8	26	16	1	17	-	-	-	35	9	44			
10.	BPKH Wil. X Irian Jaya	1	-	1	19	9	28	9	3	12	-	-	-	29	12	41			
11.	BPKH Wil. XI Yogyakarta	4	6	10	20	29	49	5	2	7	-	-	-	29	37	66			
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	2	-	2	12	12	24	7	3	10	-	-	-	21	15	36			
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	2	-	2	14	9	23	3	5	8	-	-	-	19	14	33			
14	BPKH Wil. XIV Kupang	3	-	3	16	7	23	4	2	6	-	-	-	23	9	32			
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	3	1	4	12	4	16	8	3	11	-	-	-	23	8	31			
16	BPKH Wil. XVI Palu	5	-	5	15	11	26	9	3	12	-	-	-	29	14	43			
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	4	-	4	13	3	16	12	3	15	-	-	-	29	6	35			
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	1	1	2	10	6	16	5	3	8	-	-	-	16	10	26			

		GOLONGAN																KET		
No.	UNIT KERJA	IV				III				II				I					JUMLAH	
		L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	TOTAL			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	5	-	5	13	5	18	4	5	9	-	-	-	22	10	32				
20	BPKH Wil. XX Bandar Lampung	3	2	5	14	10	24	8	-	8	-	-	-	25	12	37				
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	2	1	3	21	5	26	1	3	4	-	-	-	24	9	33				
22	BPKH Wil. XXII Kendari	1	-	1	15	8	23	3	3	6	-	-	-	19	11	30				
	Jumlah	66	17	83	357	213	570	140	81	221	-	-	-	563	311	874				

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Keterangan:

IV L = Gol. IV Laki-laki

IV P = Gol. IV Perempuan

III L = Gol. III Laki-laki

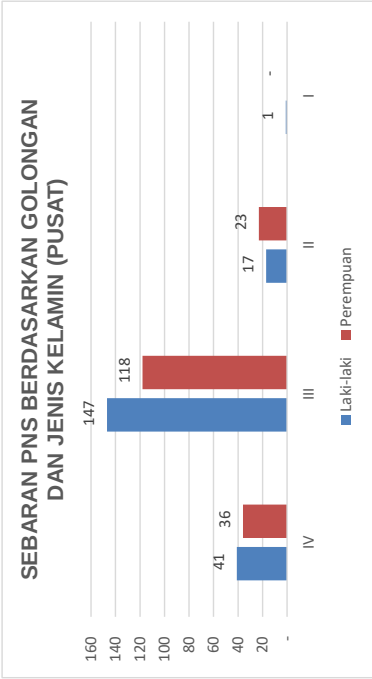
III P = Gol. III Perempuan

II L = Gol. II Laki-laki

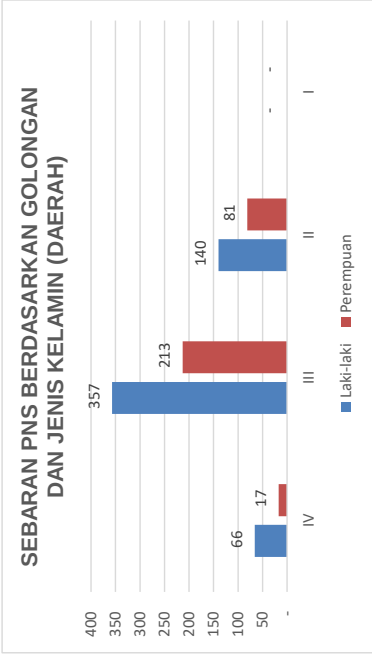
II P = Gol. II Perempuan

I L = Gol. I Laki-laki

I P = Gol. I Perempuan



Gambar 69. Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di Pusat



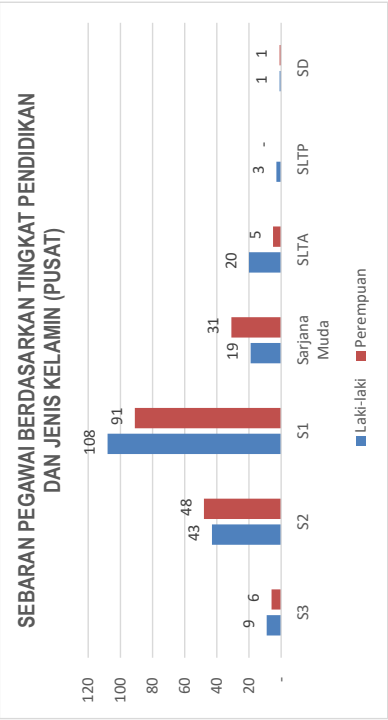
Gambar 70. Grafik Sebaran PNS Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin di Daerah

TABEL VIII.2. SEBARAN PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN DAN JENIS KELAMIN LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2022

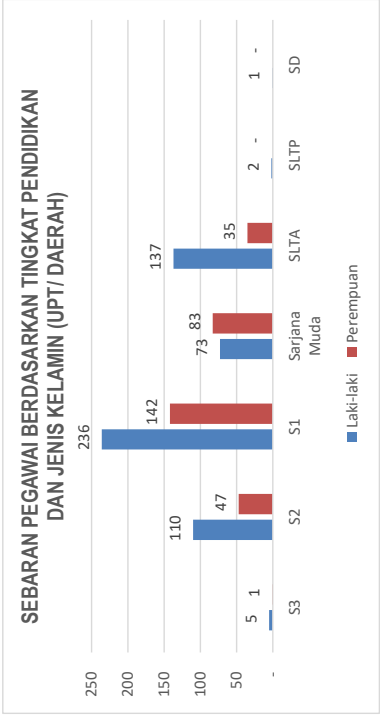
No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SLTP			SD			TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.	
			P			P			P			P			P			P			L	P						
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML			L		P	JML		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
A. PUSAT																												
I	Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	PNS	3	-	3	6	11	17	19	19	38	6	8	14	4	2	6	1	-	1	-	-	-	-	79	39	40	
		Upah	-	-	-	-	-	-	10	2	12	1	-	1	10	-	10	-	-	-	1	-	1	24	22	2		
II	Direktorat Rencana, Penggunaan & Pembentukan	PNS	1	1	2	10	13	23	25	25	50	2	5	7	1	-	1	-	-	-	-	-	-	83	39	44		
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	4	1	5	-	1	1	3	1	4	-	-	-	-	-	11	7	4		
III	Direktorat Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya	PNS	3	2	5	8	8	16	14	9	23	-	4	4	4	2	6	-	-	-	-	1	1	55	29	26		
		Upah	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	10	7	3		
IV	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan	PNS	2	-	2	9	5	14	25	16	41	4	4	8	8	1	9	1	-	1	1	-	1	76	50	26		
		Upah	-	-	-	-	-	-	13	5	18	4	-	4	13	-	13	-	-	-	-	-	-	35	30	5		
V	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan	PNS	-	2	2	6	6	12	12	11	23	3	4	7	1	-	1	-	1	-	-	-	-	46	23	23		
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	-	-	2	2	4	-	-	-	-	-	8	3	5		
VI	Direktorat Pecegahan Dampak Lingkungan Usaha	PNS	-	1	1	4	5	9	13	11	24	4	6	10	2	-	2	-	-	-	-	-	-	46	23	23		
		Upah	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	7	4	3		
JUMLAH		PNS	9	6	15	43	48	91	108	91	199	19	31	50	20	5	25	3	-	3	1	1	2	385	203	182		
		Upah	-	-	-	-	2	2	35	15	50	5	2	7	32	3	35	-	-	-	1	-	1	95	73	22		
TOTAL PNS+UPAH			9	6	15	43	50	93	143	106	249	24	33	57	52	8	60	3	-	3	2	1	3	480	276	204		
B. DAERAH																												
I	BPKH Wil. I Medan	PNS	-	-	-	4	-	4	14	8	22	5	8	13	8	2	10	-	-	-	-	-	-	49	31	18		
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-	-	-	7	1	8	-	-	-	-	-	-	13	8	5		
II	BPKH Wil. II Palembang	PNS	-	-	-	6	1	7	6	5	11	4	5	9	8	4	12	-	-	-	-	-	-	39	24	15		
		Upah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	-	6	-	-	-	-	-	-	8	6	2		
III	BPKH Wil. III Pontianak	PNS	1	-	1	4	4	8	10	6	16	4	2	6	5	1	6	1	-	1	-	-	-	38	25	13		
		Upah	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	12	1	13	-	-	-	-	-	-	16	14	2		
IV	BPKH Wil. IV Samarinda	PNS	-	-	-	10	2	12	13	13	26	4	6	10	6	2	8	-	-	-	1	-	1	57	34	23		
		Upah	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	12	4	16	-	-	-	-	-	-	18	13	5		
V	BPKH Wil. V Banjarbaru	PNS	-	-	-	7	-	7	9	11	20	1	4	5	8	3	11	-	-	-	-	-	-	43	25	18		
		Upah	-	-	-	1	2	3	7	2	9	1	1	2	8	1	9	-	-	-	-	-	-	23	17	6		
VI	BPKH Wil. VI Manado	PNS	-	-	-	6	-	6	9	7	16	-	3	3	8	-	8	-	-	-	-	-	-	33	23	10		
		Upah	-	-	-	-	-	-	3	4	7	-	-	-	6	1	7	-	-	-	-	-	-	14	9	5		
VII	BPKH Wil. VII Makassar	PNS	-	-	-	4	6	10	13	8	21	4	3	7	6	5	11	-	-	-	-	-	-	49	27	22		
		Upah	-	-	-	-	-	-	4	5	9	-	-	-	10	-	10	-	-	-	-	-	-	19	14	5		
VIII	BPKH Wil. VIII Denpasar	PNS	-	-	-	3	1	4	15	7	22	2	5	7	11	2	13	-	-	-	-	-	-	46	31	15		
		Upah	-	-	-	-	-	-	4	1	5	1	-	1	4	-	4	-	-	-	-	-	-	10	9	1		
IX	BPKH Wil. IX Ambon	PNS	-	-	-	2	1	3	11	5	16	8	2	10	13	1	14	-	-	-	-	-	-	43	34	9		
		Upah	-	-	-	-	-	-	4	4	8	-	-	-	13	3	16	-	-	-	-	-	-	24	17	7		
X	BPKH Wil. X Irian Jaya	PNS	-	-	-	4	2	6	14	6	20	2	3	5	9	-	9	-	-	-	-	-	-	40	29	11		
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	7	2	9	1	-	1	-	-	14	10	4		
XI	BPKH Wil. XI Yogyakarta	PNS	-	1	1	4	12	16	12	19	31	5	4	9	7	2	9	1	-	1	-	-	-	67	29	38		
		Upah	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	10	-	10	1	-	1	-	-	-	12	12	-		

No.	UNIT KERJA	Status Pegawai	S3			S2			SARJANA (S1)			SARJANA MUDA			SLTA			SLTP			SD			TOTAL	JENIS KELAMIN		KET.
			L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML	L	P	JML		L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
XII	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	PNS	-	-	-	5	2	7	5	4	9	5	9	14	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	36	21	15
XIII	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	Upah	-	-	-	-	-	-	3	1	4	2	1	3	7	1	8	-	-	-	-	-	-	-	15	12	3
		PNS	-	-	-	5	2	7	8	4	12	4	7	11	2	1	3	-	-	-	-	-	-	33	19	14	
XIV	BPKH Wil. XIV Kupang	Upah	-	-	-	-	-	-	2	5	7	2	1	3	10	2	12	-	-	-	-	-	-	-	22	14	8
		PNS	-	-	-	8	1	9	9	3	12	2	4	6	4	1	5	-	-	-	-	-	-	32	23	9	
XV	BPKH Wil. XV Gorontalo	Upah	-	-	-	-	-	-	6	4	10	2	-	2	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	19	15	4
		PNS	1	-	1	4	1	5	8	3	11	4	3	7	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	31	23	8
XVI	BPKH Wil. XVI Palu	Upah	-	-	-	-	-	-	4	5	9	-	-	-	12	1	13	-	-	-	-	-	-	-	22	16	6
		PNS	1	-	1	9	3	12	11	6	17	5	2	7	4	2	6	-	-	-	-	-	-	-	43	30	13
XVII	BPKH Wil. XVII Manokwari	Upah	-	-	-	-	2	2	13	3	16	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	21	15	6
		PNS	1	-	1	3	1	4	12	2	14	2	2	4	11	1	12	-	-	-	-	-	-	-	35	29	6
XVIII	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	Upah	-	-	-	-	-	-	4	9	13	-	2	2	11	2	13	-	-	-	1	-	1	29	16	13	
		PNS	-	-	-	1	1	2	10	5	15	4	2	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	26	17	9
XIX	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	Upah	-	-	-	1	-	1	6	1	7	-	-	-	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	14	13	1
		PNS	-	-	-	7	-	7	9	3	12	3	5	8	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	32	22	10
XX	BPKH Wil. XX Bandar lampung	Upah	-	-	-	-	-	-	4	5	9	-	-	-	8	2	10	-	-	-	1	-	1	20	13	7	
		PNS	-	-	-	5	4	9	11	7	18	3	-	3	6	1	7	-	-	-	-	-	-	37	25	12	
XXI	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	Upah	-	-	-	-	-	-	2	3	5	2	-	2	6	1	7	-	-	-	-	-	-	-	14	10	4
		PNS	-	-	-	6	1	7	16	4	20	1	2	3	1	2	3	-	-	-	-	-	-	33	24	9	
XXII	BPKH Wil. XXII Kendari	Upah	-	-	-	-	-	-	4	6	10	2	-	2	9	5	14	-	-	-	-	-	-	-	26	15	11
		PNS	1	-	1	3	2	5	11	6	17	1	2	3	3	1	4	-	-	-	-	-	-	-	30	19	11
	JUMLAH	Upah	-	-	-	-	-	-	3	6	9	1	1	2	7	-	7	-	-	-	-	-	-	-	18	11	7
		PNS	5	1	6	110	47	157	236	142	378	73	83	156	137	35	172	2	-	2	1	-	1	872	564	308	
	TOTAL PNS + UPAH	Upah	-	-	-	2	5	7	79	71	150	14	8	22	180	28	208	2	-	2	2	-	2	2	391	279	112
		PNS	5	1	6	112	52	164	315	213	528	87	91	178	317	63	380	4	-	4	3	-	3	1.263	843	420	

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



Gambar 71. Grafik Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Pusat



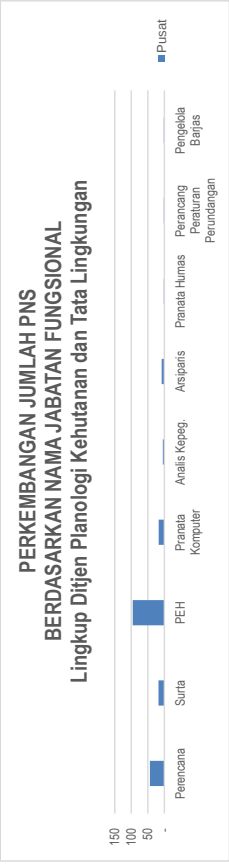
Gambar 72. Grafik Sebaran Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di UPT/ Daerah

TABEL VIII.3. PERKEMBANGAN JUMLAH PNS BERDASARKAN NAMA JABATAN FUNGSIONAL LINGKUP DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN, PUSAT DAN DAERAH S.D. DESEMBER 2023

No	Unit Kerja	PERENCANA		JLH. PERENCANA	SURTA				JLH. SURTA	Pengendali Ekosistem Hutan (PEH)				JLH. PEH		PRANATA KOMPUTER			JLH. PRANATA KOMPUTER
		Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli		Terampil	Calon Terampil	Ahli	Calon Ahli			Terampil	Calon Terampil	Ahli	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
PUSAT																			
I	Sekretariat Dijien Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	6	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	-	12
2	Direktorat Rencana, Pengunaan, dan Pembentukan Wilayah	15	-	15	-	-	2	-	2	3	-	22	-	25	-	-	4	-	4
3	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	9	-	9	1	-	4	-	5	6	-	22	-	28	-	-	1	-	1
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	1	-	1	1	-	1	-	2	7	-	25	-	32	-	-	-	-	-
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah	12	-	12	-	-	9	-	9	7	-	2	-	9	-	-	-	-	-
JUMLAH PUSAT		44	-	44	2	-	16	-	18	24	-	72	-	96	3	-	14	-	17
BPKH																			
II	BPKH Wil. I Medan	-	-	-	2	-	2	-	4	11	-	7	-	18	2	-	-	-	2
2	BPKH Wil. II Palembang	-	-	-	4	-	1	-	5	9	-	4	-	13	-	-	-	-	-
3	BPKH Wil. III Pontianak	-	-	-	2	-	2	-	4	6	-	8	-	14	-	-	-	-	-
4	BPKH Wil. IV Samarinda	-	-	-	2	-	2	-	4	8	-	17	-	25	-	-	-	-	-
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	-	-	-	1	-	-	-	1	11	-	11	-	22	-	-	-	-	-
6	BPKH Wil. VI Manado	-	-	-	-	-	2	-	2	7	-	6	-	13	-	-	1	-	1
7	BPKH Wil. VII Makassar	-	-	-	2	-	1	-	3	11	-	19	-	30	-	-	-	-	-
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	-	-	-	3	-	2	-	5	7	-	8	-	15	-	-	-	-	-
9	BPKH Wil. IX Ambon	-	-	-	3	-	1	-	4	10	-	5	-	15	2	-	-	-	2
10	BPKH Wil. X Jayapura	-	-	-	-	-	2	-	2	10	-	8	-	18	-	-	-	-	-
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	-	-	-	1	-	2	-	3	6	-	13	-	19	-	-	-	-	-
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	-	-	-	2	-	2	-	4	13	-	6	-	19	-	-	-	-	-
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	-	-	-	3	-	3	-	6	7	-	6	-	13	-	-	-	-	-
14	BPKH Wil. XIV Kupang	-	-	-	-	-	6	-	6	6	-	7	-	13	-	-	1	-	1
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	-	-	-	1	-	2	-	3	9	-	7	-	16	-	-	-	-	-
16	BPKH Wil. XVI Palu	-	-	-	2	-	1	-	3	7	-	10	-	17	1	-	-	-	1
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	-	-	-	2	-	2	-	4	9	-	2	-	11	-	-	-	-	-
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	-	-	-	2	-	3	-	5	4	-	6	-	10	1	-	-	-	-
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	9	-	17	-	-	-	-	-
20	BPKH Wil. XX Lampung	-	-	-	1	-	2	-	3	4	-	15	-	19	-	-	-	-	-
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	15	-	16	-	-	-	-	-
22	BPKH Wil. XXII Kendari	-	-	-	2	-	-	-	2	3	-	10	-	13	-	-	-	-	-
JUMLAH		-	-	-	36	-	38	-	74	167	-	199	-	366	6	-	2	-	7
JUMLAH PUSAT + BPKH		44	-	44	38	-	54	-	92	191	-	271	-	462	9	-	16	-	24

No	Unit Kerja	ANALIS KEPEG.		JLH. ANALIS KEPEG.	ARSIPARIS			JLH. ARSIPARIS	PRANATA HUMAS		JUMLAH PRANATA A HUMAS	Perancang Peraturan Perundang-CALON		Pengelola Pengadaan Barang/Jasa AHLI CALON		JUMLAH PENGELOLA PENGADAAN BRG/JASA	TOTAL
		Ahli	Calon Ahli		Terampil	Ahli	Calon Teram		S	AHLI		CALON					
1	2	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34		
I	PUSAT																
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	5	-	5	3	1	-	4	2	2	2	-	-	-	-	31	
2	Direktorat Rencana, Penggunaan, dan Pembentukan Wilayah	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	48	
3	Direktorat Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	45	
4	Direktorat Inventarisasi dan Sumber Daya Hutan	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	36	
5	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	
6	Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	31	
	JUMLAH PUSAT	5	-	5	5	3	-	8	2	2	2	2	-	2	-	194	
II	BPKH																
1	BPKH Wil. I Medan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	
2	BPKH Wil. II Palembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	
3	BPKH Wil. III Pontianak	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	20	
4	BPKH Wil. IV Samarinda	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	30	
5	BPKH Wil. V Banjarbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
6	BPKH Wil. VI Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17	
7	BPKH Wil. VII Makassar	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	35	
8	BPKH Wil. VIII Denpasar	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	22	
9	BPKH Wil. IX Ambon	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	22	
10	BPKH Wil. X Jayapura	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	21	
11	BPKH Wil. XI Yogyakarta	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	25	
12	BPKH Wil. XII Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23	
13	BPKH Wil. XIII Pangkalpinang	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20	
14	BPKH Wil. XIV Kupang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
15	BPKH Wil. XV Gorontalo	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	20	
16	BPKH Wil. XVI Palu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
17	BPKH Wil. XVII Manokwari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	
18	BPKH Wil. XVIII Banda Aceh	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	16	
19	BPKH Wil. XIX Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	18	
20	BPKH Wil. XX Lampung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	24	
21	BPKH Wil. XXI Palangkaraya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	18	
22	BPKH Wil. XXII Kendari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	16	
	JUMLAH	1	-	1	10	1	-	11	-	-	-	9	-	9	-	468	
	JUMLAH PUSAT + BPKH	6	-	6	15	4	-	19	2	2	2	11	-	11	-	662	

Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan



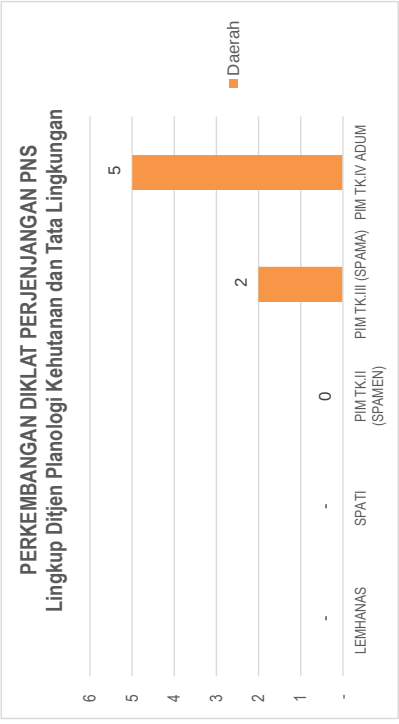
Gambar 73. Grafik Perkembangan Jumlah PNS Berdasarkan Nama Jabatan Fungsional Lingkup Pusat Ditjen PKTL



Gambar 74. Grafik Perkembangan Jumlah PNS Berdasarkan Nama Jabatan Fungsional Lingkup Daerah Ditjen PKTL

NO	UNIT KERJA	DIKLAT PENJENJANGAN (orang)																							
		TAHUN 2019						TAHUN 2020						TAHUN 2021						TAHUN 2022					
		LEMHANAS	SPATI	PIM TK.II SPAMEN	PIM TK.III SPAMA	PIM TK.IV ADUM	JML	LEMHANAS	SPATI	PIM TK.II SPAMEN	PIM TK.III SPAMA	PIM TK.IV ADUM	JML	LEMHANAS	SPATI	PIM TK.II SPAMEN	PIM TK.III SPAMA	PIM TK.IV ADUM	JML	LEMHANAS	SPATI	PIM TK.II SPAMEN	PIM TK.III SPAMA	PIM TK.IV ADUM	JML
15	BPKH WILAYAH XV GORONTALO	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16	BPKH WILAYAH XVI PALU	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	BPKH WILAYAH XVII MANOKWARI	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18	BPKH WILAYAH XVIII BANDA ACEH	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	BPKH WILAYAH XIX PEKANBARU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
20	BPKH WILAYAH XX LAMPUNG	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
21	BPKH WILAYAH XXI PALANGKARAYA	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	BPKH WILAYAH XXII KENDARI	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH B		-	-	-	7	21	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
JUMLAH A+B		-	-	-	12	27	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

Sumber : Sekretaris Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, data s.d Desember 2023



Gambar 75. Grafik Perkembangan Diklat Perjenjangan PNS Lingkup Daerah Ditjen PKTL

**TABEL VIII.5. PERKEMBANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
BIDANG PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN**

I. UNDANG-UNDANG

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	UU Nomor 41	1999	Kehutanan	Masih berlaku dan ada perubahan
2	UU Nomor 19	2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang	Masih berlaku
3	UU Nomor 32	2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masih berlaku dan ada perubahan
4	UU Nomor 11	2020	Cipta Kerja	Sudah tidak berlaku
5	Peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 2	2022	Cita Kerja	Sudah tidak berlaku pada saat tahun terbit (2023)

II. PERATURAN PEMERINTAH

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	PP. Nomor 44	2004	Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku
2	PP. Nomor 2	2008	Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di Luar Kegiatan Kehutanan yang Berlaku pada Dephut	Sudah tidak berlaku
3	PP. Nomor 10	2010	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
4	PP. Nomor 24	2010	Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	PP. Nomor 60	2012	Perubahan PP Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
6	PP. Nomor 61	2012	Perubahan PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
7	PP. Nomor 33	2014	Jenis Dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kegiatan Kehutanan Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan	Masih berlaku
8	PP. Nomor 104	2015	Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
9	PP. Nomor 105	2015	Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
10	PP. Nomor 46	2016	Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Masih berlaku
11	PP. Nomor 46	2017	Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup	Masih Berlaku
12	PP Nomor 22	2021	Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Masih Berlaku
13	PP Nomor 23	2021	Penyelenggaraan Kehutanan	Masih Berlaku
14	PP Nomor 45	2021	Penyelenggaraan Informasi Geospasial	Masih Berlaku

III. PERATURAN PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Perpres Nomor 28	2011	Penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk Penambangan Bawah Tanah	Masih berlaku
2	Perpres Nomor 88	2017	Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan	Masih berlaku

IV. INSTRUKSI PRESIDEN

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Instruksi Presiden Nomor 10	2011	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
2	Instruksi Presiden Nomor 6	2013	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
3	Instruksi Presiden Nomor 8	2015	Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
4	Instruksi Presiden Nomor 6	2017	Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Izin Baru Hutan Alam primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
5	Instruksi Presiden Nomor 8	2018	Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa Sawit	Sudah tidak berlaku
6	Instruksi Presiden Nomor 5	2019	Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Masih Berlaku

V. PERATURAN MENTERI/ KEPUTUSAN MENTERI

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	683/Kpts-II/1981	1981	Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Produksi	Masih berlaku
2	364/Kpts-II/1990; 519/Kpts/HK.050/7/1990; 23-VII-1990	1990	Ketentuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Pemberian hak Guna Usaha untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Masih berlaku
3	418/Kpts-II/1993	1993	Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
4	292/Kpts-II/1995	1995	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	250/Kpts-II/1996	1996	Perubahan Kepmenhut No.418/Kpts-II/1993 tentang Penetapan Tambahan Persyaratan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
6	613/Kpts-II/1997	1997	Pedoman Pengukuhan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan	Sudah tidak berlaku
7	333/Kpts-II/1999	1999	Pedoman Pemeliharaan dan Pengamanan Batas Hutan	Sudah tidak berlaku
8	32/Kpts-II/2001	2001	Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
9	70/Kpts-II/2001	2001	Penetapan Kawasan Lindung Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
10	146/Kpts-II/2003	2003	Pedoman Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan/Ex Kawasan Hutan Pengembangan Usaha Pertanian	Sudah tidak berlaku
11	230/Kpts-II/2003	2003	Pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Sudah tidak berlaku
12	P.31/Menhut-II/2005	2005	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Pengembangan Usaha Budidaya Perkebunan	Sudah tidak berlaku
13	P.28/Menhut-II/2006	2006	Sistem Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
14	P.66/Menhut-II/2006	2006	Perubahan Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Huta	Sudah tidak berlaku
15	P.67/Menhut-II/2006	2006	Kriteria dan Standar Inventarisasi Hutan	Sudah tidak berlaku
16	P.26/Menhut-II/2007	2007	Perubahan Kedua Keputusan Menteri Kehutanan No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
17	P.62/Kpts-II/2007	2007	Perubahan Ketiga Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/2007 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
18	23/MEN/XI/2007; P.52/Menhut-II/2008	2008	Pelepasan Kawasan Hutan dalam rangka Penyelenggaraan Transmigrasi	Masih berlaku
19	P.43/Menhut-II/2008	2008	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
20	P.56/Menhut-II/2008	2008	Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan Revegetasi untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan	Masih berlaku dan ada perubahan
21	P.38/Menhut-II/2008	2008	Perubahan Keempat Atas Kepmenhut No.292/Kpts-II/1995 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
22	P.53/Menhut-II/2008	2008	Optimalisasi Peruntukan Areal hutan Produksi yang dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
23	P.48/Menhut-II/2009	2009	Penggunaan Peta Dasar Tematik Kehutanan Skala 1 : 250.000	Sudah tidak berlaku
24	P.50/Menhut-II/2009	2009	Penegasan Status dan Fungsi Kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
25	P.16/Menhut-II/2009	2009	Perubahan Kelima Atas Kepmenhut No. 292/Kpts-II/1995 tentang tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
26	P.6/Menhut-II/2009	2009	Pembentukan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan	Sudah tidak berlaku
27	P.28/Menhut-II/2009	2009	Tata Cara Pelaksanaan Konsultasi dalam rangka Pemberian Persetujuan Substansi Kehutanan Atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata	Masih berlaku
28	P.02/Menhut-II/2010	2010	Informasi Kehutanan	Masih berlaku
29	P.06/Menhut-II/2010	2010	Norma, Standar Prosedur dan Kriteria Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Masih berlaku
30	P.32/Menhut-II/2010	2010	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
31	P.33/Menhut-II/2010	2010	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
32	P.34/Menhut-II/2010	2010	Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
33	P.36/Menhut-II/2010	2010	Tim Terpadu dalam Rangka Penelitian Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
34	P.42/Menhut-II/2010	2010	Sistem Perencanaan Kehutanan	Sudah tidak berlaku
35	P.47/Menhut-II/2010	2010	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
36	P.17/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Atas P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
37	P.18/Menhut-II/2011	2011	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
38	P.19/Menhut-II/2011	2011	Penataan Batas Areal Kerja izin Pemanfaatan Hutan	Sudah tidak berlaku
39	P.20/Menhut-II/2011	2011	Pedoman Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
40	P.41/Menhut-II/2011	2011	Standar Fasilitas Saran dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
41	P.44/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Kedua Atas P.33/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
42	P.49/Menhut-II/2011	2011	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030	Sudah tidak berlaku
43	P.50/Menhut-II/2011	2011	Penguatan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
44	P.54/Menhut-II/2011	2011	Perubahan Atas P.41/Menhut-II/2011 tentang Standar Fasilitas Sarana dan Prasarana KPH Lindung Model dan KPH Produksi Model	Masih berlaku
45	P.38/Menhut-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2012 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
46	P.44/Menhut-II/2012	2012	Penguatan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
47	P.41/Menhut-II/2012	2012	Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32/Menhut-II/2010 tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
48	P.14/Menhut-II/2013	2013	Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang pedoman pinjam pakai kawasan hutan	Sudah tidak berlaku
49	P.43/Menhut-II/2013	2013	Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan, Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan dan	Sudah tidak berlaku
50	P.46/Menhut-II/2013	2013	Tata Cara Pengesahan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Masih berlaku
51	P.47/Menhut-II/2013	2013	Pedoman Kriteria dan Standar Pemanfaatan Hutan di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
52	P.62/Menhut-II/2013	2013	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
53	P.16/Menhut-II/2014	2014	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
54	P.25/Menhut-II/2014	2014	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
55	P.27/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.32/Menhut-II/2010 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
56	P.28/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat	Sudah tidak berlaku
57	P.29/Menhut-II/2014	2014	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.34/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
58	Peraturan Bersama Tiga Menteri dan Kepala BPN No. 79/2014, No.	2014	Tata Cara Penyelesaian Penguasaan Tanah di Dalam Kawasan Hutan	Masih berlaku
59	P.16/MenLHK-II/2015	2015	Perubahan kedua atas Permenhut No.34/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Perubahan Fungsi Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
60	P.50/Menlhk/Setjen/2016	2016	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
61	P.51/Menlhk/Setjen/KUM .1/12/2016	2016	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat di Konversi	Sudah tidak berlaku
62	P.81/Menlhk/Setjen/KUM .1/10/2016	2016	Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan	Masih berlaku
63	P.93/Menlhk/Setjen/KUM .1/12/2016	2016	Panitia Tata Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
64	P.96/Menlhk/Setjen/Kum .1/11/2018	2018	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	Sudah tidak berlaku
65	P.97/MENLHK/Setjen/Ku m.1/11/2018	2018	Tukar Menukar Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
66	P.22/MENLHK/Setjen/Ku m.1/7/2018	2018	Norma, Standar, Prosedur, Dan Kriteria Pelayanan Perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Masih berlaku dan ada perubahan
67	P.27/Menlhk/Setjen/Kum .1/7/2018	2018	Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
68	P.17/Menlhk/SETJEN/Ku m.1/5/2018	2018	Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk Sumber Tanah Objek Reforma Agraria	Sudah tidak berlaku
69	P.7/Menlhk/Setjen/Kum. 1/2/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 27/Menlhk/Setjen/Kum.1 /7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
70	P.42/Menlhk/Setjen/Kum .1/8/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17/Menlhk/Setjen/Kum. 1/5/2018	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
71	P.50/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019	2019	Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P. 96/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara	Sudah tidak berlaku
72	P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2020	2020	Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu dan Areal Reklamasi dan	Masih berlaku
73	P.41/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019	2019	Rencana Kehutanan Tingkat Nasional Tahun 2011-2030	Masih berlaku
74	Peraturan Menteri LHK Nomor 7 Tahun 2021	2021	Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
75	Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021	2021	Daftar Usaha/Atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan Upaya	Masih berlaku
76	Peraturan Menteri LHK Nomor 18 Tahun 2021	2021	Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal, Pelatihan Kompetensi Amdal, Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal, Pembentukan Lembaga Uji	Masih berlaku
77	Peraturan Menteri LHK Nomor 24 Tahun 2021	2021	Tata Cara Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan	Masih berlaku

VI. SK. MENTERI (PIPIB)

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK. 7416/Menhut-VII/IPSDH/2011	2006	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi I)	Sudah tidak berlaku
2	SK. 2771/Menhut-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi II)	Sudah tidak berlaku
3	SK. 6315/Menhut-VII/IPSDH/2012	2012	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi III)	Sudah tidak berlaku
4	SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IV)	Sudah tidak berlaku
5	SK. 2796/Menhut-VII/IPSDH/2013	2013	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi V)	Sudah tidak berlaku
6	SK. 3706/Menhut-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VI)	Sudah tidak berlaku
7	SK. 6982/Menhut-VII/IPSDH/2014	2014	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VII)	Sudah tidak berlaku
8	SK. 2312/Menhut-VII/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi VIII)	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
9	SK. 5385/Men-LHK-PKTL/IPSDH/2015	2015	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi IX)	Sudah tidak berlaku
10	SK. 2300/Men-LHK/PKTL/IPSDH/Pla.1/5/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi X)	Sudah tidak berlaku
11	SK. 6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/11/2016	2016	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI)	Sudah tidak berlaku
12	SK.351/MenLHK/SETJEN/PLA.1/7/2017	2017	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XII)	Sudah tidak berlaku
13	SK.6559/MenLHK/IPSDH/PLA.1/12/2017	2017	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIII)	Sudah tidak berlaku
14	SK.3588/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/5/2018	2018	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XIV)	Sudah tidak berlaku
15	SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018	2018	Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV)	Sudah tidak berlaku
16	SK. 7099/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2019	2019	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut	Sudah tidak berlaku
17	SK.851/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2020	2020	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode I	Sudah tidak berlaku
18.	SK.4945/Menlhk-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2020	2020	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut Tahun 2020 Periode II	Sudah tidak berlaku
19	SK.666/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2/2021	2021	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam	Sudah tidak berlaku
20	SK.5446/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/8/2021	2021	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam	Sudah tidak berlaku
21	SK.1629/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/3/2022	2022	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan	Sudah tidak berlaku
22	SK.7954/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/9/2022	2022	Penetapan Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru Pada Hutan Alam Primer dan	Sudah tidak berlaku pada saat tahun terbit (2023)

VII. PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
1	SK.91/VII-PW/2006	2006	Pedoman Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
2	P.01/VII-SET/2009	2009	Nama-nama Jabatan dan uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
3	P.02/VII-SET/2009	2009	Prosedur Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
4	P.03/VII-SET/2009	2009	Klasifikasi Arsip/Dokumen Pengukuhan dan Perubahan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
5	P.01/VII-SET/2010	2010	Peraturan Nama-nama Jabatan dan Uraian Jabatan Non Struktural Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
6	P.02/VII-SET/2010	2010	Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
7	P.03/VII-SET/2010	2010	Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2010-2014	Sudah tidak berlaku
8	P.04/VII-SET/2010	2010	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2011	Sudah tidak berlaku
9	P.05/VII-SET/2010	2010	Petunjuk Teknis Pemetaan Pencadangan Areal Hutan Tanaman Rakyat, Penetapan Areal Kerja, Hutan Kemasyarakatan dan Hutan Desa	Sudah tidak berlaku
10	P.06/VII-SET/2010	2010	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
11	P.07/VII-SET/2010	2010	Standar Nomenklatur Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
12	P.08/VII-SET/2010	2010	Standar Biaya dan Kegiatan Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
13	P.1/VII-SET/2011	2011	Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan	Masih berlaku
14	P.2/VII-SET/2011	2011	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
15	P.3/VII-SET/2011	2011	Perubahan Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
16	P.4/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Sudah tidak berlaku
17	P.5/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penataan Batas Areal Kerja Izin Pemanfaatan Hutan	Sudah tidak berlaku
18	P.6/VII-KUH/2011	2011	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
19	P.7/VII-SET/2011	2011	Renstra Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
20	P.8/VII-SET/2011	2011	Standar Kegiatan dan Biaya Ditjen Planologi Kehutanan Tahun 2010	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
21	P.9/VII-SET/2011	2011	Rencana Kerja Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
22	P.1/VII-SET/2012	2012	Penetapan Kinerja Ditjen Planhut Tahun 2012	Sudah tidak berlaku
23	P.4/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa Pemasangan Tanda Batas dan Pengukuran Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
24	P.5/VII-WP3H/2012	2012	Petunjuk Teknis Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan pada KPHL dan KPHP	Sudah tidak berlaku
25	P.6/VII-SET/2012	2012	Rencana Kerja Ditjen Planhut Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
26	P.9/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dengan Menggunakan GPS	Masih Berlaku
27	P.10/VII-SET/2012	2012	Petunjuk Teknis Pemetaan Kawasan Hutan Tingkat Kabupaten/Kota	Masih berlaku
28	P.11/VII-SET/2012	2012	Standar Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
29	P.13/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan untuk Kepentingan Pembangunan di luar Kehutanan melalui Mekanisme Kerjasama dengan	Sudah tidak berlaku
30	P.14/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Pelaksanaan Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang dilimpahkan dari Menhut kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
31	P.15/VII-PKH/2012	2012	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
32	P.16/VII-SET/2012	2012	Mekanisme dan Tata Cara Penelaahan Peta Permohonan Penggunaan Kawasan Hutan, Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dan Perubahan	Sudah tidak berlaku
33	P.17/VII-SET/2012	2012	Pedoman Penyusunan Laporan Bidang Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
34	P.1/VII-SET/2013	2013	Penetapan Kinerja Tahun 2013	Sudah tidak berlaku
35	P.2/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Sosialisasi Hasil Tata Batas/Penetapan Kawasan Hutan	Masih berlaku
36	P.3/VII-SET/2013	2013	Petunjuk Pelaksanaan Inventarisasi dan Identifikasi Permasalahan Tenurial Kawasan Hutan	Masih berlaku
37	P.4/VII-SET/2013	2013	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
38	P.5/VII-SET/2013	2013	Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku
39	P.6/VII-SET/2013	2013	Perubahan P.5/VII-SET/2013 tentang Standar, Kegiatan dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2014	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
40	P.7/VII-SET/2013	2013	Mekanisme Pengelolaan Data Spasial Kawasan Hutan Dalam Rangka Pengukuhan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Perubahan	Masih berlaku
41	P.1/VII-Set/2014	2014	Penetapan Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan	Sudah tidak berlaku
42	P.2/VII-Set/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan dan Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai kawasan Hutan Dengan Menggunakan GNSS	Masih berlaku
43	P.3/VII-IPSDH/2014	2014	Petunjuk Teknis Penggambaran dan Penyajian Peta Kehutanan	Masih berlaku
44	P.4 /VII/PKH/2014	2014	petunjuk teknik pelaksanaan Monitoring Dan Evaluasi Penggunaan Kawasan Hutan.	Sudah tidak berlaku
45	P.5/VII-PKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Yang Dilimpahkan Menteri Kehutanan Kepada Gubernur	Sudah tidak berlaku
46	P.6/VII-PKH/2014	2014	Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Kepentingan Pembangunan Diluar Kehutanan Melalui Mekanisme Kerjasama	Sudah tidak berlaku
47	P.7 /VII-Set/2014	2014	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
48	P.8/VII-Set/2014	2014	Standar Kegiatan Dan Biaya Bidang Planologi Kehutanan Tahun 2015	Sudah tidak berlaku
49	P.4/PKTL-SET/2015	2015	Penggantian Biaya Pelaksanaan Penataan Batas Kawasan Hutan	Sudah tidak berlaku
50	P.5/PKTL-SET/2015	2015	Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Pemenuhan Kewajiban Pemegang Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang	Masih berlaku
51	P.10/PKTL-SET/2015	2015	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan	Sudah tidak berlaku
52	P.1/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2016	2016	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Sudah tidak berlaku
53	P.2/PKTL/SETDIT/OTL.1/3/2016	2016	Nama nama Jabatan dan Uraian Jabatan Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku
54	P.3/SETDIT/PLA.2/9/2016	2016	Petunjuk Teknis Pengukuhan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
55	P.6/PKTL/SETDIT/OTL.1/12/2016	2016	Tentang Nama Jabatan Dan Uraian Jabatan Non Struktural Pada Balai Pemantapan Kawasan Hutan.	Masih berlaku
56	P.7/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2016	2016	Tentang Prosedur Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan Dan Tata Lingkungan.	Masih berlaku
57	P.8/PKTL/SETDIT/PRO EV/Set.1/ 12/2016	2016	Penetapan Indikator Kinerja Utama	Masih berlaku
58	P.2/PKTL/SETDIT/KEU.1/2/2017	2017	Perjanjian Kinerja	Sudah tidak berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
59	P.3/PKTL/IPSDH/PLA.1/2017	2017	Petunjuk Pelaksanaan Survei Hutan Alam Primer dalam Rangka Verifikasi PIPPIB	Masih berlaku
60	P.4/PKTL/REN/PLA.0/4/2017	2017	Sistem Informasi Spasial dan Dokumentasi Kesatuan Pengelolaan Hutan	Masih berlaku
61	P.5/PKTL/SETDIT/KUM.1/4/2017	2017	Petunjuk Pelaksanaan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan Berbasis Geospasial	Masih berlaku
62	P.9/PKTL/KUH/PLA.2/1/2018	2018	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Batas Pencadangan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi Tidak Produktif dalam Rangka	Masih berlaku
63	P.7/PKTL/SETDIT/KEU.0/8/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No. P.9/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2017 tentang Standar Kegiatan dan Biaya (SKB)	Sudah tidak berlaku
64	P.14/PKTL/SETDIT/KEU.1/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No. P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun	Sudah tidak berlaku
65	P.10/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan No. P.8/PKTL/SETDIT/OTL.2/12/2017 tentang Prosedur Kerja Lingkup Ditjen	Masih berlaku
66	P.12/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018	2018	Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	Sudah tidak berlaku
67	P.4/PKTL/SETDIT/KEU.0/3/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan NO. P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018 tentang Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi	Sudah tidak berlaku
68	P.2/PKTL/SETDIT/OTL.2/3/2018	2018	Prosedur Kerja Lingkup Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Sudah tidak berlaku
69	P.1/PKTL/SETDIT/KEU.0/1/2018	2018	Perjanjian Kinerja Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2018	Sudah tidak berlaku
70	P.5/PKTL/SETDIT/Kum.1/8/2018	2018	Petunjuk Teknis Penelitian Tim Terpadu dalam Rangka Pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi (HPK) tidak Produktif untuk	Masih berlaku
71	P.3/PKTL/SETDIT/OTL.2/3/2018	2018	Proses Bisnis Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	Masih berlaku
72	P.11/PKTL/PDLKWS/OTL.0/12/2018	2018	Petunjuk Teknis Penyusunan Peta Wilayah Ekoregion	Masih berlaku
73	P.8/PKTL/SETDIT/KEU.0/11/2018	2018	Rencana Kerja Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2019	Sudah tidak berlaku
74	P.13/PKTL/SETDIT/KEU.0/12/2018	2018	Perubahan Atas Perdirjen No.P.9/PKTL-STE/2015 tentang Rencana Strategis Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan tahun 2015-2019	Sudah tidak berlaku
75	P.3/PKTL/REN/PLA.0/5/2019	2019	Petunjuk Teknis Pelaksanaan Verifikasi Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan	Masih berlaku
76	P.4/PKTL/SETDIT/PLA.0/8/2019	2019	Sistem Informasi dan Dokumentasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan Berbasis Online	Masih berlaku
77	P.5/PKTL/SETDIT/KEU.0/9/2019	2019	Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Masih berlaku

No.	Nomor Peraturan	Tahun	Tentang	Keterangan
1	2	3	4	5
78	P.13/PKTL/SETDIT/Keu.0/12/2019	2019	Rencana Kerja Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Masih berlaku
79	P.14/PKTL.SETDIT/Keu.0/12/2019	2019	Standar Kegiatan dan Biaya (SKB) Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Tahun 2020	Sudah tidak berlaku
80	P.11/PKTL/SET.2/KUM.1/2020	2020	Penggantian Biaya Penataan Batas Kawasan Hutan	Masih berlaku
81	P.3/PKTL/SET.2/OTL.0/1/2021	2021	Pelaksanaan Fungsi Balai Pemantapan Kawasan Hutan Bidang Tata Lingkungan	Masih berlaku

Sumber: Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s/d Desember 2022

TABEL VIII.6. REKAPITULASI PERKEMBANGAN ANGGARAN DIREKTORAT JENDERAL PLANOLOGI KEHUTANAN DAN TATA LINGKUNGAN

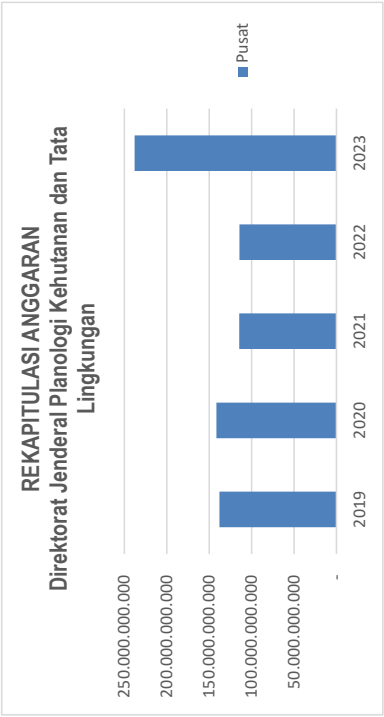
NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
	JUMLAH PUSAT DAN UPT (I+II)	451.314.101	447.060.836.000	532.555.897.000	411.730.791.000	
I	PUSAT	137.921.527	141.462.000.000	114.473.512.000	114.218.752.000	237.879.302.000
1	Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan	61.951.150	72.187.689.000	67.458.562.000	74.638.007.000	94.422.110.000
2	Dit. Rencana, Penggunaan Kawasan Hutan, dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan	49.242.011	25.950.713.000	10.910.219.000	7.570.969.000	23.844.930.000
3	Dit. Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan	11.984.349	27.001.002.000	10.640.908.000	12.669.996.000	25.509.066.000
4	Dit. Inventarisasi dan Pemantauan SDH	4.630.325	3.466.891.000	4.872.124.000	5.249.103.000	6.735.200.000
5	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor	5.748.694	5.987.759.000	9.470.080.000	8.163.418.000	37.721.344.000
6	Dit. Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan	4.364.998	6.867.946.000	11.121.619.000	5.927.259.000	49.646.652.000
II	UPT (BPKH)	313.392.574	305.598.836.000	418.082.385.000	297.512.039.000	648.059.332.000
1	BPKH Wilayah I Medan	14.515.385	18.219.092.000	38.142.281.000	14.795.467.000	79.948.002.000
2	BPKH Wilayah II Palembang	13.479.029	16.797.624.000	20.710.588.000	8.770.753.000	11.715.348.000
3	BPKH Wilayah III Pontianak	17.479.195	15.375.284.000	18.091.190.000	19.731.375.000	15.718.584.000
4	BPKH Wilayah IV Samarinda	16.583.716	13.967.392.000	22.842.372.000	24.636.842.000	22.634.626.000
5	BPKH Wilayah V Banjarbaru	14.553.767	14.929.009.000	16.173.011.000	33.152.567.000	29.696.749.000
6	BPKH Wilayah VI Manado	18.380.925	12.452.729.000	14.685.995.000	10.533.035.000	52.808.626.000
7	BPKH Wilayah VII Makassar	20.324.724	16.098.772.000	22.749.018.000	10.850.584.000	32.582.694.000
8	BPKH Wilayah VIII Denpasar	10.944.681	10.643.214.000	12.514.468.000	8.803.289.000	20.636.532.000
9	BPKH Wilayah IX Ambon	16.996.124	12.602.016.000	15.545.572.000	12.873.024.000	36.818.880.000
10	BPKH Wilayah X Jayapura	15.808.518	42.891.459.000	29.439.864.000	16.132.077.000	27.496.151.000
11	BPKH Wilayah XI Yogyakarta	13.538.153	12.622.599.000	19.585.743.000	10.524.632.000	33.690.105.000
12	BPKH Wilayah XII Tanjung Pinang	11.037.814	7.090.533.000	8.057.129.000	9.319.720.000	26.332.016.000
13	BPKH Wilayah XIII Pangkal Pinang	11.207.461	8.475.310.000	9.694.576.000	6.445.944.000	13.930.192.000
14	BPKH Wilayah XIV Kupang	12.506.972	8.860.899.000	27.404.295.000	6.279.773.000	23.273.242.000
15	BPKH Wilayah XV Gorontalo	14.469.640	8.060.023.000	7.939.673.000	6.895.226.000	9.152.605.000
16	BPKH Wilayah XVI Palu	17.371.168	15.601.111.000	31.944.436.000	9.378.922.000	15.157.054.000
17	BPKH Wilayah XVII Manokwari	16.578.627	9.820.837.000	19.943.547.000	9.069.043.000	28.178.972.000
18	BPKH Wilayah XVIII Banda Aceh	6.952.736	7.666.102.000	11.602.922.000	8.175.513.000	35.726.840.000
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	11.357.055	9.566.968.000	12.423.975.000	33.730.414.000	76.925.982.000
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	9.250.784	8.244.843.000	10.084.738.000	7.372.375.000	14.309.274.000

NO	SATKER/LOKASI	TAHUN 2019	TAHUN 2020	TAHUN 2021	TAHUN 2022	TAHUN 2023
21	BPKH Wilayah XXI Palangkaraya	15.823.273	23.249.079.000	35.783.026.000	19.826.649.000	31.074.707.000
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	14.232.827	12.363.941.000	12.723.966.000	10.214.815.000	10.252.151.000

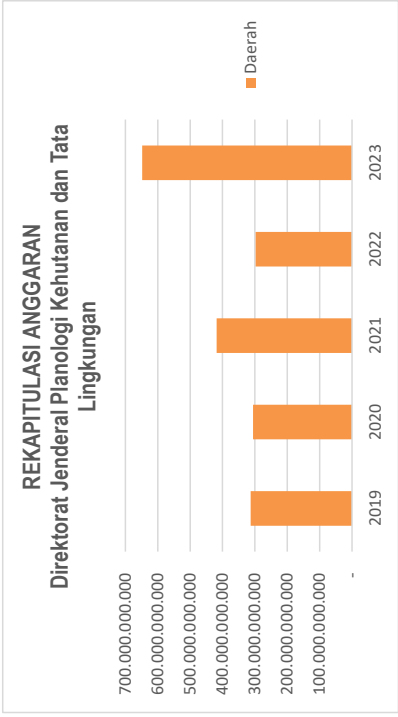
Keterangan:

Pada TA 2010 terdapat penerimaan Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi sebesar Rp 17.980.900.000,-, namun sampai dengan Tahun Anggaran tidak diterima laporan keuangannya karena bukan kewajiban pihak negara donor (on budget treasury)

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d november 2023



Gambar 76. Grafik Rekapitulasi Anggaran Pusat lingkup Ditjen PKTL



Gambar 77. Grafik Rekapitulasi Anggaran UPT/Daerah Lingkup Ditjen PKTL

NO	SATER	TAHUN 2019				TAHUN 2020				TAHUN 2021				TAHUN 2022				TAHUN 2023			
		BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029				BAGIAN ANGGARAN 029			
		ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI	% REALISASI	SISA	ANGGARAN	REALISASI sd 11 DES	% REALISASI	SISA
19	BPKH Wilayah XIX Pekanbaru	11.357.055.000	10.744.780.662	9,461	612.265.338	9.566.968.000	9.233.287.363	9,745	243.680.637	12.423.975.000	12.423.179.149	9,999	795.851	33.730.414.000	33.729.722.837	100,00	681.103	76.925.982.000	76.108.900.518	98,94	817.081.482
20	BPKH Wilayah XX Bandar Lampung	9.250.784.000	8.864.561.843	9,591	286.222.157	8.244.843.000	7.866.175.205	9,541	378.667.795	10.084.738.000	10.082.478.620	9,998	2.259.380	7.372.375.000	7.365.898.685	99,91	6.776.315	14.309.274.000	13.727.274.083	96,00	571.999.917
21	BPKH Wilayah XXI Pangkajene	15.823.273.000	15.518.605.054	9,807	304.667.946	23.249.079.000	22.453.493.447	9,658	795.585.553	35.780.025.000	35.565.146.613	9,945	196.879.387	19.626.649.000	19.756.866.269	99,65	69.982.731	31.074.707.000	30.414.699.867	97,88	660.007.339
22	BPKH Wilayah XXII Kendari	14.232.827.000	14.125.284.437	9,924	107.542.563	12.363.941.000	11.899.503.940	9,692	764.437.060	12.723.966.000	12.665.677.013	9,954	68.288.987	10.214.815.000	10.194.965.302	99,81	19.899.698	10.292.151.000	9.944.965.580	97,00	307.185.420

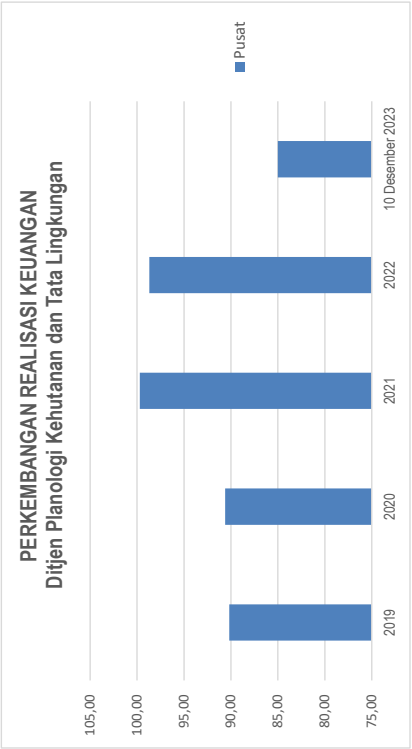
Keterangan:

- Pada TA 2010 terdapat penerimaan Hibah Luar Negeri pada Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sebesar Rp 17.960.900.000,- namun sampai dengan akhir Tahun Anggaran tidak diterima lapornya karena bulan kewajibannya karena bulan kewajibannya pihak negara donor (on budget treasury)

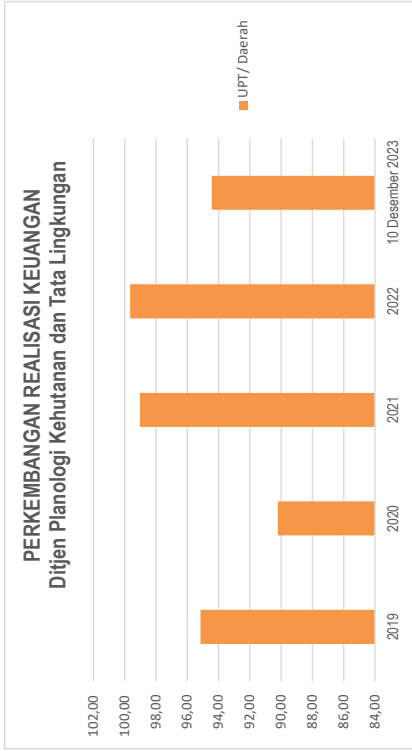
- Terdapat perubahan struktur organisasi di lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tahun 2015. Berdasarkan Surat Kepala Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor B809/D.II/PAN-PRB/2015 tanggal 4 Maret 2015 yang dijadikan acuan untuk melakukan Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengkaji Anggaran Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka penempatan proses penyaluran dokumen anggaran DIPA APBN-P Tahun 2015 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sehubungan dengan Surat Direktur Anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Nomor S-791/AQ/2015 tanggal 9 April 2015 perihal, Ditjen Perencanaan dimohon untuk dapat melaksanakan DIPA awal (DIPA APBN TA 2015) Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebagai Satuan Kerja Pengkaji Anggaran Lingkup Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan

Sumber : Sekretariat Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Data s.d 10 Desember 2023



Gambar 78. Grafik Perkembangan Realisasi Keuangan Pusat Lingkup Ditjen PKTL



Gambar 79. Grafik Perkembangan Realisasi Keuangan UPT/ Daerah Lingkup Ditjen PKTL



Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Gd. Manggala Wanabakti Blok 1 Lt. 7
Jln. Gatot Subroto - Senayan
Jakarta - Indonesia - 10207
Email: datainformasi.planologi@gmail.com